

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
RINTISAN SEKOLAH DASAR BERTARAF INTERNASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 CENTRE CURUP KOTA**



LUKMAN A

7617091766

Disertasi yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

untuk Mendapat Gelar Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

2013

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RSDBI SD
NEGERI 2 CENTRE CURUP KOTA**

***EVALUATION OF POLICY IMPLEMENTATION RSDBI ELEMENTARY
SCHOOL 2 CENTRE CURUP CITY***

LUKMAN A

ABSTRAK

The objective of this research is to investigate and analyze the implementation of RSDBI policy at SDN Centre Curup. The analysis covers 5 criteria of evaluation based on the Regulation of National Education Ministry of Indonesia No. 78 2009 about the policy on International Standard of High school. The data were collected through interview, observation and document analysis that used some research instruments: interview guidance, checklist and field notes. Furthermore the data were analyzed and elaborated based on the criteria of evaluation. This study finds that: (1) from the aspect of institution development which has been done by this elementary school, this school has fulfilled the criteria being RSDBI and changed its status from RSDBI into SDBI; (2) the curriculum used is also suitable to the standard of SDBI; (3) unfortunately, for the other three aspects, involvement of the environment, infrastructure and financial aspect, in fact have not been in accordance with the standard of SDBI. Based on some findings above, the development of quality institutionally needs to always be done.

Keywords: Evaluation, Implementation and Policy of SBI.

RINGKASAN

Kondisi kehidupan global yang semakin kompetitif saat ini dan dalam rangka bangsa Indonesia memiliki kesiapan menghadapi tantangan globalisasi serta mampu memanfaatkan peluang yang datang, menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan bangsa dalam berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin berkembang sejalan dengan kompetisi di tingkat Internasional atau global serta adanya kecendrungan masyarakat Indonesia yang ingin menimba ilmu di luar negeri dengan adanya teknologi negara tersebut yang sudah maju dengan program-program matrikulasi. Seiring pula dengan merebaknya sekolah asing di negeri ini serta tuntutan angkatan kerja maka penyelenggaraan pendidikan nasional harus sesegera mungkin mengikuti arus perkembangan iptek tersebut sebagai pencegahan erosi identitas serta menyelamatkan pangsa pasar sekolah nasional, dengan melakukan inovasi berwujud peningkatan kemampuan SDM melalui peningkatan mutu pendidikan sehingga memiliki daya saing yang seimbang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Salah satu upaya dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM adalah pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Kegiatan atau program SBI adalah penyelenggaraan program pendidikan skala nasional dengan mutu Internasional sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan program SBI dituntut kesiapan semua unsur baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemerintah Provinsi/pemerintah Kabupaten/Kota) maupun masyarakat tak terkecuali peran *stakeholders*

(orang tua murid, komite sekolah, warga sekolah, dewan pendidikan serta lembaga-lembaga yang peduli pada pendidikan).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota?, (2) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kurikulum di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota?, (3) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat oleh RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota? dan (5) Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dalam menuju sekolah dasar Bertaraf Internasional ?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif, subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah, Komite sekolah, Dewan Pengembang dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam pengelolaan data dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data mentah, menyusun transkrip data, pembuatan koding data sesuai dengan fokus penelitian, penyederhanaan data dengan cara mengelompokkan konsep-konsep tertentu dalam suatu kategori, penyimpulan sementara, triangulasi dan penyimpulan akhir.

Temuan penelitian dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan, pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran, pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat/ Komite Sekolah, pengembangan sarana dan prasarana dan implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI.

Setelah melakukan penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota

Implementasi kebijakan RSDBI pada tingkat prosedural berjalan sesuai aturan di mana pelaksanaan dan kemajuan RSDBI di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sesuai dengan panduan teknis dan pedoman pelaksanaan RSDBI. Hal ini dapat dilihat dengan terlaksananya seluruh pekerjaan kebijakan yang meliputi program-program RSDBI yang dikembangkan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota tersebut pada tahun kebijakan tersebut diberikan.

Implementasi kebijakan RSDBI secara substansial bagi kesiapan sekolah menuju fase mandiri sebagai sekolah dasar bertaraf Internasional dirasa efektif. Hal ini dapat dilihat dengan indikator berikut: (a) peningkatan siswa SD yang makin berkualitas yang mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) dan mampu berbahasa Inggris dengan baik dalam mendukung proses pembelajaran; (b) pengembangan program pembelajaran yang mengarah pada standar yakni pengembangan kurikulum yang meliputi standar kompetensi, tujuan, KTSP, silabus, RPP dan bahan ajar yang kualitasnya bertaraf Internasional; (c) sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai berupa ruang Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, media pembelajaran yang berbasis ICT.

2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan proses pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, yaitu kelengkapan kurikulum seperti dokumen I yang memuat: profil sekolah, tujuan pendidikan, visi dan misi sekolah, struktur kurikulum dan muatan KTSP serta kalender pendidikan, semua guru menyusun silabus yang terdiri dari: program tahunan, program

semester, satuan kegiatan mingguan, satuan kegiatan harian dan penilaian perkembangan anak. Standar pengembangan kurikulum RSDBI juga mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM). Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengacu pada kurikulum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, beberapa bagian sudah sesuai dengan standar, yang belum sesuai adalah kemampuan berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing para guru yang mengajar, belum membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi, pada aspek kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan sudah sesuai dengan standar.
4. Implementasi kebijakan pengembangan sarana prasarana belum tersedia sepenuhnya, perpustakaan, jumlah dan judul buku serta media teknologi masih banyak yang kurang.
5. Implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota belum sesuai dengan standar yang ditetapkan karena masih mengharapkan bantuan pemerintah dan membebani orang tua wali murid.

Lembar Persetujuan Panitia Ujian Terbuka Disertasi/ Promosi Doktor

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERBUKA DISERTASI / PROMOSI DOKTOR		
Promotor, Prof. Dr. H. Djaali Tanggal:	Co Promotor, Prof. Dr. H. Rohiat, M.Pd. Tanggal:	
NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. H. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd. (Ketua) ¹
Prof. Dr. H. Djaali (Sekretaris) ²
Nama : Lukman A.		
No. Registrasi: 7617091766		
Tanggal Lulus:		

1) Rektor Universitas Negeri Jakarta

2) Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Lembar Bukti Pengesahan

PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN DISERTASI SETELAH UJIAN TERTUTUP			
No.	N a m a	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr. H. Djaali (Direktur PPs/Ketua)
2.	Prof. Dr. H. Mulyono Abdurahman (Asisten I/Sekretaris)
3.	Prof. Dr. H. Djaali (Promotor)
4.	Prof. Dr. H. Rohiat, M.Pd. (Co- Promotor)
5.	Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM.,M.Pd. (Penguji Senat)
6.	Prof. Dr. H. Ma'ruf Akbar, M.Pd. (Penguji Senat)
7.	Prof. Dr. Hj. Yetti Supriyati, M.Pd. (Penguji Senat)
8.	Prof. Dr. H. Bambang Sahono, M.Pd. (Penguji Luar)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Februari 2013

Hormat saya,

Metrai
6000

Lukman A.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul: "Evaluasi Implementasi Kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota".

Disertasi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih atas kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Secara khusus, melalui kesempatan ini pula penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Bedjo Sujanto, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
2. Prof. Dr. H. Djaali, selaku Direktur Program Pascasarjana UNJ sekaligus sebagai Promotor yang telah banyak menuntun dan membimbing penulis dalam penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan PPs UNJ yang telah banyak memberi masukan kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Rohiat, M.Pd. selaku Co Promotor yang telah banyak memberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penulisan disertasi.
5. Prof. Dr. H. Rambat Nursasongko, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Bengkulu (UNIB).

6. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti program doktor (S3) di UNJ.
7. Bapak Ibu Dosen Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan UNJ.
8. Bapak Ibu dosen Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan UNIB.
9. Segenap Karyawan/Karyawati Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan UNJ dan UNIB.
10. Karneli, S.Pd., MM, selaku Kepala Sekolah Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) SD Negeri 2 Centre Curup Kota, yang telah banyak memberi bahan dalam penulisan Disertasi ini.
11. Teman-teman senasib seperjuangan Program Pascasarjana UNJ yang telah banyak mengingatkan penulis dan memotivasi untuk segera menyelesaikan studi.
12. Istri yang tercinta Hj. Lailati, S.Pd., MM, beserta anak tersayang Mufti Alam Adha, M. Ilham Adepio dan lif Cahyo Tunte yang selalu memberi semangat dan membantu penulis dalam penyelesaian studi ini.

Semoga kebaikan mereka semua tercatat sebagai amal kebajikan dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT Amin.

Jakarta, 11 Februari 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
RINGKASAN	iii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR	vii
PERSETUJUAN HASIL PERBAIKAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Rumusan Masalah.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II LANDASAN TEORETIK	
A. Konsep Evaluasi Kebijakan	17
B. Konsep Kebijakan dan Kebijakan RSDBI.....	33
1. Konsep Kebijakan	33
2. Kebijakan RSDBI	60
3. Sekolah Internasional	76
C. Model Evaluasi <i>Contentance Stake</i>	100
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	103
E. Kriteria Evaluasi	109
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	112
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	112
C. Pendekatan, Metode dan Desain Model Penelitian.....	113
1. Pendekatan Penelitian	113
2. Tipe Penelitian	114
3. Model Penelitian	114
D. Instrument Penelitian.....	120
1. Kisi-Kisi Instrumen.....	120
2. Validasi Instrumen.....	121
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	122

F. Teknik Analisis Data	124
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hasil Evaluasi	127
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan.....	127
2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran	131
3. Implementasi Kebijakan Pengembangan Lingkungan dan Penguatan Peran Masyarakat	141
4. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana	143
5. Implementasi Kebijakan Pembiayaan	151
B. Pembahasan	160
1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan	160
2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran	165
3. Implementasi Kebijakan Pengembangan Lingkungan dan Penguatan Peran Masyarakat.....	168
4. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana	171
5. Implementasi Kebijakan Pembiayaan	177
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan.....	182
B. Rekomendasi.....	184
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN	193
RIWAYAT HIDUP	213

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator atau Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	21
Tabel 2.2 Model dan Kriteria Penelitian.....	109
Tabel 3.1 Model Penelitian.....	115
Tabel 3.2 Kisi-Kisi dan Instrumen Penelitian.....	120
Tabel 3.3 Komponen yang dievaluasi, Pertanyaan, Sumber Data, dan Instrumen yang digunakan.....	122
Tabel 4.1 Implementasi kebijakan dalam Bidang Pengembangan Kurikulum.....	138
Tabel 4.2 Kondisi Sarana dan Prasarana di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.....	149
Tabel 4.3 Keterpenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pembiayaan.....	157

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Evaluasi model Stake	27
Gambar 2.2 Contoh langkah-langkah model Stake.....	29
Gambar 2.3 Tahap-tahap Evaluasi Model CSE-UCLA.....	31
Gambar 2.3 Model Evaluasi <i>Contentance</i> Stake	31
Gambar 3.1 Proses Analisis Data.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Pedoman Observasi	197
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	198
Lampiran 3	Petikan Hasil Wawancara	199
Lampiran 4	Foto Copy Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	218
Lampiran 5	Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan	220
Lampiran 6	Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan SBI Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.....	222
Lampiran 7	Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 301/C2/D1/2009 Tentang Penetapan Sekolah Dasar sebagai Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSD-BI) Tahun 2008	236
Lampiran 8	Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor M.291.x. Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) RSBI DIKDAS Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2011-2013.....	249
Lampiran 9	Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2000 tentang RSBI Jenjang DIKDASMEN Provinsi Bengkulu	259
Lampiran 10	Surat Pernyataan Kesepakatan DukunganRSBI Hasil Pelatihan SBI Tahun 2009	267
Lampiran 11	Surat Pemberitahuan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 170/58/G11/2009 tentang SDBI	269
Lampiran 12	Surat Bupati Rejang Lebong Nomor 420/551/p.209/2008 tentang Permohonan untuk Mendapatkan Bantuan Subsidi SDBI	270
Lampiran 13	Foto Wawancara dengan Kepala Sekolah	271
Lampiran 14	Profil RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota	272
Lampiran 15	Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Rejang Lebong Nomor 070/548/KBPPM...	304
Lampiran 16	Surat Izin Penelitian dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Kecamatan Curup	305

Lampiran 17	Nomor 138/0148/UPT Disdik Curup/2012	
	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian dari Kepala Sekolah RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Nomo: 421.2/143/PL/SDN02 CENTRE/RSBI/CRP/ 2012	306
Lampiran 18	Surat Izin Penelitian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor 421.3/188/MN/Disdik/2013	307
Lampiran 19	Riwayat Hidup Penulis	308

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berfungsi sebagai peletak dasar dan penunjang pembangunan yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah secara terpadu. Keberhasilan pendidikan bukan saja dapat diketahui dari mutu individu melainkan juga terkait erat dengan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Pendidikan diselenggarakan pula dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, mengembangkan kreativitas peserta didik, dengan memberdayakan semua komponen layanan pendidikan. Oleh karena manusia dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak maka pendidikan juga dituntut untuk cepat tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat serta normatif sesuai kebutuhan masyarakat.

Visi Pendidikan Nasional yaitu “Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang

¹Fasli Jalal, dan Dedi, Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Penerbit Adicita, 2001), h. 98.

selalu berubah.” Visi tersebut lebih menekankan pada pendidikan transformatif yaitu pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju, yang mengantarkan pada masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sangat dominan.²

Adapun misi yang diemban Kemendiknas adalah: Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas komprehensif dan kompetitif, dengan melaksanakan misi pendidikan nasional sebagai berikut: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (3) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (4) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; (5) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

²Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005 - 2009*.

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.³

Kondisi kehidupan global yang semakin kompetitif saat ini dan dalam rangka bangsa Indonesia memiliki kesiapan menghadapi tantangan globalisasi serta mampu memanfaatkan peluang yang datang, menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu memberikan sumbangan terhadap pembangunan bangsa dalam berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini semakin berkembang sejalan dengan kompetisi di tingkat Internasional atau global serta adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang ingin menimba ilmu di luar negeri dengan adanya teknologi negara tersebut yang sudah maju dengan program-program matrikulasi.

Salah satu upaya dalam peningkatan kemampuan dan pengembangan SDM adalah pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Kegiatan atau program SBI adalah penyelenggaraan program pendidikan skala nasional dengan mutu Internasional sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri.

Sesuai pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan visi pendidikan nasional, kemendiknas sebagai institusi pemerintah yang berkewajiban menjalankan sistem pendidikan nasional menetapkan visi pada tahun 2005 yaitu :

³*Ibid.*

Menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif (Insan kamil/Insan paripurna). Yang dimaksud dengan insan Indonesia yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis. Sedangkan yang dimaksud dengan insan yang kompetitif adalah insan yang berkepribadian unggul dan gemar akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan Pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif berorientasi global dan pembelajar sepanjang hayat.⁴

Untuk mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif perlu ditetapkan strategi dan program yang efektif, antara lain dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga pendidikan sebagaimana bunyi salah satu misi pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu :

Meningkatkan ke profesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.” Memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku dan wacana peningkatan kualitas SDM, sekolah sebagai jenjang pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi insan cerdas dan kompetitif sebagai representasi SDM yang bermutu sesuai yang diharapkan pembangunan nasional, maka sekolah harus segera berbenah untuk mempersiapkan pendidikan yang sesuai tuntutan globalisasi.⁵

Ketertinggalan diberbagai bidang di era globalisasi dibandingkan Negara-negara tetangga rupanya menyebabkan pemerintah terdorong untuk memacu diri untuk memiliki standar Internasional. Sektor pendidikan termasuk yang didorong untuk standar Internasional. Dorongan itu bahkan

⁴Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵*Ibid.*

dicantumkan di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) yang berbunyi, “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional.”⁶ Hal ini diulang lagi dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sebagai berikut: “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional.”⁷

Selain alasan-alasan tersebut di atas, penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional juga didasari filosofi eksistensial, yaitu keyakinan bahwa pendidikan harus menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui proses pendidikan yang bermartabat dan pro-perubahan (*kreatif, inovatif, eksperimentatif*), serta menumbuh-kembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penting kiranya pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Kemendiknas memberikan arahan, bimbingan dan pengaturan terhadap

⁶*Ibid.*

⁷PP Nomor 19 Tahun 2005, *tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 61, ayat 1.*

sekolah-sekolah dasar yang telah dan akan merintis sekolah dasar bertaraf Internasional (SD-BI) agar berkembang lebih terarah, terencana dan sistematis.

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimal. Dalam UU SPN Nomor 20 tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pada dasarnya tujuan tersebut di atas menyentuh ranah afektif, kognitif dan psikomotorik. Dengan demikian, pendidikan diarahkan pada peningkatan martabat manusia yang memungkinkan ketiga dimensi kemanusiaan paling mendasar di atas dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan menjadi wahana strategis bagi upaya pengembangan segenap potensi individu, termasuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik.

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka kiranya pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional memberikan suatu arahan, bimbingan dan pengaturan terhadap sekolah-sekolah dasar yang

sudah baik dan maju (*Centre*) menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI), hal ini diharapkan agar pengembangannya lebih terarah, terencana dan sistematis.

Keinginan melakukan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI), Depdiknas menyebutkan; dilatar belakangi oleh tiga alasan yaitu: (1) kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di era global, (2) adanya dasar hukum yang kuat dan (3) landasan filosofi eksistensialisme dan esensialisme (*fungsionalisme*). Era globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk dan meningkatkan mutu produk. Keunggulan manajemen akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Keunggulan SDM merupakan kunci daya saing karena SDM yang akan menentukan siapa yang mampu menjaga kelangsungan hidup, perkembangan dan kemenangan dalam persaingan.

Dengan berbekal keinginan kuat, maka Kemendiknas mengeluarkan program Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) yang nantinya diharapkan menjadi sekolah bertaraf Internasional (SBI) untuk mencetak siswa-siswa yang cerdas. Visi RSDBI adalah terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif secara Internasional. Visi tersebut memiliki implikasi bahwa penyiapan manusia bertaraf Internasional memerlukan upaya-upaya yang dilakukan secara intensif dan terarah.

Rencana pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan sudah sepatutnya didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Direktorat pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar bersama dengan kemendiknas Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan awal (rintisan) terhadap suatu sekolah yang potensial menuju sekolah dasar bertaraf Internasional. Dalam kurun pembinaan tersebut, sekolah ditetapkan sebagai penyelenggara Rintisan SDBI. Apa bila telah memenuhi sebagai SDBI secara penuh, maka sekolah tersebut ditetapkan sebagai SBI.

Pengembangan program Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) di Indonesia menggunakan landasan hukum sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berbunyi: (1) Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang. 2) Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional. 3) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4) Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 5) Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6) Peraturan Pemerinta (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. 8) Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan. 9) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 tahun 2007 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006. 10) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. 11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Guru. 13) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 14) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

Sasaran program Rintisan SD-BI adalah Sekolah Dasar dengan kriteria sebagai berikut: 1) Sekolah Dasar (SD) negeri atau swasta. 2) Sekolah Standar Nasional (SSN) atau Sekolah Kategori Mandiri. 3) Memiliki jumlah SDM yang memadai dan potensial untuk dikembangkan. 4) terakreditasi dengan kategori 'A'. 5) Tersedia tenaga pengajar yang mampu mengajar dalam bahasa Inggris untuk mata pelajaran Matematika dan Sains. 6) Tersedia sarana prasarana minimal, sesuai dengan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 untuk menunjang proses pembelajaran yang bermutu. 7)

Tersedia dana untuk membiayai pengembangan program Rintisan SD-BI. 8)
Tersedia lahan terbuka yang memadai untuk pengembangan fasilitas sarana prasarana sesuai tuntutan kebutuhan SD-BI.

Program implementasi Sistem Manajemen Mutu dalam kerangka kebijakan SBI tersebut pada dasarnya guna menjawab upaya pencapaian mutu pendidikan yang dimaksud. Namun demikian, menurut pengamatan empiris penulis, dalam implementasi persyaratan-persyaratan yang termaktub pada sistem manajemen mutu, umumnya manajemen lembaga pendidikan (sekolah) dalam hal memahami persyaratan mutu tersebut lebih mengutamakan memahami maksud persyaratan mutu daripada apa yang disyaratkan untuk mutu. Apa yang disyaratkan mutu lebih urgen dalam proses mutu karena dari persepsi inilah muncul indikator-indikator mutu. Dengan demikian, jika pencapaian mutu kurang, maka langkah yang jelas dan cepat dilakukan perbaikan. Sedangkan pemahaman tentang maksud persyaratan mutu, manajemen pendidikan hanya baru mendeskripsikan dokumen-dokumen mutu dari penjabaran klausal-klausal.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Edward Sallis memandang pentingnya evaluasi dalam implementasi sistem manajemen mutu pada suatu organisasi. Sallis mengemukakan, bahwa: "Sistem mutu selalu membutuhkan rangkaian umpan balik... evaluasi adalah elemen kunci

dalam perencanaan strategis.”⁸ Berdasarkan pandangan ini, implementasi sistem manajemen apapun yang terkait dengan pengelolaan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan harus dikaji (*review*) untuk mengetahui efektivitasnya. Tanpa pengkajian dan penelitian, sulit diketahui apakah sistem manajemen mutu itu berjalan sebagaimana mestinya atau tidak.

Dalam perjalanannya kebijakan RSDBI mulai terlihat beberapa kelemahan, baik secara konseptual maupun sistem pembelajarannya. Penetapan RSDBI harus sesuai dengan ketentuan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Namun dalam perjalanan dan kenyataannya masih ada kritikan dan opini negative terhadap program RSDBI. Satria Dharma mengatakan;

Penetapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan beberapa bidang studi menimbulkan banyak masalah dan kontroversi. Penggunaan kata atau istilah ‘bertaraf internasional’ akhirnya menimbulkan banyak program-program yang dipaksakan agar dapat memenuhi kriteria ‘bertaraf internasional’ tersebut. Istilah ‘bertaraf internasional’ sering dimaknakan tentang kemampuan menggunakan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD yang juga menyesatkan, sementara sekolah hebat di luar negeri masih menggunakan kapur tulis. Masyarakat menganggap RSDBI hanya untuk orang yang memiliki kecerdasan lebih dan kemampuan ekonomi yang tinggi. Program RSBI juga menciptakan kesenjangan sosial pada siswa, terkesan eksklusif dan menimbulkan kastamisasi.⁹

⁸Edwar Sallis, *Manajemen System Analysis and Application*. New York: Holt Saunders Internastional Edition, 2008), h. 236.

⁹Satria Dharma, *Seminar Nasional SBI dengan Tema “Revitalisasi SBI dalam rangka Meningkatkan Mutu dan Daya Saing Bangsa”*, Grand Zuri Cikarang Bekasi: Balitbang Kemdiknas tanggal 29-31 Oktober 2010.

Pemerhati pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, Musa mengatakan; Program RSDBI telah memberi legitimasi kepada sekolah untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru oleh pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat secara gratis dan juga bermutu. Kemudian RSBI terlalu mengagung-agungkan kurikulum Negara asing; *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, seolah bangsa kita tidak percaya diri dan belum mampu membuat kurikulum sendiri.¹⁰

Slamet mengatakan; Program SBI sudah salah arah (*Mission Impossible*), awalnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional lalu berubah arah menjadi program prestisius yang menyedot anggaran ratusan miliar, tiap Direktorat di Kemdikbud membuat rumusannya sendiri-sendiri dan tak ada kata sepakat seperti apa sebenarnya SBI itu. RSBI hanya memiliki landasan hukum tetapi tidak ada landasan akademiknya.¹¹

Safewi menyebutkan; Program RSBI hanya menekankan pada aspek akademik dengan menafikan segala yang non akademik. Semua keunggulan yang hendak dicapai oleh program RSBI ini adalah keunggulan akademik semata. Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa seseorang yang cerdas akademik, tak ada dibicarakan tentang keunggulan dibidang

¹⁰ Musa, (Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kab. RL), *Loka Karya Pendidikan di Kabupaten RL, dengan Tema 'Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan'*, Curup: Kemendiknas RL, tanggal 12 Mei 2012.

¹¹ Slamet, (Dosen UNY), *Simposium SBI*, Jakarta: Hotel Atlit Century, tanggal 9 Maret 2011.

Seni, Budaya dan Olahraga, sementara aspek non akademik sangat dibutuhkan oleh peserta didik.¹²

Masih banyak lagi pendapat, kritikan, dan opini masyarakat tentang RSDBI, namun tidak semua masyarakat berpendapat demikian, ada pula masyarakat yang menyambut baik serta memuji program tersebut, antusias sekali memasukkan anaknya ke RSDBI.

Tarmizi menyebutkan; Ada beberapa sekolah yang dikelola dengan baik, memungut biaya dengan masyarakat ternyata berjalan lancar, peserta didiknya memiliki mutu yang tinggi, orang tua menjadi puas. Memang ada kalimat meskipun kurang lazim; “Ingin maju atau sukses harus dengan biaya”, lihat saja sekolah Al-Azhar di Jakarta, atau sekolah Ikhsan Cita, Pondok Modern Gontor, dan banyak lagi sekolah yang lainnya, walau biayanya mahal namun tetap saja jadi rebutan, karena hasilnya memang mengembirakan. Hanya memang jika sekolah yang dikelola pemerintah memungut biaya dengan masyarakat ini menjadi pertanyaan, karena menentang amanat undang-undang.¹³

Kemudian Iskandar mengatakan; Program RSDBI patut disambut baik dan diacung jempol, mengingat banyak perubahan yang terjadi, baik segi penataan dan luas lahan yang dimiliki, penataan gedung, kelengkapan alat belajar, kebersihan, kesejukan dan keindahan ruang belajar, keseriusan guru dalam mengajar, prestasi siswa, semangat belajar peserta didik, rasa aman orang tua karena anak diawasi dibimbing lebih dari siswa regular lainnya, tata krama dan sopan santun anak meningkat.¹⁴

¹² Safewi (Kadiknas RL), *Seminar Pendidikan tentang RSBI*, Curup, 20 Juni 2012.

¹³ Tarmizi, Tokoh Masyarakat Rejang Lebong.

¹⁴ Iskandar, Ketua Dewan Pendidikan Rejang Lebong, *Seminar Pendidikan dengan Tema Meningkatkan Mutu Pendidikan di Rejang Lebong*, Tanggal 24 Mei 2012.

Mengingat adanya berbagai pendapat, kritikan dan opini serta adanya kelemahan yang ada pada program RSDBI tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Evaluasi Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) di SD Negeri 2 Centre Curup Kota.”

Dalam pengamatan penulis di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pengembangan kelembagaan, lingkungan dan peran serta masyarakat, kurikulum, sarana dan prasarana, keterbatasan keuangan dan pembiayaan.

Studi kasus akan mengambil SD Negeri 2 Centre Curup Kota didasarkan pada pertimbangan bahwa SD tersebut merupakan sekolah dasar pertama melaksanakan RSDBI di kota Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sejak tahun 2009. Selain itu pemilihan lokasi, khususnya SD Negeri 2 Centre Curup Kota merupakan barometer bagi mutu pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong dengan indikator adanya sumber daya pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Sedangkan alasan pemilihan SD Negeri 2 Centre Curup Kota adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan baik tingkat daerah maupun pusat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi focus

penelitiannya adalah “Evaluasi Implementasi Kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota”. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah:

1. Kebijakan pengembangan kelembagaan.
2. Kebijakan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran.
3. Kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat.
4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana.
5. Kebijakan pembiayaan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah di atas, maka rumusan umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota”. Adapun rumusan masalah khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Kelembagaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup kota ?
3. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat oleh RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota ?

4. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan Sarana-Prasarana Pendidikan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota ?
5. Bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dalam menuju sekolah dasar bertaraf Internasional ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian evaluasi implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota diharapkan berguna bagi beberapa pihak :

1. Bupati Kepala Dearah Kabupaten Rejang Lebong sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan tentang RSDBI.
2. Kepala Dinas Kementrerian Pendidikan Nasional Kabupaten Rejang Lebong sebagai bahan pertimbangan penyelenggaraan RSDBI.
3. Kepala Sekolah untuk bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai program dan peningkatan kualitas penyelenggaraan RSDBI.
4. Komite Sekolah sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan dalam menyusun program kerja Komite Sekolah.
5. Dewan Pengembang sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam upaya mengembangkan RSDBI.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Nugroho evaluasi merupakan bentuk pengawasan terhadap suatu kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai, dengan melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang kemudian akan dicari cara untuk bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut.¹⁵

Menurut Hamid Darmadi evaluasi adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah pembuatan keputusan sehubungan dengan kebaikan atau keunggulan relatif dari dua tindakan pilihan atau lebih sehingga keputusan yang diambil betul-betul melalui pertimbangan secara cermat hati-hati dan baik.¹⁶

Menurut Subarsono evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.¹⁷ Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Untuk dapat

¹⁵ Nugroho D. Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hh. 471-472.

¹⁶ Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandug: Alfabeta, 2011), h. 6.

¹⁷ Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Mutiara, 2005), h. 63.

mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya, 5 (lima) tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka *outcome* dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan bersangkutan.

Menurut Subarsono yang dimaksud dengan *input* adalah bahan baku (*raw materials*) yang digunakan sebagai masukan dalam sistem kebijakan. Input dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, tuntutan-tuntutan dan dukungan masyarakat.¹⁸

Sistem politik melalui para aktornya melakukan proses konversi dari *input* menjadi *output*. Selama proses konversi ini terjadi *bargaining* dan *negosiasi* antar para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang masing-masing memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dan atau bisa sama. *Output* yang merupakan hasil dari konversi sebetulnya merupakan *resultante* dari tarik menarik antar kepentingan para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dalam pandangan teori kelompok (*group model*), sebuah kebijakan akan lebih banyak berisi preferensi kelompok yang

¹⁸ Subarsono, *op.cit.*, hh. 121-122.

kuat dan menjauh dari keinginan kelompok yang lemah.¹⁹

Output adalah keluaran dari sebuah kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program. Sebagai contoh, *output* dari kebijakan subsidi RSDBI adalah adanya kebijakan yang mengatur penyelenggaraan subsidi RSDBI.

Outcome adalah hasil suatu kebijakan dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikannya suatu kebijakan. Contoh: *outcome* dari kebijakan subsidi RSDBI adalah tersedianya sarana prasarana pendidikan yang memadai *Impact* (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijakan yang diimplementasikan. Contoh: *impact* dari kebijakan subsidi RSDBI adalah berkembangnya sekolah dasar yang potensial menjadi sekolah dasar bertaraf Internasional (SDBI).

Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program. Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argumen perlunya evaluasi :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya;
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal;

¹⁹ Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, (New Jersey : Prentice-Hall, 2000), h. 118.

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah;
4. Menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program;
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.²⁰

Ada tiga jenis pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. *Pertama*, evaluasi semu bertujuan untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan, di mana ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial. *Kedua*, evaluasi formal bertujuan untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Dalam evaluasi ini tujuan dan sasaran pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Dan *ketiga*, evaluasi keputusan teoritis yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku yang diumumkan secara formal

²⁰ Subarsono, *op.cit.*, hh. 123-124.

ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.²¹

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn dalam Subarsono²² mencakup lima indikator seperti diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Indikator atau Kriteria Evaluasi Kebijakan

No.	Kriteria	Penjelasan
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Kecukupan	Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah?
3	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda?
4	Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka?
5	Ketepatan	Apakah hasil yang dicapai bermanfaat?

Dalam ilmu evaluasi, ada banyak model yang bisa digunakan untuk mengevaluasi suatu program. Meskipun antara satu dengan lainnya berbeda, namun maksudnya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau

²¹ Nugroho, *op. cit.*, hh. 474-475.

²² Subarsono, *op. cit.*, h. 126.

informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi, yang tujuannya menyediakan bahan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut suatu program. Model-model evaluasi ada yang dikategorikan berdasarkan ahli yang menemukan dan yang mengembangkannya, serta ada juga yang diberi sebutan sesuai dengan sifat kerjanya. Dalam hal ini Stephen Isaac dalam Fernandes mengatakan bahwa model-model tersebut diberi nama sesuai dengan focus atau penekanannya. Lebih jauh Isaac membedakan adanya empat hal yang digunakan untuk membedakan ragam model evaluasi, yaitu (1) berorientasi pada tujuan program – *good oriented*, (2) berorientasi pada keputusan – *decision oriented*, (3) berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya – *transactional oriented*, dan (4) berorientasi pada pengaruh dan dampak program – *research oriented*.²³

Ada beberapa ahli evaluasi program yang dikenal sebagai penemu model evaluasi program adalah Stufflebeam, Metfessel, Michael Scriven, Stake, dan Glaser. Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu :

1. *Goal Oriented Evaluation Model*, dikembangkan oleh Tyler.
2. *Goal Free Evaluation Model*, dikembangkan oleh Scriven.
3. *Formatif Summatif Evalation Model*, dikembangkan oleh Michael.
4. *Contentance Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.
5. *Responsive Evaluation Model*, dikembangkan oleh Stake.

²³ Suharsimi Arikunto, *Evaluasi Program Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 40.

6. *CSE-UCLA Evaluation Model*, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.
7. *CIPP Evaluation Model*, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.
8. *Discrepancy Model*, yang dikembangkan oleh Provus.²⁴

1. Goal Oriented Evaluation Model

Goal Oriented Evaluation Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, melihat seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.

2. Goal Free Evaluation Model

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Scriven ini dapat dikatakan berlawanan dengan model pertama yang dikembangkan oleh Tyler. Jika dalam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana tujuan tersebut sudah dapat dicapai, dalam model *Goal Free Evaluation* (evaluasi lepas dari tujuan) justru menoleh dari tujuan. Menurut Michael Scriven,

²⁴ Daniel Stufflebeam, *Evaluation Model View Points on Educational and Human Services The Evaluation*, (New York: Publisher, 2002), h. 27.

dalam melaksanakan evaluasi program evaluator tidak perlu memerhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negative (yang sebetulnya memang tidak diharapkan).

Alasan mengapa tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan seberapa jauh masing-masing penampilan tersebut.

Dari uraian ini jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “evaluasi lepas dari tujuan” dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan, tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci per komponen.

3. *Formatif Sumatif Evaluation Model*

Selain model “evaluative lepas dari tujuan”, Michael Scriven juga mengembangkan model lain, yaitu model formatif-Sumatif. Model ini menunjukkan adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut

evaluasi sumatif).

Berbeda dengan model yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi *summative*. Dengan demikian, model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang “apa, kapan, dan tujuan” evaluasi tersebut dilaksanakan.

Para evaluator pendidikan, termasuk guru-guru yang mempunyai tugas evaluasi, tentu sudah mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif dalam bentuk ulangan harian. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sampai seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok bahasan setiap mata pelajaran tidak sama, maka tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan evaluasi formatif dilaksanakan dan berapa kali untuk masing-masing mata pelajaran.

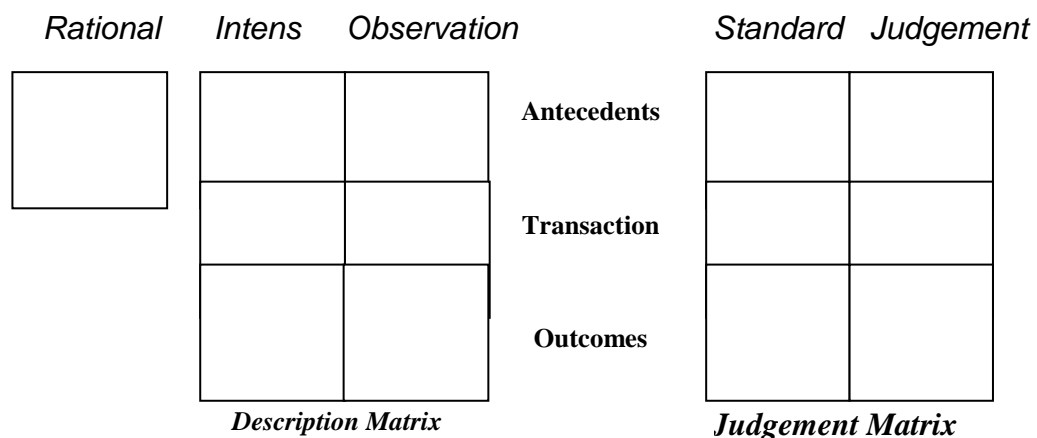
Evaluasi formatif secara prinsip merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran

pencapaian tujuan program.

Dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Mengingat bahwa objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif maka lingkup sasaran yang dievaluasi juga berbeda. Pembicaraan tentang hal ini secara luas dan mendalam akan dikaji di bagian selanjutnya.

4. *Contentance Evaluation Model*

Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Fernandes, model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) Deskripsi (*Description*) dan (2) Perimbangan (*Judgments*); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) Antecedens (*antecedents/context*), (2) Transaksi (*transaction/proses*), dan (3) Keluaran (*output-outcomes*). Oleh Stake, model evaluasi yang diajukan dalam bentuk diagram, menggunakan deskripsi dan tahap seperti berikut :



Gambar 2.1 Evaluasi model Stake²⁵

Keseluruhan Model dasar *Countenance Stake* terdiri atas 4 kotak *antecedents* (intent, observasi, standar dan pertimbangan), 4 kotak transaksi, dan 4 kotak hasil. Untuk menggunakan model *Countenance Stake* maka perlu diketahui juga dua konsep lagi yaitu *contingency* dan *congruence*.

Contingency terdiri atas *contingency* logis dan *contingency* empirik. *Contingency* logis adalah hasil pertimbangan evaluator terhadap keterkaitan atau keselarasan logis antara kotak *antecedents* dengan transaksi dan hasil. Evaluator juga memberikan pertimbangan keterkaitan empirik, berdasarkan data lapangan, antara *antecedent*, *transaksi*, dan hasil mengenai *congruence* atau perbedaan yang terjadi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang terjadi di lapangan. Cara kerja model evaluasi Stake ini adalah sebagai berikut: evaluator mengumpulkan data mengenai apa yang diinginkan pengembangan program baik yang berhubungan dengan kondisi awal (*antecedents*), transaksi, dan juga hasil data dapat dikumpulkan melalui studi dokumen tetapi dapat pula dilakukan dengan jalan wawancara.

Analisis pertama digunakan didalam memberikan pertimbangan mengenai keterhubungan antara persyaratan awal, transaksi, dan hasil dari kotak-kotak tujuan (*intents*). Analisis kedua adalah analisis empirik, dasar bekerjanya adalah sama dengan analisis logis tapi data yang digunakan

²⁵ *Ibid.*, h. 43.

adalah data empirik. Jadi dalam analisis ini evaluator harus mempertimbangkan keterhubungan tersebut berdasarkan data empirik yang telah dikumpulkannya. Tugas evaluator berikutnya adalah memberikan pertimbangan mengenai program yang sedang dikaji.²⁶ Mengajukan agar evaluator jangan mengevaluasi kurikulum secara mikroskop tapi harus dengan “*apanoramic view finder*”. Adanya beragam standar memberikan kesempatan kepada evaluator untuk menggunakan standar tersebut dengan teropong panorama dan bukan teropong mikroskop.

Tiga hal yang dituliskan diantara dua diagram, menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) *Anteseden* – yang diartikan sebagai konteks, (2) Transaksi yang diartikan sebagai proses, dan (3) *Outcomes* yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya, kedua matriks yang digambarkan sebagai *deskripsi* dan *pertimbangan*, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi.

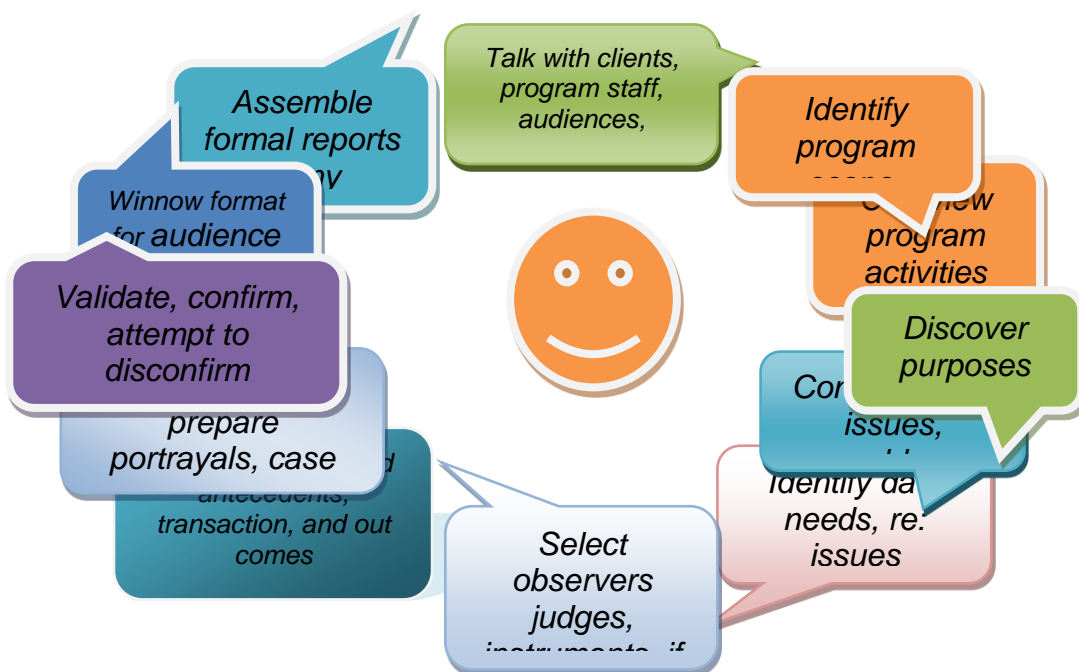
Matriks pertama, yaitu *deskripsi*, berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa *maksud/tujuan* yang diharapkan oleh program, dan *pengamatan/akibat*, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya evaluator mengikuti matriks kedua, yang menunjukkan langkah *pertimbangan*, yang dalam langkah tersebut mengacu pada *standar*.

²⁶ *Ibid.*, h. 58.

Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama.
2. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Bertitik tolak dari penjelasan Fernandes terhadap objek dan cara kerja model tertentu, penulis memberikan nama pada model yang dikemukakan oleh Stake ini dengan nama bahasa Indonesia, yaitu model *deskripsi-pertimbangan*. Adapun contoh dari langkah-langkah model Stake adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Contoh langkah-langkah model Stake²⁷

Keterangan :

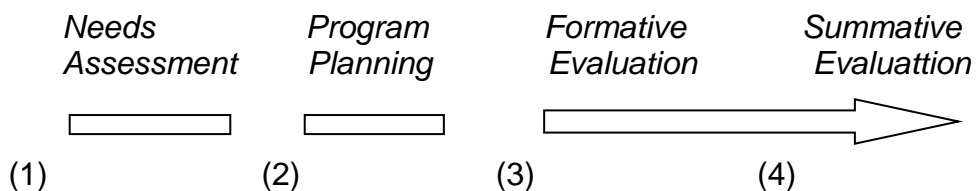
1. Membicarakan dengan klien, staf program dan audien.
2. Mengidentifikasi ruang lingkup program.
3. Menerangkan kegiatan-kegiatan dalam program.
4. Merumuskan tujuan-tujuan yang terperinci.
5. Menginventarisir berbagai permasalahan dan isu-isu.
6. Mengidentifikasi berbagai kebutuhan data dan isu-isu yang terbaru.
7. Menyeleksi berbagai instrument untuk observasi, pertimbangan/criteria dan sebagainya.
8. Mendesain untuk *infut/content*, proses dan *out put*.
9. Mempersiapkan gambaran tema-tema, studi kasus.
10. Validasi, konfirmasi temuan-temuan data.
11. Menyaring format untuk digunakan oleh audien.
12. Mengumpulkan berbagai laporan-laporan yang bersifat format.

5. CSE-UCLA Evaluation Model

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari *Center for Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri-ciri

²⁷ Daniel Stufflebeam, *Evaluation Model View Points on Educational and Human Services The Evaluation*, (New York: Publisher, 2002), h. 112.

model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak. Fernandes memberikan penjelasan tentang model CSE-UCLA menjadi empat tahap, yaitu (1) *needs assessment*, (2) *program planning*, (3) *formative evaluation*, dan (4) *summative evaluation*.



Gambar 2.3 Tahap-tahap Evaluasi Model CSE-UCLA²⁸

Keterangan :

1. CSE Model: *Needs Assessment*

- a. Dalam tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penemuan masalah keberadaan program.
- b. Kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program ini ?
- c. Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini ?

2. CSE Model: *Program Planning*

Dalam tahap kedua dari CSE model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada

²⁸ *Ibdi.*, h. 44.

pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap kesatu. Dalam tahap perencanaan ini program PBM dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan.

3. CSE Model: *Formative Evaluation*

Dalam tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dari pengembang program.

4. CSE Model: *Summative Evaluation*

Dalam tahap keempat, yaitu evaluasi sumatif, para evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum dari bagian mana yang belum dan apa penyebabnya.

6. ***CIPP Evaluation Model***

Model evaluasi ini merupakan model yang paling banyak dikenal dan ditetapkan oleh para evaluator. Oleh karena itu, uraian yang diberikan relative panjang dibandingkan dengan model-model lainnya. Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk., di *Ochio State University*. CIPP yang

merupakan sebuah singkatan dari hurup awal empat buah kata, yaitu :

Context evaluation : evaluasi terhadap konteks

Input evaluation : evaluasi terhadap masukan

Proses evaluation : evaluasi terhadap proses

Product evaluation : evaluasi terhadap hasil.²⁹

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dengan demikian, jika tim evaluator sudah menentukan model CIPP sebagai model yang akan digunakan untuk mengevaluasi program yang ditugaskan maka mau tidak mau mereka harus menganalisis program tersebut berdasarkan komponen-komponennya.

B. Konsep Kebijakan dan Kebijakan RSDBI

1. Konsep Kebijakan

Banyak ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang kebijakan public (*public policy*). Dalam kenyataannya, kebijakan sering kali diartikan dengan peristilahan lain seperti tujuan (*goal*), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Menurut Winarno secara umum istilah

²⁹ *Ibid.*, h. 45.

kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang pejabat, suatu kelompok, suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.³⁰

Sedangkan Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*policy as a projected program of goals, values, and practices*).³¹

Eulau dan Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Charles O. Jones, menyatakan bahwa kebijakan ialah “*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it.*”³²

Pengertian kebijakan publik (*public policy*) seperti yang dikutipkan di atas kiranya dapat dipergunakan sebagai dasar pemahaman dari public policy. Tetapi sehubungan dengan pernyataan Eulau dan Prewitt di atas, bahwa kebijakan dilakukan baik oleh pemerintah maupun yang melaksanakan dengan menekankan adanya perilaku yang konsisten dan berulang. Tidak demikian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang meragukan hal semacam itu.

³⁰ Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 18.

³¹ dalam Nugroho, D., Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. EleX Media Komputindo, 2008), h. 53.

³² Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008), Cet ke-6, h. 3.

Menurut Dye pemerintah acapkali melakukan hal-hal yang tidak konsisten dan tidak berulang :

*Now certainly it would be a wonderful thing if government activities were characterized by “consistency and repetitiveness” but it is doubtful that we would ever find “public policy” in government if we insist on these criteria. Much of what government does is inconsistent and nonrepetitive.*³³ (Sekarang tentu itu akan menjadi hal yang indah jika kegiatan pemerintah yang ditandai dengan "konsistensi dan repetitiveness" tetapi diragukan bahwa kita akan pernah menemukan "kebijakan publik" dalam pemerintahan jika kita bersikeras kriteria tersebut. Banyak dari apa yang dilakukan pemerintah tidak konsisten dan nonrepetitive).

Berkaitan dengan itu, Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*).³⁴ Sejalan dengan pendapat Dye, David Easton merumuskan kebijakan publik sebagai *“the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that the only the government can authoritatively act on the “whole” society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values.*³⁵ Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky yang menyebutkan kebijakan publik sebagai *“what government say do and do not do.”*³⁶ (apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah atau yang tidak dilakukannya).

³³ Thoha, Miftah, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 107.

³⁴ Dye, Thomas R., *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Prentice-Hall, 2001). h. 1.

³⁵ Thoha, *op. cit.*, h. 107.

³⁶ Edwards, George C. III, dan Sharkansky, Ira., *The Policy Predicament*, (W.H Freeman: San Fransisco, 2000), h. 9.

Dye juga mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*).³⁷ Seiring dengan pendapat tersebut, Kartasasmita dalam Widodo menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh Pemerintah mengenai suatu masalah; (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya; (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.³⁸

Dunn mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issues areas*), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik di antara kelompok dan tahapan kebijakan. Untuk itu komponen kebijakan yang dikemukakan meliputi niat (*intention*); tujuan (*goals*); rencana atau usulan (*plans or proposal*); program; keputusan atau pilihan (*decisions or*

³⁷ Dye, *op. cit.*, h. 2.

³⁸ Widodo, Joko, *Good Governance: Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, (Surabaya, Penerbit Insan Cendikia, 2001), h.189.

choices); dan pengaruh (*effects*).³⁹

Dari definisi dan pengertian kebijakan publik di atas mengandung pemahaman bahwa kebijakan untuk melakukan sesuatu harus mencerminkan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Ketika pemerintah memutuskan memilih untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, maka alasan dan tujuannya harus jelas.

Disamping sejalan dengan pendapat Dye, rumusan kebijakan publik menurut David Easton adalah bahwa "*the authoritative allocation of value for the whole society-but it turns out that the only the government can authoritatively act on the "whole" society, ...*"⁴⁰ yang dapat diartikan bahwa pemerintah mempunyai otoritas (wewenang) untuk mengatur perilaku masyarakat dengan cara mengalokasikan nilai-nilai kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian pemerintah berwenang dapat memaksakan agar nilai-nilai yang tercermin dalam kebijakan supaya ditaati oleh masyarakat dan jika terjadi pelanggaran maka pemerintah dapat memberikan sanksi. Berkaitan dengan rumusan tersebut, Udoji mengartikan kebijakan publik sebagai "*an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affects society at large*" (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu

³⁹ Dunn, William N., *Public Policy Analysis: An Introduction*, (Prentice-Hall Inc.,: New York, 2000), hh. 63-65.

⁴⁰ Thoha, *op. cit.*, h. 107.

yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).⁴¹

Menurut Parker kebijakan publik diartikan sebagai suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis.⁴²

Sementara itu, William Jenkins mengartikan kebijakan publik sebagai *“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situations where those decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve.”*⁴³ (Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Seiring dengan itu, Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai *“a relative stable, purposive course of action followed by an actor*

⁴¹ Wahab, *op. cit.*, h. 5.

⁴² Parker, R.S., *Policy and Administration, dalam Public Policy and Administration in Australia: A Reader.* (ed. R.N. Spann and G.R. Cunon). John Wiley and Sons Australia (Pty.LTD.: Sydney, 1999), h.144.

⁴³ Jenkins, W.I., *Policy Analysis*, (Oxford: Martin Robertson, 2000), h.15.

*or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*⁴⁴

(Kebijakan publik sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi).

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, ciri penting yang dapat dilihat dalam suatu kebijakan publik adalah bahwa kebijakan dirumuskan oleh sekelompok aktor yang memiliki kewenangan dalam sistem politik tertentu. Pengambilan kebijakan dilakukan sepanjang masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik: (1) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan; (2) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait; (3) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu; (4) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; (5) Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan

⁴⁴ Anderson, James E., *Public Policy Making*, (Boston: Houghton Mifflin, 2000), h. 4.

pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa (*otoratif*).

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain.

1) Implementasi Kebijakan

Wahab menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yakni menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fase implementasi kebijakan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah proses kebijakan, hal tersebut dikarenakan pada fase ini dapat diketahui sejauh mana sebuah kebijakan tersebut secara teknis dapat terimplementasikan.⁴⁵

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Udoji

⁴⁵ Wahab, *op. cit.*, h. 59.

bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented.”*⁴⁶ (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan dengan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Dalam studi implementasi menurut Dunsire terdapat istilah *implementation gap* yakni suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Hal ini selanjutnya dijelaskan oleh William bahwa besar kecilnya perbedaan tersebut akan tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau sekelompok organisasi/actor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. *Implementation capacity* adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan

⁴⁶Joel, Spring, *Education and the Rise of Global Economy*. Mahawah, (NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999), h. 32.

dapat dicapai.

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hoogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ke dalam dua kategori yaitu *non implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau berkerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi. Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi peristiwa penggantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pelaksanaannya jelek (*bad execution*), kebijakannya sendiri jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu memang

bernasib jelek (*bad luck*).⁴⁷

Berkaitan dengan studi implementasi, terdapat kesepakatan dari beberapa ahli, bahwa analisis implementasi menguji sampai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan bagaimana dampaknya, baik dampak yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi jika setelah undang-undang atau aturan-aturan ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

2) Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi secara singkat menurut Kamus Webster dirumuskan bahwa: "*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out*; (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to*" (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jika rumusan tersebut digunakan sebagai acuan, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

⁴⁷ Wahab, *op. cit.*, h. 61.

Selanjutnya Meter dan Horn merumuskan proses implementasi ini sebagai *“Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.”*⁴⁸ (Implementasi kebijakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya).

Sedangkan Mazmanian dan Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.”⁴⁹

Lebih lanjut Mazmanian dan Sabatier dengan lebih rinci menyatakan bahwa :

Implementation is carrying out of basic policy decision, usually incorporated in statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies

⁴⁸ Meter, Donal, Van dan Horn, Carl E. Van, *“The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework”* 2001), dalam *Administration dan Society*, Vol.6. h. 447.

⁴⁹ Wahab, *o.p. cit.*, h. 65.

*the problem (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impact-both intended and unintended-of those outputs, the perceived impact of agencies decisions, and finally, important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.*⁵⁰

(Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap Undang-Undang/peraturan yang bersangkutan).

Menurut Dunn implementasi kebijakan (*policy implementation*) pada dasarnya merupakan kegiatan praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*, hh. 68-69.

⁵¹ Dunn, *op. cit.*, h. 80.

3) Model Implementasi Kebijakan

Memperhatikan beberapa pengertian implementasi yang telah dijelaskan di atas, maka kajian implementasi merupakan suatu proses mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut. Untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung maka dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan.

Beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah Model implementasi yang dikembangkan Meter dan Horn yang disebut dengan "*a Model of The Policy Implementation Process (Model Proses Implementasi Kebijakan).*" Memandang implementasi kebijakan sebagai "*those actions by public or provide individual-individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision.*"⁵² (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Dalam model implementasi ini, Meter dan Horn beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba

⁵² Wahab, *op. cit.*, hh.78-79.

untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*). Bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Meter dan Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijakan menurut :

- 1) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan,
- 2) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya pandangan tersebut ialah bahwa proses implementasi akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relative sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Meter dan Horn mengatakan bahwa hubungan antara kebijakan dan prestasi kerja didasarkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik

diantara para agen implementasi; (2) sumber-sumber kebijakan, implementasi kebijakan perlu dukungan sumber-sumber kebijakan baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber non manusia (*non human resources*); (3) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, mencakup struktur, birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan; (4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, implementasi sebuah kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan kebijakan tersebut; (5) sikap para pelaksana, mencakup tiga hal yang penting, yakni: (a) respon pelaksana terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan (c) intensitas sikap pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana; (6) lingkungan ekonomi sosial dan politik, Variabel ini meliputi sumber daya lingkungan ekonomi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Model implementasi berikutnya adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier yang

mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan :

Implementation is carrying out of basic policy decision, usually incorporated in statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. Ideally, that decision identifies the problem (s) to be addressed, stipulates the objective (s) to be pursued, and, in a variety of ways, "structures" the implementation process." (deLeon & deLeon).⁵³ (Implementasi adalah melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang, tetapi juga dapat mengambil bentuk perintah eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan yang mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang akan dikejar, dan, dalam berbagai cara, "struktur" proses implementasi).

Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model *A Framework for Implementation Analysis (Kerangka Analisis Implementasi)*. Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu :

- 1) Mudah-tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;

Pada implementasi kebijakan pemerintah (negara), sebenarnya ada sejumlah masalah-masalah sosial yang jauh mudah untuk ditangani bila dibandingkan dengan masalah lainnya. Sebagai contoh, mengatur para penghuni rumah susun di suatu kawasan

⁵³ Nugroho. *op. cit.*, h. 440.

kota tertentu agar menjaga kebersihan lingkungannya, tentu jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan upaya untuk mendisiplinkan pegawai negeri sipil di seluruh jajaran departemen melalui pengawasan melekat di Indonesia. Pada kasus yang pertama, berbeda dari kasus yang kedua, karena pada kasus yang pertama perilaku yang diatur tidak terlalu bervariasi dan hanya melibatkan sekelompok kecil penduduk kota, dan lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki dari kelompok sasaran relatif kecil.

- 2) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi; Pada prinsipnya setiap kebijakan pemerintah (undang-undang, perintah eksekutif, peraturan pemerintah) dapat menstrukturkan proses implementasinya, dengan cara menjabarkan tujuan-tujuan formal yang akan dicapainya, menseleksi lembaga-lembaga yang tepat untuk mengimplementasikannya, memberi kewenangan dan dukungan sumber-sumber finansial pada lembaga tersebut. Dengan demikian, nampak jelas para pembuat kebijakan sebenarnya dapat memainkan peran yang cukup berarti dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan, dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan implementasi secara tepat.

- 3) Variabel-variabel di luar Undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

Meskipun Undang-undang lah yang menetapkan struktur dasar hukum sebagai landasan implementasi, namun implementasi itu sendiri mempunyai dinamika yang didorong oleh sekurang-kurangnya dua proses penting yakni kebutuhan untuk mengubah perilaku individu atau badan pelaksana, dan dampak perubahan keadaan sosio-ekonomis dan teknologi pada diri mereka yang menjadi pendukung-pendukung tujuan kebijakan.

Model implementasi lainnya adalah model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards III. Pendekatan yang digunakan oleh Edwards III dalam studi implementasi kebijakannya diawali dengan abstraksi dan beberapa pertanyaan, yakni: apakah syarat yang diperlukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan?, hambatan-hambatan utama apakah yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan? Sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka berdasarkan hasil studi yang dilakukannya dikemukakan bahwa terdapat empat faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Keempat faktor atau variabel tersebut adalah: a) Komunikasi; b) Sumber daya; c) Disposisi (sikap); d) Struktur Birokrasi.

- a) Faktor Komunikasi (*communication*)

Faktor komunikasi memegang peranan penting dalam proses implementasi, utamanya pada kebijakan yang melibatkan banyak organisasi atau aktor (agen pelaksana). Dengan demikian faktor yang perlu diperhatikan pada aspek komunikasi adalah faktor pemindahan (*transmission*); kejelasan tujuan (*clarity*); dan konsistensi (*consistency*). Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor (badan pelaksana) mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran;

b) Faktor Sumber Daya (*resources*)

Walaupun isi kebijakan telah ditetapkan demikian baik, tetapi apabila implementor (badan pelaksana) kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor; sumberdaya finansial; informasi; kewenangan, dan fasilitas atau sarana prasarana.

Dengan demikian, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja;

c) Faktor Disposisi atau Sikap (*Disposition or Attitudes*)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor-implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif sesudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedures* (SOP)). SOP ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.⁵⁴ Fragmentasi

⁵⁴ Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet., III, hh. 90-92.

organisasi juga menjadi aspek lain dalam struktur birokrasi. Fragmentasi menimbulkan pembentukan banyak badan pelaksana dengan tanggung jawab yang sempit, yang akan mendorong terjadinya pertentangan birokrasi dan kurangnya kerjasama.⁵⁵

4) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pendekatan dalam proses implementasi kebijakan menurut Wibawa adalah kepatuhan dan pendekatan apa yang terjadi (*what's happening*). Implementasi ada dalam desain program. Sebaliknya ketidakdisiplinan akan mengakibatkan distorsi informasi/salah paham yang menyebabkan kegagalan implementasi. Sedangkan pendekatan apa yang terjadi dengan menggunakan analisis politik terhadap perilaku organisasi yaitu memotret pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh beragam variabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan sangat ditentukan oleh banyak faktor atau variabel, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain.⁵⁶

Sejalan dengan pemikiran tersebut, terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan, Ripley dan Franklin mengemukakan 3 (tiga)

⁵⁵ Edwards, *op. cit.*, h. 137.

⁵⁶ Wibawa, Samudra, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 47.

komponen yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi yakni: (1) tingkat kepatuhan pada bagian birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau setingkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; (2) keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas dan tidak ada masalah; (3) keberhasilan implementasi mengacu dan mengarahkan pelaksanaan dan dampak yang dikehendaki dari semua program yang ada.⁵⁷

5) *International Education* (Pendidikan Internasional)

Konsep tentang pendidikan Internasional belum memiliki pemahaman dan makna yang jelas. Namun demikian, banyak ahli berusaha merumuskan tentang pendidikan Internasional tersebut. Deskripsi di bawah ini berisi tentang pendekatan-pendekatan apa yang dimaksud dengan pendidikan Internasional seperti yang dikemukakan oleh Connell: "*Central to education for international life is a recognition of the unity of mankind in commonly shared world.*"⁵⁸

(Bahwa esensi dari pendidikan bagi kehidupan Internasional adalah pengakuan terhadap bersatunya umat manusia dalam dunia ini). Sementara Spring menyatakan "*the goal of international education is to*

⁵⁷ Randall, B. Repley, dan Franklin, Grace A. *Bureaucracy and Policy implementation*. (The Dorsey Press. Chicago, 2001), h. 46.

⁵⁸ Connell, Hellen, *Educational for International School Leadership*. In: S. (Blandford and M. Shaw (eds), Mana: 2002), p. 81.

meet the needs of global economy dominated by the powerful nations".

(Bahwa tujuan pendidikan Internasional adalah untuk memenuhi ekonomi global yang didominasi oleh negara-negara adidaya).

Berdasarkan pada kedua pendekatan tersebut, Connell menekankan pada "*an aspiration for the future*" (aspirasi masa depan), sementara Spring menggambarkan pengamatannya tentang "*the current practices in the developed world*" (praktek-praktek pendidikan yang ada dalam dunia yang berkembang).

Berbeda dengan Connell dan Spring, Husen and Postlethwaite mengemukakan bahwa "*all educative effort that aims at fostering an international orientation in knowledge and attitude*" is international education" (Semua kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk membantu perkembangan pengetahuan dan perilaku yang berorientasi Internasional disebut "pendidikan Internasional"). Sementara, Fraser and Brickman (1968) berpendapat bahwa "*international education connotes the various kinds of relationships – intellectual, cultural and educational among individuals and groups from two or more nations including the various methods of international co-operation, understanding and exchange*" (Pendidikan Internasional mengandung arti bermacam-macam hubungan-intelektual, budaya dan pendidikan di antara individu dan kelompok yang berasal dari dua atau banyak negara termasuk bermacam metode

kerjasama, pemahaman dan pertukaran secara Internasional). Dengan demikian, yang menjadi ruang lingkup dari pendidikan Internasional antara lain yakni; pertukaran guru dan murid, membantu negara-negara miskin, dan pembelajaran dengan sistem pendidikan Internasional.

Menurut Hayden and Thompson mengemukakan bahwa esensi pendidikan Internasional bukan pada hubungannya dengan lokasi tertentu, namun pada hubungan antar batas, baik secara fisik maupun intelektual: *“The essence of international education lies not so much in its association with a particular location, but rather in an association with the crossing of frontiers, be they physical or intellectual”*.⁵⁹

Hayden and Thompson menambahkan bahwa pendidikan Internasional seharusnya bertujuan mengembangkan perilaku berpikir yang terbuka, fleksibel, dan mampu mengidentifikasi keaslian budaya dengan sudut pandang yang lain, serta mengembangkan perilaku positif terhadap sistem nilai dan budaya orang lain: *“International education should aim at developing an attitude of mind which is open, flexible and able to identify the cultural origins of other points of view and a positive attitude towards one’s own value system and culture”*.⁶⁰

Sementara itu, Blackburn mengemukakan bahwa untuk mengartikan pendidikan Internasional adalah sangat sulit. Dia menekankan bahwa

⁵⁹ Hayden M.C., and Thompson, *International Education: Principles and Practice*. (London: Kogan Page, 2001), h. 51.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 57.

tujuan pendidikan Internasional adalah mendidik anak-anak untuk menerima perbedaan keragaman, bukan mentolerirnya :

It is so difficult to define. I put it, I think, that the purpose of international education is to teach our kids how to welcome diversity, not just to tolerate it” (World Yearbook 1991: International Schools and International Education.⁶¹ (Hal ini sangat sulit untuk menentukan. Saya katakan, saya pikir, bahwa tujuan pendidikan internasional adalah untuk mengajar anak-anak kita bagaimana untuk menyambut keragaman, bukan hanya untuk mentolerir itu).

Menurut Gellar konsep pendidikan Internasional menuntut kurikulum yang konkret dan spesifik, yang bertujuan memberikan bekal keterampilan kepada murid serta mata pelajaran yang memungkinkan mereka dapat melihat dunia dalam perspektif yang lebih luas :

The concept of international education demands a curriculum which is both concrete and specific, aimed at giving the student the skills that needs to achieve the goal that he has chosen and broad enough to include those subjects that enable him to see the world from a much wider perspective than is generally required in national systems.⁶² (Konsep pendidikan internasional menuntut kurikulum yang baik konkret dan spesifik, ditujukan untuk memberikan siswa keterampilan yang perlu untuk mencapai tujuan bahwa ia telah memilih dan cukup luas untuk mata pelajaran yang memungkinkan dia untuk melihat dunia dari banyak perspektif yang lebih luas daripada yang umumnya diperlukan dalam sistem nasional).

Organisasi Internasional seperti UNESCO, ILO and UNICEF mengartikan pendidikan Internasional sebagai suatu alat untuk kerjasama dan dukungan International. Definisi UNESCO tentang

⁶¹ Blandford, S. Shaw M. *Managing International Schools*. (London: Routledge Falmer, 2001), hh. 9, 28.

⁶² Jeff Thompson, “Towards a Model for International Education” in *International Education: Principles and Practice*, 2001, h. 276.

pendidikan Internasional menekankan kepada pendidikan bagi perdamaian, hak azasi dan demokrasi (*UNESCO* 1974). Definisi ini dipertegas dengan adanya deklarasi pada konferensi Internasional dalam hal pendidikan (*ICE*), Geneva, 1994 dan disokong oleh konferensi umum *UNESCO* di Paris tahun berikutnya. Tujuan dari pendidikan Internasional ini diperkenalkan dengan deklarasi ini.⁶³ Untuk mengembangkan: *pertama*, nilai yang universal bagi adanya budaya perdamaian; *kedua*, kemampuan untuk menghargai kebebasan dan tanggung jawab warga negara yang ada didalamnya; *ketiga*, pemahaman antar budaya yang mendorong pemersatuan ide dan solusi untuk memperkuat perdamaian; *keempat*, kemampuan untuk memecahkan konflik tanpa kekerasan; *kelima*, kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan; *keenam*, menghargai warisan budaya dan pemeliharaan lingkungan; *ketujuh*, rasa solidaritas dan keadilan pada tingkat nasional dan Internasional.

Selaras dengan itu, McKenzie mengidentifikasi ada delapan nilai sebagai karakteristik pendidikan Internasional dalam mencerminkan sikap Internasionalisme. Nilai-nilai tersebut meliputi *world mindedness* (orientasi dunia), *open-mindedness* (orientasi keterbukaan), *the promotion of a sense of global interdependence* (mengembangkan ketergantungan global), *the promotion, conjointly of a sense of individual and cultural self-esteem*

⁶³ Hayden, M.C., *Fundamentals of Educational Planning. International Schools: Growth and Influence*. (UNESCO: International Institute For Educational Planning, 2002), h. 90.

(mengembangkan harga diri individual dan budaya secara terpadu), *the promotion of a commitment to world peace and development* (membangun komitmen pengembangan dan perdamaian dunia), *a relish for the withering of prejudice* (menerima hinaan maupun prasangka), *a passion for learning as process and product* (menyukai belajar sebagai proses dan produk), dan *respect for and tolerance of other cultures and cultural diversity, leading possibly to 'interculturality'* (menghormati dan toleransi terhadap budaya lain dan keragaman budaya).⁶⁴

Lebih lanjut Mckenzie menyatakan bahwa perpaduan *world-mindedness* dan *open-mindedness* menggambarkan “*international attitudes*” (sikap perilaku Internasional). *World-mindedness* mengarah pada sikap kesadaran global; sedangkan *open-mindedness* memastikan adanya kesadaran untuk menyesuaikan dengan kesadaran global tersebut.

2. Kebijakan RSDBI

Dalam era globalisasi Negara Indonesia akan menghadapi persaingan terbuka, yaitu persaingan yang membutuhkan kecerdasan dan kemampuan untuk berkompetisi. Oleh karena itu, terwujudnya insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif adalah mutlak. Untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan strategi dan program pendidikan yang sistemik,

⁶⁴McKenzie, M., *Going, going, Gone-Global!* (In) Hayden. M.C., and Thomson, (London: Kogan Page, 2000), h. 99.

yang dapat digunakan dan menjadi rujukan nasional. Upaya tersebut antara lain dengan meningkatkan keprofesionalan lembaga pendidikan.

Terkait dengan itu, pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan agar “pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional”.⁶⁵

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada pasal 61 ayat (1) juga menyinggung tentang masalah sekolah bertaraf Internasional sebagai berikut: “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf Internasional”.⁶⁶

Selanjutnya dalam rangka menerapkan tuntutan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, pemerintah mengategorikan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar, sekolah/ madrasah yang telah

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3.

⁶⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 61 ayat 1.

memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri. Bagi sekolah/madrasah yang telah memenuhi semua aspek Standar Nasional Pendidikan secara penuh, dikembangkan untuk menjadi rintisan sekolah bertaraf Internasional. Untuk memahami wujud sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) plus atau sekolah bertaraf Internasional, diperlukan contoh nyata berupa Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Dengan adanya Rintisan SBI yang terus ditingkatkan menuju sekolah bertaraf Internasional, masyarakat akan memperoleh contoh bagi mana wujud nyata dari sekolah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005.

Dalam kerangka itu, Direktorat Pembinaan TK dan SD pada tahun 2007 telah melakukan langkah awal yaitu pengembangan Sekolah Dasar menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI) dengan memberikan bantuan berupa subsidi. Sampai pada tahun 2009 ini telah diberikan subsidi kepada 38 RSDBI (tahap tiga), 66 RSDBI (tahap dua), dan 66 RSDBI baru (tahun pertama). Rintisan SDBI merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan/merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Sebagai sekolah RSDBI, diharapkan akan dapat berkembang menuju sekolah bertaraf Internasional dan sekaligus berfungsi sebagai patok duga (*bench mark*) bagi sekolah lain dalam mengembangkan diri menuju layanan

pendidikan yang ideal.

Secara rinci dari masing-masing jenis kegiatan di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan menuju RSDBI adalah dengan pengembangan manajemen sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan pada pengembangan manajemen sekolah ini meliputi (1) Menyusun dokumen pengembangan manajemen sekolah berstandar Internasional dengan melibatkan berbagai pihak; (2) kegiatan untuk operasional implementasi MBS (kegiatan yang mencerminkan transparansi dan akuntabel) baik dalam bentuk administratif maupun *action* (pelaporan, kerjasama dengan media masa dan elektronik, dan sebagainya).

Disamping penataan manajemen sekolah pengembangan lembaga juga dilakukan dengan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi sekolah meliputi (1) perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah; (2) penyempurnaan struktur organisasi sekolah, dan penyempurnaan regulasi sekolah; dan (3) penataan administrasi sekolah yang efektif dan efisien.

Pengembangan lembaga dari sekolah konvensional menuju sekolah bertaraf Internasional akan terlihat dari perubahan status lembaga beserta unit pendukung untuk mencapai tujuan lembaga

tersebut.

2. Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 pasal 4 menyebutkan; (1) kurikulum SBI disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang diperkaya dengan standar dari Negara anggota *OECD* atau Negara majau lainnya. (2) SBI menerapkan satuan kredit semester (SKS) untuk SMP, SMA, dan SMK. Proses pembelajaran (Permendiknas 78/2009) menyebutka; (1) SBI melaksanakan standar proses yang diperkaya dengan model proses pembelajaran di Negara anggota *OECD* atau Negara maju lainnya. (2) proses pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat [1] menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan kontekstual. (3) SBI dapat menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya yang digunakan dalam forum internasional bagi mata pelajaran tertentu. (4) pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, Pendidikan Agama, dan pendidikan kewarganegaraan menggunakan bahasa pengantar nahasa Indonesia.

(5) menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat [3] dimulai dari kelas IV untuk SD.

Peraturan pemerintah Nomor 19 menjelaskan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan yaitu: TK, SD, SLTP, SLTA. Kurikulum disusun oleh setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah.

Dalam pengembangan kurikulum RSDBI, mengacu kepada :

a) Pengembangan kurikulum mencakup (1) pengembangan standar kompetensi, tujuan, KTSP, silabus, rencana program pembelajaran (RPP); (2) pengembangan bahan ajar dengan kualitas bertaraf Internasional yang ditunjukkan oleh isi (*content*) yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global.

b) Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain (1) kegiatan yang mengupayakan perolehan SKL Internasional baik dari dalam maupun luar negeri; (2) menyusun SKL bertaraf Internasional dengan cara memperluas dan memperdalam cakupan SKL nasional, yang akan diberlakukan di sekolah.

c) Pengembangan proses pembelajaran meliputi (1) penyusunan dokumen rencana kegiatan pengelolaan/manajemen pembelajaran

yang bertaraf Internasional di kelas (kegiatan pengelolaan PBM di kelas/lab/lapangan, remedial, pengayaan, dll); (2) kegiatan pendampingan kepada guru dalam membuat instrumen penilaian serta penerapan dan analisisnya atau penerapan perangkat lunak penilaian yang berbasis komputer atau internet; dan (3) melakukan inovasi dalam pembelajaran di kelas seperti pelaksanaan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan (PAKEM), pengintegrasian Pendidikan Kecakapan Hidup generik (PKH), dan Pendidikan Teknologi Dasar (PTD). Untuk pengembangan inovasi proses pembelajaran di luar kelas dapat dilakukan pada kegiatan kesiswaan seperti persiapan olimpiade sains dan matematika, karya tulis ilmiah, olahraga prestasi, kesenian, keagamaan.

Dalam hal pengembangan sistem penilaian yang dilakukan dengan sistem penilaian meliputi (1) kegiatan untuk memperoleh konsep dan panduan sistem penilaian standar Internasional (standar nilai, standar metoda penilaian, standar instrumen penilaian sesuai dengan mata pelajarannya (mapel), standar analisis nilai, standar kompetensi yang dinilai, dsb.) melalui berbagai upaya sesuai kondisi sekolah; (2) pendokumentasian konsep dan panduan sistem penilaian yang akan diterapkan di sekolah; (3) pembuatan kisi-kisi kompetensi

yang akan dinilai berstandar Internasional sesuai dengan mapelnya; (3) penyusunan instrumen/perangkat soal dalam berbagai bentuk/jenis sesuai dengan tuntutan kurikulum Internasional; (4) kegiatan khusus penilaian dan analisis nilai oleh guru yang mengajar dengan standar Internaional.

Dalam melaksanakan kurikulum akan menggunakan prinsip-prinsip:

Pertama, pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

Kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan lima belajar yaitu: belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain dan belajar untuk membangun menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif dan menyenangkan.

Ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan atau

percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik yang berdimensi ke Tuhanan, individual, kesosialan, dan moral.

Keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik yang saling menerima dan menghargai, *Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani* (bahasa Jawa) yang berarti: dibelakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, didepan memberikan contoh dan teladan.

Kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multi media, sumber belajar, dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

Keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

Ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh bidang pengembangan diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan keseimbangan yang cocok dan memadai antar kelompok RSDBI.

3 Pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat

Pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat dilakukan dengan :

a) Pengembangan lingkungan dan budaya sekolah dengan melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan komunitas belajar, dimulai dengan :

(1) menata lingkungan fisik/lingkungan sekolah sehat melalui program 7 K yakni: (kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan, kenyamanan, dan kekeluargaan) dilingkungan sekolah.

(2) pembenahan/penataan taman kreasi dan rekreasi.

Dalam hal penggalangan partisipasi masyarakat dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain:

- 1) pertemuan-pertemuan dengan komite sekolah, Tim Pengembang dan stakeholder;
- 2) pertemuan dengan dunia usaha/industri untuk melakukan kerja sama secara nyata, khususnya dalam hal pendanaan pendidikan;
- 3) melaksanakan visi, misi, kebijakan, rencana program, dan pengambilan keputusan bersama.

4. Pengembangan Sarana-Prasarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, PP Nomor 19 Tahun 2005.

Agar terpenuhi fungsinya sebagai RSDBI perlu adanya prasarana yang memadai. Beberapa persyaratan yang menyangkut prasarana adalah: lokasi pendirian dengan memperhatikan persyaratan lingkungan yaitu faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman penduduk, kemudahan transportasi, luas tanah, bangunan gedung.

Sarana merupakan persyaratan penting dalam penyelenggaraan pendidikan SD, yang dimaksud dengan sarana di SD adalah meliputi perabot dan alat peraga/alat permainan. Perabot merupakan kelengkapan ruangan yang mendukung kegiatan belajar mengajar (KBM) di SD. Alat peraga/alat permainan merupakan alat yang digunakan oleh guru maupun anak dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 78 Tahun 2009, tentang sarana dan prasarana dijelaskan :

(1) SBI memenuhi standar sarana dan prasarana yang diperkaya

dengan standar sarana dan prasarana pendidikan dari Negara anggota OECD atau Negara maju lainnya.

- (2) Setiap ruang kelas SBI dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.
- (3) SBI memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran di seluruh dunia (*e-library*).
- (4) SBI memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung pengembangan profesionalisme guru.
- (5) SBI melengkapi sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan peserta didik untuk mengembangkan potensinya di bidang akademik dan non akademik.⁶⁷

Oleh sebab itu, sarana dan prasarana dilakukan dengan :

- a) Pengadaan peralatan pendidikan terutama fasilitas pokok berstandar Internasional seperti :

- (1) melengkapi peralatan pendidikan IPA/IPS/Bahasa Indonesia/ Bahasa Inggris;
- (2) pengadaan fasilitas ruang komputer (melengkapi perangkat keras dan lunak);

- b) Pengadaan media pendidikan berupa :

- (1) penyediaan peralatan media pendidikan untuk pembelajaran di kelas (CD, LCD, Laptop, Tape, screen proyektor, speaker);
- (2) pemasangan/ penyempurnaan sistem jaringan internet (ruang/lab komputer, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah);
- (3) penyediaan fasilitas komputer di ruang guru, ruang TU, ruang

⁶⁷ Permendiknas RI Nomor 78 Tahun 2009 Tentang RSDBI pasal 60 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5.

perpustakaan, dan ruang lain yang dianggap perlu.

- c) Pengadaan buku sekolah terutama melengkapi buku teks pelajaran yang masih kurang, membeli buku panduan guru, buku referensi dan buku bacaan untuk koleksi perpustakaan.
- d) Pengadaan pusat sumber belajar guru berupa ruangan atau tempat yang dilengkapi buku-buku sumber, komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak/VCD. Tempat ini dapat memanfaatkan bagian dari ruang pada perpustakaan.
- e) Membangun ciri khas SBI-SD yang bersifat monumental, yang dapat menimbulkan rasa kebanggaan bagi masyarakat. Disini sekaligus melakukan pembenahan/penataan tempat bermain, kreasi, dan rekreasi.
- f) Membangun ruang baru yang belum ada dan merupakan prioritas atau rehab ringan dari bangunan/ruang yang dianggap perlu.

Secara rinci masing-masing jenis kegiatan di atas dijelaskan sebagai berikut :

a) Pengembangan Prasarana

(1) Pengembangan/Pembangunan Ruang Laboratorium

Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu pengembangan/pembangunan ruang laboratorium komputer dan atau

laboratorium bahasa. Apabila salah satu sudah ada, maka hanya membangun yang belum ada. Bila keduanya sudah ada, dana pembangunan ini dapat digunakan untuk menambah luas dari laboratorium dan pengadaan sarana kedua laboratorium tersebut.

(2) Rehab Ringan Ruang Penunjang

Ruang penunjang lainnya antara lain kamar mandi/WC, ruang guru, ruang pimpinan, ruang UKS, tempat ibadah. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki kerusakan ringan termasuk pengecatan, pemasangan/perbaikan instalasi listrik, pemasangan jaringan telpon dan internet pada ruang pimpinan dan ruang guru.

Penataan lingkungan sekolah dan penguatan peran masyarakat dilakukan dengan :

- a). Penataan lingkungan dan budaya sekolah dengan melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan komunitas belajar, dimulai dengan (1) menata lingkungan fisik/lingkungan sekolah sehat melalui program 7 K (kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan, kenyamanan, dan kekeluargaan) dilingkungan sekolah; (2) pembenahan/penataan taman kreasi dan rekreasi.
- b) Penguatan peran masyarakat dengan melakukan kegiatan

antara lain (1) pertemuan-pertemuan dengan komite sekolah, Tim Pengembang dan stakeholder; (2) pertemuan dengan dunia usaha/industri untuk melakukan kerja sama secara nyata, khususnya dalam hal pendanaan pendidikan; (3) melaksanakan visi, misi, kebijakan, rencana program, dan pengambilan keputusan bersama.

c) Pembangunan Gapura RSDBI

Gapura yang merupakan ciri khas dari sekolah dan bersifat monumental, dibangun sesuai dengan budaya/kultur daerah masing-masing. Tidak ada keharusan adanya keseragaman dalam membuat gapura. Adanya gapura ini diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan bagi warga sekolah dan masyarakat.

d) Pengembangan Sarana

1) Pengadaan alat peraga pendidikan dan sarana ruangan

Pengadaan alat peraga pendidikan terutama melengkapi peralatan untuk IPA, IPS, IPBA, Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris apabila masih kurang. Sedangkan sarana ruangan terutama ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang UKS. Pada semua ruang kelas perlu dilengkapi dengan sarana pelengkap seperti gambar presiden dan wakil, lemari atau kelengkapan lain yang harus ada. Pada ruang UKS perlu adanya tempat tidur pasien, timbangan badan dan pengukur

tinggi badan, lemari obat-obatan, dsb.

2) Pengadaan Sarana Laboratorium

Pengadaan sarana laboratorium yang utama adalah (1) sarana laboratorium komputer yang meliputi perangkat computer sejumlah siswa/rombel (12 set), perangkat ICT (laptop, LCD, layer) disertai software; (2) sarana laboratorium bahasa meliputi perangkat peralatan untuk belajar bahasa secara individual, dan perangkat ICT (laptop, LCD, layer) disertai software. Selain itu dapat dilakukan pengadaan perabot seperti papan tulis, rak/lemari, meja dan kursi (sesuai kebutuhan dan dana) serta sarana penunjang lainnya seperti gambar presiden dan wakil, gambar lambang negara dll.

3) Pengadaan Buku

Pengadaan buku pengayaan dan buku referensi untuk anak SD disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka memenuhi standar minimal yang diharuskan standar nasional pendidikan. Buku-buku untuk koleksi perpustakaan ini baik untuk bacaan maupun referensi harus diusahakan sebagian dalam bahasa Inggris.

e). Peningkatan Mutu Pembelajaran

1) Studi Banding

Studi banding ke sekolah-sekolah yang telah mempunyai

reputasi Internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sangat diperlukan untuk menambah wawasan bagi para pengelola RSDBI dalam rangka mengembangkan sekolah. Hal yang perlu dicermati dalam studi banding antara lain sistem pengelolaan, kurikulum yang digunakan, sistem penilaian, buku-buku teks yang di pakai, peralatan pendidikan dan media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Dari hasil studi banding ini sekolah dapat mengadaptasi atau mengadopsi hal-hal yang diperlukan oleh sekolah.

2) Administrasi Penyelenggaraan Program

Penggunaan dana untuk administrasi penyelenggaraan meliputi pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan program seperti penyusunan laporan, transportasi, dan biaya administrasi lainnya.

3. Sekolah Internasional

1. Konsep *International School* (Sekolah Internasional)

Sekolah Internasional banyak ditemui di berbagai negara, yang semula didirikan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak expatriate professional yang bekerja di luar negeri

untuk jangka waktu yang lama. Akan tetapi bagaimana sekolah-sekolah tersebut kemudian dikenal sebagai sekolah Internasional masih belum diketahui alasan yang tepat. *The international school of Geneva (ISG)* adalah institusi pendidikan tertua dari sekolah Internasional. Dengan meningkatnya mobilitas global para profesional, maka jumlah sekolah Internasional semakin meningkat, yakni dari semula berjumlah hanya 50 sekolah pada tahun 1964 menjadi lebih dari 1000 sekolah dalam tiga puluh tahun.

Tuntutan sekolah Internasional semakin meningkat dengan cepat. Menurut kebutuhan klien mereka dan kondisi geografis, sekolah Internasional menawarkan berbagai pendidikan Internasional formal yang beragam. Tidak ada satu faktor yang menentukan bagi filosofi pendidikan dalam sekolah Internasional. Banyak pendidik menggambarkan berbagai karakteristik sekolah Internasional sebagai institusi pendidikan. Sekolah Internasional memiliki murid-murid dari berbagai bangsa, memberikan layanan kepada komunitas ekspatriat dengan kehidupan Internasional. Terwilliger mengemukakan karakteristik sekolah Internasional seperti berikut: 1) pendaftaran terdiri dari anak-anak ekspatriat; 2) mempekerjakan guru-guru yang sudah berpengalaman; 3) dewan pengurus pimpinan terdiri dari tenaga lokal dan ekspatriat dengan perbandingan 50/50; 4) sekolah menawarkan materi dan metodologi pembelajaran terbaik untuk melanjutkan

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Geller, sekolah Internasional mengangkat pemahaman Internasional. Setiap sekolah di dunia baik swasta maupun negeri dapat menjadi Internasional. Sementara Wilkinson berpendapat: “*The key elements are exposure in schools to a curriculum that is consciously international in content and students with wide diversity of cultural background*”.⁶⁸ (Hal yang paling penting adalah sekolah terbuka untuk materi kurikulum Internasional, dan terbuka bagi murid-murid yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda). Berbeda dengan pendapat Wilkinson, menurut Findlay, “*the curriculum of international schools is usually not international, It is based on the curriculum of a country other than of the host country*”.⁶⁹ (Kurikulum sekolah Internasional tidak selalu Internasional, tetapi berdasarkan pada kurikulum sebuah negara atau di mana sekolah itu berada).

Ada upaya untuk mengkategorikan sekolah Internasional, antara lain Matthew membedakan antara sekolah yang ‘berlandaskan ideologi’ (*ideology-driven*) dengan sekolah yang ‘berlandaskan pemasaran’ (*market-driven*). Sekolah Internasional yang ‘berlandaskan ideologi’ adalah sekolah yang memiliki tujuan yang jelas dalam memajukan pemahaman dan kerjasama Internasional. Sekolah yang ‘berlandaskan

⁶⁸ Wilkinson, David, *International Education: A Question of Acces*, (In) Hayden M.C. and Thomson, (London: Page, 2000), h. 227.

⁶⁹ Findlay, R., *International Schools Handbook*, (London: Page, 2000), h. 126.

pemasaran' adalah sekolah yang berdiri atas dasar kebutuhan komunitas tertentu, dikelola oleh individu, kelompok masyarakat, dan delegasi perusahaan multinasional atau perwakilan pemerintah. Sebuah sekolah dapat memiliki karakteristik keduanya. *The United World Colleges* adalah sebuah kelompok dari sekolah-sekolah yang 'berlandaskan ideologi', tidak menggunakan istilah 'Internasional' didalam nama mereka tetapi mereka memberikan pendidikan Internasional dan memiliki latar budaya yang beragam, baik dilihat dari siswa maupun gurunya.⁷⁰

Meskipun keberagaman *International School* sulit untuk menggeneralisasikan karakteristiknya, namun demikian menurut (Hayden and Thompson, 2008) dalam *International Schools: Growth and Influence* terdapat beberapa karakteristik yang secara jelas dapat membedakannya dengan sekolah nasional, yakni :

- 1) Kurikulum; sekolah Internasional menawarkan kurikulum yang berbeda dengan kurikulum yang ada di mana sekolah tersebut berada; Thompson mengemukakan empat cara mengkategorikan kurikulum yang digunakan di sekolah Internasional. *Pertama, exportation* (pengekspor) yakni pemasaran kurikulum dan ujian nasional dari negara asal ke luar negeri; *kedua, adaptation* (adaptasi) yakni menyesuaikan kurikulum dan ujian nasional dengan konteks

⁷⁰ Matthew, M., *The Ethos of International School*, (University of Oxford, M. SC., Thesis. 2001), h. 83-84.

Internasional; *ketiga, integration* (integrasi/perpaduan) yakni mengintegrasikan keunggulan-keunggulan yang terdapat pada kurikulum dan ujian nasional dan Internasional menjadi sebuah kurikulum baru; *keempat, creation* (kreasi) yakni mengembangkan sebuah program baru.

- 2) Murid; Murid-murid sekolah Internasional pada umumnya bukan berasal dari negara di mana sekolah tersebut berada (namun pada saat ini, sekolah Internasional juga menerima murid yang berasal dari keluarga kaya dari negara di mana sekolah tersebut berada);

Terdapat beberapa kategori murid sekolah Internasional antara lain yakni :

- 1) *Global Nomads/Third Cultural Kids*:

Adanya fenomena anak-anak yang berpindah secara global mengikuti karier profesional orang tua mereka, muncul suatu istilah *Third Culture Kid* (TCK). Istilah ini untuk menggambarkan anak-anak yang tidak bisa merasakan hubungan atau memiliki "*first culture*" (budaya asal) dari Negara yang tercantum dalam paspor mereka, atau "*second culture*" (budaya kedua) dari negara di mana mereka tinggal sementara, akan tetapi mereka justru lebih merasakan seperti di rumah sendiri dalam "*third culture*" (budaya ketiga); yakni budaya yang diciptakan, diberikan, dan dilakukan oleh masyarakat yang

saling berhubungan satu sama lain.⁷¹

Dalam perkembangannya saat ini menurut (Pollock dan Van Reken) TCK digambarkan sebagai “*some one who has spent a significant part of his or her developmental years outside the parental culture ... (building) relationships to all the cultures while not having full ownership in any*” (seseorang yang menghabiskan sebagian masa penting dalam pertumbuhannya di luar budaya orang tua mereka... (membangun) hubungan dengan budaya lain sementara tidak dapat memiliki satu budaya pun). Sementara itu, (Mc Caig, 1992) menggambarkan *global nomad* sebagai “*individuals of any age or nationality who have spent a significant part of their developmental years living in one or more countries outside their passport country because of a parent’s occupation*”.⁷²

2) *The Returnee* (Anak-anak yang kembali ke Negara asal)

Kelompok lain dari anak-anak yang berpindah secara global adalah mereka yang memilih masuk di sekolah Internasional di negara asalnya sendiri dari pada masuk di sekolah nasional di negaranya setelah kembali dari negara lain. Hal ini dikarenakan mereka lebih dapat menyesuaikan kembali dengan bahasa dan

⁷¹Ohmae, K. *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. (New York: The Free Press, 2003), h. 31.

⁷² Schaetti, B., “*The Global Nomad Profile*” In: *The Global Nomad: The Benefits and Challenges of Internationally Mobile Childhood* Regent College Conference, London: Kogan Page 2002), h. 11.

kurikulum yang digunakan di sekolah Internasional tersebut.

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan; merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari ekspatriat;

a) Pendidik;

Hardman dalam penelitiannya menyatakan terdapat tiga kategori pendidik (guru) ekspatriat yang melamar di sekolah Internasional yakni: *pertama*, profesional karier dengan status single; *kedua*, *mavericks*, yakni orang yang bebas dan tidak bergantung; *ketiga*, profesional karier yang sudah berkeluarga.⁷³

b) Tenaga Kependidikan;

Tenaga kependidikan dalam hal ini kepala sekolah harus memiliki pengalaman tentang sekolah Internasional, baik dalam mengajar, memimpin, dan wawasan tentang sistem sekolah Internasional. Sekolah Internasional juga memiliki tenaga administrasi senior (biasanya menjabat sebagai bisnis manager atau manager keuangan). Hubungan antara kepala sekolah dengan tenaga administrasi senior ini menjadi

⁷³ Husen, T. and Postlethwaite, T.N. *The International Encyclopaedia of Education*. (Oxford: Pergamon Press, 2003), hh. 132-133.

sangat penting dalam menjalankan sekolah yang efektif.

(2) Manajemen, kepemimpinan, dan tata kelola; disesuaikan dengan kondisi pendidik, karakteristik murid, dan kurikulum yang ditawarkan;

1) Manajemen dan Kepemimpinan;

Untuk meningkatkan dan menciptakan sekolah yang efektif dituntut peran kepala sekolah dengan kepemimpinan yang professional. (Sammons, Hilmans, and Mortimore). Sammons *et al.* menyatakan bahwa pada umumnya kepala sekolah selain diharapkan memberikan kepemimpinan, juga diharapkan menjadi manager. Gelar memberikan gambaran perbedaan antara pemimpin dan manager sebagai berikut :

*Leaders set the course for the organization; managers make sure the course is followed. Leaders make strategic plans; managers design operational systems for carrying out the plans. Leaders stimulate and inspire; managers use their interpersonal influence and authority to translate that energy into productive work.*⁷⁴ (Pemimpin menetapkan kursus untuk organisasi; manajer pastikan mengikuti kursus. Pemimpin membuat rencana strategis, sistem desain, manajer operasional akan melaksanakan rencana. Pemimpin merangsang dan menginspirasi, manajer menggunakan pengaruh interpersonal mereka dan otoritas untuk menerjemahkan energi yang menjadi produktif).

Dengan demikian kepala sekolah dituntut untuk menjadi

⁷⁴Gellar, C. *International Education: Some Thoughts on What It is and What It might be*, International School Journal, 2003, hh. 16-21

pemimpin maupun manager atau berperan sebagai “*Middle Management*” di sekolah.

2) Tata Kelola di Sekolah Internasional

Pada umumnya sekolah Internasional merupakan sekolah swasta. Meskipun ada beberapa sekolah yang dibiayai oleh negara (seperti *the Dutch International Secondary School* di Netherlands, di mana deretan sekolah Internasional tersebut berhubungan dengan sekolah “induk” negeri). Namun demikian, pada umumnya sekolah Internasional merupakan institusi swasta yang memperoleh income dari uang sekolah murid. Salah satu model tata kelola sekolah Internasional adalah bahwa sekolah dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau keluarga. Pengelolaan sekolah dengan model ini dapat dikelola seperti sebuah organisasi yang *profit oriented* ataupun *non profit oriented* bergantung pada karakteristik pemiliknya. Selain itu peran kepala sekolah dipegang sendiri oleh pemilik atau anggota keluarganya. Blandford and Shaw mengemukakan komentar dari seorang kepala sekolah Internasional seperti berikut: “*I am the Chair, and the rest of Boards consist of my daughter and my son-in-law*”.⁷⁵

⁷⁵ Blandford, S., Shaw, M., *The Nature of International School Leadership*. (London: Routledge Falmer, 2001), h. 23.

Dengan adanya berbagai sekolah Internasional yang beragam, kiranya perlu untuk mengkategorikan sekolah-sekolah tersebut. Hill melakukan pendekatan untuk mengelompokkan sekolah Internasional ke dalam empat tipe dalam dimensi sekolah Internasional dan nasional. *Tipe pertama*, adalah sekolah nasional yang berada di luar negeri yang memiliki program pendidikan seperti dari negara asalnya. Sekolah ini seperti sekolah nasional di negara asalnya, hanya lokasinya berada di luar negeri. Sekolah ini mencantumkan kebangsaannya untuk nama sekolahnya, seperti *American International in Kuwait*; *Tipe kedua*, adalah sekolah nasional di negara sendiri dengan menggunakan program Internasional. Sebagai contoh tipe sekolah ini adalah sekolah yang beregister *IB* di Indonesia; *Tipe ketiga*, adalah sekolah Internasional dengan menggunakan program Internasional; *Tipe keempat*, adalah sekolah Internasional dengan menggunakan program nasional yang berasal dari salah satu atau beberapa negara yang juga menggunakan program tersebut di negara asalnya. Pengelompokkan sekolah Internasional di atas di dasarkan pada perspektif negara.

a. Kurikulum *International School* (Sekolah Internasional)

Sekolah Internasional, sejatinya adalah sekolah yang menggunakan kurikulum asing dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Salah satu kurikulum yang digunakan pada sekolah Internasional adalah *International*

Baccalaureate (IB). Penggunaan kurikulum *IB* pada sekolah Internasional ini dimaksudkan untuk membantu sekolah dalam mengembangkan bakat individual anak dan mengajarkan mereka untuk menghubungkan pengalaman di kelas dengan kenyataan di dunia luar, sehingga diharapkan anak dapat menjadi pemikir yang kritis, pembelajar yang bertahan lama, dan menghargai keberagaman sikap dan budaya seperti yang dikemukakan oleh Jenkins sebagai berikut :

*Through comprehensive and balanced curricula, coupled with challenging assessments the IB organisation aims to assist schools in their endeavours to develop the individual talent of young people and to teach them to relate the experience of classroom to the realities of the world outside. Beyond intellectual rigour and high academic standards, the emphasis is placed on the ideals of international understanding and responsible citizenship, to the end that IB students may become critical and compassionate thinkers and life-long learners and informed participants in the local and world affairs, conscious of the shared humanity that binds all people together while respecting the variety of cultures and attitudes that make for the richness of life.*⁷⁶

(Melalui kurikulum yang komprehensif dan seimbang, ditambah dengan penilaian menantang organisasi *IB* bertujuan untuk membantu sekolah dalam upaya mereka untuk mengembangkan bakat individu orang muda dan mengajar mereka untuk menghubungkan pengalaman kelas dengan realitas dunia luar. Melampaui kekakuan intelektual dan standar akademik yang tinggi, penekanannya ditempatkan pada cita-cita pemahaman internasional dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, dengan tujuan agar siswa *IB* dapat menjadi pemikir kritis, penuh kasih seumur hidup, peserta didik dan peserta informasi dalam urusan lokal dan dunia, sadar akan kemanusiaan bersama yang mengikat semua orang bersama-sama tetap menghargai berbagai budaya dan sikap yang membuat kekayaan hidup).

⁷⁶ Jenkins, Colin, *Global Issue: A Necessary Component of a Balanced Curriculum for the 21st Century*, (In) Hayden M.C., and Thomson J.J., 2000), h. 97.

Sejalan dengan itu, Hayden and Wong mengemukakan: “*our overall conclusion is that IB is perceived as a successful academic programme, which clearly contributes to the development of international outlook.*”⁷⁷ *IB* dianggap sebagai sebuah program akademis yang berhasil, yang secara nyata memberikan kontribusi dalam pengembangan sekolah Internasional.

Selain sistem kurikulum *Internasional Baccalaureate (IB)*, sistem kurikulum lain yang populer digunakan, termasuk yang digunakan di sekolah-sekolah Internasional di Indonesia, yakni *Cambridge International Examinations (CIE)*. Kedua kurikulum tersebut tersebar ke seluruh dunia karena ada sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi dan mendapat pengakuan secara global. Meskipun negara tempat sekolah tersebut berlokasi sudah mempunyai sistem kurikulum sendiri, namun tidak tertutup kemungkinan ada sekolah yang menggunakan *IB* dan *CIE*. Berikut dapat dilihat kedua sistem kurikulum tersebut :

1) *International Baccalaureate (IB)*

Program-program *IB* dikelola oleh organisasi non pemerintah, *International Baccalaureate Organization (IBO)* yang bermarkas di Geneva, Swiss. Organisasi ini didirikan oleh diplomat-diplomat Eropa pada tahun 1968, yang semula menginginkan agar keberlanjutan dan kualitas pendidikan anak-anaknya tetap terjamin dan terstandar, meskipun mereka

⁷⁷ Hayden, *op. cit.* h. 359.

harus berpindah-pindah negara. Kini program IB sudah diserap di lebih dari 90 negara. Sekolah yang menggunakan harus mendapat pengesahan untuk mendapatkan sertifikat dari *International Baccalaureate Organisation (IBO)* di Jenewa, Swiss.

Situs resmi IBO menyebutkan bahwa pada dasarnya kurikulum IB mendorong peserta didik untuk mengenal budayanya sendiri, untuk mendorong pemikiran global para pelajar. Siswa diberi kebebasan memilih bidang akademis yang *transdisipliner* dan fleksibel guna lebih menggali kemampuan mereka. Program-program IB, juga ditujukan untuk mengembangkan sikap positif dalam belajar dengan memotivasi siswa agar menjadi pelajar yang aktif dan kompeten. Juga mengembangkan kemampuan intelektual, pribadi, emosi, dan sosial. Dalam pelaksanaannya program IB dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu :

a. *Primary Years Programme (PYP): 3-10 tahun*

Ada lima elemen utama dalam kurikulumnya, yakni konsep, pengetahuan, keahlian, sikap, dan tindakan. Elemen tersebut dikembangkan lewat enam cara transdisipliner: siapa, dan di mana kita hidup, bagaimana kita berkembang, dunia berjalan, dan kita terlibat didalamnya, serta hidup berdampingan. Didukung oleh enam subyek pendidik: bahasa, ilmu sosial, matematika, seni, sains, pendidikan personal, sosial, dan fisikal.

b. *Middle Years Programme (MYP): 11-16 tahun*

Delapan wilayah akademis: matematika, sains, seni, fisikal, bahasa pertama dan bahasa kedua, kemanusiaan, dan teknologi. Masing-masing dilakukan dalam lima cara: pendidikan kesehatan dan sosial, kemasyarakatan, lingkungan, cara belajar, kecerdasan. Sekolah yang mengadopsinya bebas mengembangkan lagi kurikulum yang pas dengan kondisi sekolahnya. Bisa memilih salah satu atau mengajarkan semua yang ada dalam satu bidang.

c. *Diploma Programme: 16-18 tahun*

Terdapat enam wilayah akademis: matematika dan ilmu komputer, seni, bahasa pertama, praktikum sains, bahasa kedua, individu dan kemasyarakatan. Dikembangkan lewat tiga kemampuan utama: teori, kreatifitas dan tindakan, serta esai.

2) *Cambridge International Examinations (CIE)*

CIE adalah bagian dari *The Cambridge Assessment Group*, organisasi nirlaba di bawah *University of Cambridge*. Jaringan penyelenggara sistem kurikulum yang telah digunakan di sekolah-sekolah di 150 negara ini, tahun ini berusia 150 tahun. Kurikulum Cambridge menekankan fleksibilitas, sejak pendidikan dasar hingga menengah. Siswa bebas memilih pelajaran sesuai kemampuan dan minat, sehingga mereka dapat mengeksplorasi kemampuannya. Sistem kurikulum yang umum diterapkan di sekolah-sekolah di Inggris ini, juga banyak digunakan di Amerika Serikat, Kanada, India, Selandia Baru, dan negara-negara lain di

dunia dengan beberapa penyesuaian. Secara berkala Dewan dan Sindikasi Universitas akan memantau dan mengarahkan pelaksanaan sistem Cambridge di sekolah-sekolah yang menggunakan sistem ini. Program pendidikan Cambridge terdiri empat kualifikasi yakni:

a. *Cambridge International Primary Program (CIPP): 5-11 tahun*

Mempelajari bidang akademis bahasa Inggris, matematika, dan sains melalui tahapan-tahapan yang disusun berdasarkan kemampuan alami anak saat itu.

b. *Lower Secondary Program: 11-14 tahun*

Meneruskan bidang pembelajaran dari pelajaran dasar (bahasa Inggris, matematika, dan sains), dan ditambah dengan mempersiapkan anak untuk menempuh IGCSE atau O Level.

c. *Middle Secondary: 14-16 tahun*

Tahap ini terkenal dengan kurikulum *International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)* atau O level. Siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi harus melalui ujian IGCSE atau O level. Kualifikasi O level terutama dirancang untuk peserta didik yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Siswa dapat memilih mata pelajaran yang diminati dalam persiapan menuju A level serta membekali kemampuan untuk bekerja nantinya.

d. *Upper Secondary: 16-18 tahun*

Kualifikasi Internasional A level, diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di seluruh dunia. Kelulusan ujian A level sekaligus merupakan bukti kemampuan akademik untuk melanjutkan studi ke universitas yang menerima sistem Cambridge. Sedikitnya diperlukan waktu sekitar dua tahun untuk mempersiapkan siswa agar dapat menuntaskan jenjang A level. Pada tahap ini siswa bebas memilih mata pelajaran yang diminati sesuai kemampuan mereka.

3) *Quality Assurance (Penjaminan Mutu)*

Dalam sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu sekolah didasarkan pada beberapa hal seperti: kurikulum yang diikuti; penunjukan staf; sarana-prasarana yang disediakan; dan alat penilaian yang digunakan, yang selanjutnya dimonitor dan didukung oleh sistem pembinaan dan pengawasan baik lokal, regional, maupun nasional. Beberapa sekolah Internasional yang berafiliasi nasional lebih memilih untuk dinilai oleh pengawas yang berpengalaman di negaranya. Karena hal ini dapat menghasilkan kembali pembiasaan dalam konteks Internasional. Format penilaian juga sudah sangat dikenal oleh sekolah, sehingga dapat membantu dalam menunjukkan kredibilitas dan kualitas pendidikan yang

diberikan. Sebagai contoh, *The National Association of British in Spain (NABSS)* menggunakan sistem tersebut untuk melakukan pengawasan di sekolah-sekolah Internasional binaannya.

4) **Penjaminan Mutu Sekolah Bertaraf Internasional**

Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional di Indonesia berdasarkan Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah⁷⁸ meliputi :

1. Akreditasi

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu perolehan sertifikat akreditasi minimal “predikat A” dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan memperoleh “predikat A” pada setiap periode akreditasi berarti bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik dan sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu pendidikan secara optimal. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi yang baik dari

⁷⁸ Balitbang, Depdiknas, 2007.

salah satu Negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan/atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

2. Kurikulum

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut :

- a) menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- b) menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK;
- c) memenuhi Standar isi; dan
- d) memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

- a) sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing;
- b) muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu

negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; dan,

c) menerapkan standar kelulusan sekolah/madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

3. Proses Pembelajaran

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Proses.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

- a) proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa *entrepreneurial*, jiwa patriot, dan jiwa innovator;
- b) diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

- c) menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran;
- d) pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti mata pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia; dan
- e) pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada kelas VI.

Dalam proses pembelajaran selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum Internasional; bahasa Perancis, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

4. Penilaian

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan menunjukkan kinerja pendidikan yang optimal melalui penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh para guru untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja

minimal, yaitu memenuhi Standar Penilaian. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu memperkaya penilaian kinerja pendidikan dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

5. Pendidik

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan guru menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas profesionalnya. Pendidik memiliki peranan yang strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pendidik. Selain itu, keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

- a) Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK;
- b) Guru mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris;
- c) Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SD/MI;

- d) Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/MTs; dan
- e) Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK;

Guru dalam proses pembelajaran sepanjang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhannya, selain menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum Internasional, seperti bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

6. Tenaga Kependidikan

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan kepala sekolah/madrasah menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas profesionalnya, yaitu sebagai pemimpin manajerial-administratif dan manajerial-edukatif. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

- a) Kepala Sekolah/Madrasah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah

menempuh pelatihan kepala sekolah/madrasah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pemerintah;

b) Kepala Sekolah/Madrasah mampu berbahasa Inggris secara aktif; dan

c) Kepala Sekolah/ Madrasah bervisi Internasional, mampu membangun jejaring Internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneural yang kuat.

7. Sarana dan Prasarana

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan kewajiban sekolah/madrasah memiliki dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Sarana dan Prasarana. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

a) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK;

b) Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia; dan

c) Dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya,

fasilitas olah raga, klinik, dan lain sebagainya.

8. Pengelolaan

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pengelolaan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut :

- a) Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000;
- b) Merupakan sekolah/madrasah *multicultural*;
- c) Menjalinkan hubungan “*sister school*” dengan sekolah bertaraf Internasional;
- d) Bebas narkoba dan rokok;
- e) Bebas kekerasan (*bullying*);
- f) Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah; dan
- g) Meraih medali tingkat Internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.

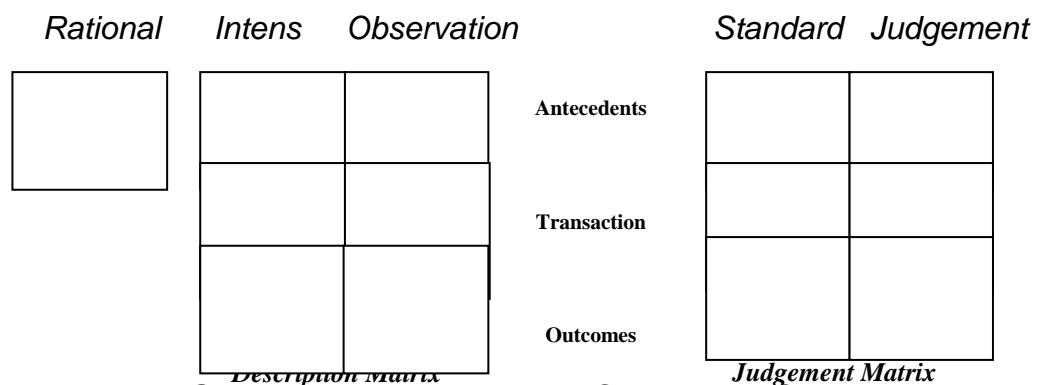
9. Pembiayaan

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pembiayaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas biaya

investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar pembiayaan. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target Indikator Kunci Tambahan.

C. Model Evaluasi *Contentance* Stake

Untuk mengetahui implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Center Curup Kota, akan digunakan model *countenance*. Model ini dikembangkan oleh Stake. Menurut ulasan tambahan yang diberikan oleh Fernandes (1984), model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu (1) Deskripsi (*Description*) dan (2) Perimbangan (*Judgments*); serta membedakan adanya tiga tahap dalam evaluasi program, yaitu (1) Antecedes (*antecedents/context*), (2) Transaksi (*transaction/proses*), dan (3) Keluaran (*output-outcomes*). Oleh Stake, model evaluasi yang diajukan dalam bentuk diagram, menggunakan deskripsi dan tahap seperti berikut.⁷⁹



Gambar 2.3 Model Evaluasi *Contentance* Stake

⁷⁹ Daniel Stufflebeam, *Evaluation Modle View Points on Educational and Human Servis The Evalation*, (New York: Public Sper, 2002: 27).

Maksud dari matrik tersebut adalah :

Rasional adalah gambaran dari keadaan yang sebenarnya terjadi yang didasarkan pada konsep kebijakan yang diterapkan.

Intens atau *Goal*/tujuan yang menjadi focus untuk dicari jawabannya.

Observation atau observasi terhadap aspek, indicator untuk mengukur efek atau akibat dari penggunaan standar terhadap kenyataan yang ada.

Standar atau ukuran adalah criteria, skala ukur dalam membandingkan pada tataran konsep dengan kebijakan tataran implementasi.

Judgement atau pertimbangan untuk memberikan kesimpulan perbandingan antara standar yang telah ditetapkan terhadap ketercapaian yang telah diperoleh atau telah dicapai.

Tiga hal yang dituliskan diantara dua diagram, menunjukkan objek atau sasaran evaluasi. Dalam setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) *Anteseden* – yang diartikan sebagai konteks, (2) *Transaksi* yang diartikan sebagai proses, dan (3) *Outcomes* yang diartikan sebagai hasil. Selanjutnya, kedua matriks yang digambarkan sebagai *deskripsi* dan *pertimbangan*, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi.

Matriks pertama, yaitu *deskripsi*, berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi), yaitu apa *maksud/tujuan* yang diharapkan oleh program, dan *pengamatan/akibat*, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang betul-betul terjadi. Selanjutnya

evaluator mengikuti matriks kedua, yang menunjukkan langkah *pertimbangan*, yang dalam langkah tersebut mengacu pada *standar*.

Menurut Stake, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama.
2. Membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

Bertitik tolak dari penjelasan Fernandes terhadap objek dan cara kerja model tertentu, penulis memberikan nama pada model yang dikemukakan oleh Stake ini dengan nama bahasa Indonesia, yaitu model *deskripsi-pertimbangan*.

Descriptions matrix menunjukkan intens (Goal = tujuan) dan *Observation* (Effect = akibat) atau yang sebenarnya terjadi *judgement* berhubungan dengan standar (tolak ukur = kriteia) dan *judgement* (pertimbangan). Stake bahwa ketika menimbang-nimbang didalam menilai suatu program pendidikan, kita tentu melakukan perbandingan relative (antara satu program dengan standar).

Model ini menekankan kepada *evaluator* agar membuat keputusan/penilaian tentang program yang sedang dievaluasi secara benar,

akurat dan lengkap. Stake menunjukkan bahwa *description* disatu pihak berbeda dengan pertimbangan menilai. Didalam model ini data tentang *antecedent (input)*, *transaction (proses)* dan *out comes (product)* data tidak hanya dibandingkan untuk menentukan kesenjangan antara yang diperoleh dengan yang mutlak agar diketahui dengan jelas kemanfaatan kegiatan didalam suatu program.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian Kamid Priyanto yang berjudul Implementasi Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA/SMK Negeri 1 Kebumen. Hasil penelitian ditemukan bahwa:

pertama Program RSBI berupa SDIP (*School Developing and Investment Plan*), merupakan program jangka lima tahun dengan sasaran pengembangan pada komponen-komponen; kurikulum dan proses pembelajaran, penelitian, manajemen sekolah, kesiswaan, Pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana dan kerja sama institusi.

Kedua Implementasi Program RSBI mengacu pada SDIP tertuang pada program kerja tahunan sekolah dengan target sasaran prioritas didasarkan pada sembilan penjaminan mutu RSBI. *Ketiga* pencapaian hasil program di SMA/SMK N 1 Kebumen secara umum dapat dinyatakan semua program dapat memenuhi Sembilan penjaminan mutu RSBI. *Keempat* Beberapa

antara lain: penguasaan kemampuan TIK dan bahasa Inggris SDM guru dan staf masih tergolong rendah, dukungan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang berstandar Internasional baik dari pemerintah kabupaten maupun dari komite sekolah masih belum sesuai yang diharapkan, siswa belum semuanya dapat mengikuti tes berstandar Internasional, baik dari *Cambridge University* maupun dari *ICAS* ataupun yang lainnya. (d) kualifikasi akademik guru S-2 dan tenaga administrasi (minimal SMA/SMK) belum semua memenuhi sesuai ketentuan. Semua ini masih terkait dengan keterbatasan dalam pendanaan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan kualitas SDM guru dan staf melalui berbagai pelatihan, kursus, pemberian subsidi lanjut dan pendekatan kepada Pemkab Kebumen dan komite sekolah. Agar dapat meningkatkan dukungan pendanaannya.

Penelitian Siti Roskina Mas berjudul *Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah (Studi Kasus pada MAN Insan Cendekia Gorontalo)*. Hasil penelitian menunjukkan:

Pertama, Standar Acuan Minimal (SAM) bertujuan memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan MAN Insan Cendekia Gorontalo. SAM berisi tentang Visi dan Misi target dan garis-garis besar yang meliputi standar minimal seluruh bidang yang ada di MAN Insan Cendekia Gorontalo yang bertujuan untuk menjamin mutu internal sekolah, sehingga upaya untuk memperbaiki mutu dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

Kedua, penjaminan mutu bidang kurikulum dan proses pembelajaran dilakukan dengan (1) *treatment* matrikulasi pada mata pelajaran MAFIKIBI, (2) struktur kurikulum mengacu pada *cambridge* khususnya bidang studi MAFIKIBI, desain silabus dan perangkat pembelajaran disusun bersama *team teaching*, mengayakan materi dengan informasi terkini serta memperkaya jenis tagihan, dan penugasan, (3) penggunaan media dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan materi yang akan diajarkan, (4) penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada persyaratan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dari setiap bidang studi dan jenis tagihan yang harus dikerjakan siswa, (5) penentuan jurusan siswa ditetapkan berdasarkan hasil tes psikotes dan ulangan kenaikan kelas, (6) pembimbingan akademik dalam bentuk responsi, tutorial dan bimbingan khusus, (7) pengembangan budaya ilmiah dikemas dalam muatan lokal melalui penulisan KIR dan buku sederhana.

Ketiga, penjaminan mutu bidang kesiswaan berdasar pada: (1) standar penerimaan siswa baru, yang meliputi kriteria berkepribadian mantap, memiliki keimanan yang kuat, sehat jasmani dan rohani, serta lulus tes psikolastik dengan nilai minimal 900, (2) prosedur penerimaan siswa baru, meliputi tahapan masa persiapan, pendaftaran, seleksi tulis, pengumuman kelulusan, tes kesehatan, dan persiapan masuk sekolah bagi yang telah lulus, (3) masa orientasi siswa, dan (4) pembinaan kesiswaan terdiri atas tiga jalur yakni: OSIS penegakan disiplin, dan UKP.

Keempat, peminjaman mutu bidang ketenagaan (guru), dilakukan langkah-langkah strategi antara lain: (1) menetapkan standar minimal guru yaitu lulus tes akademik, *psikologi*, dan *microteaching*, (2) meningkatkan profesionalisme guru dilakukan melalui studi lanjut, peningkatan kualitas pembelajaran maupun spritual yang diprogramkan sekolah, dan secara rutin melakukan kegiatan MGMP, (3) menetapkan standar kinerja guru.

Kelima, peminjaman mutu bidang sarana prasarana terdiri atas pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Sarana prasarana terdiri atas tiga yakni sarana prasarana penunjang utama proses pembelian (kompleks GDP), penunjang pembelajaran (kompleks GA) dan prasarana penunjang. Ketersediaan sarana prasarana tersebut sangat memadai sehingga dapat menjamin lahirnya lulusan-lulusan yang berkualitas.

Keenam, penjaminan mutu bidang keasramaan dilaksanakan berdasarkan standar pembinaan di asrama keasramaan dilaksanakan berdasarkan standar pembinaan di asrama yang meliputi pembinaan hidup berasrama, keagamaan dan kemampuan berbahasa asing. Untuk mengevaluasi kegiatan dituangkan dalam rapot asrama siswa. Pemantauan alumni, dilakukan melalui media dan bertemu langsung. Peran serta alumni terhadap sekolah sangat nyata sekali, sehingga memberikan dampak yang positif kepada adik-adiknya untuk lebih berprestasi.

Penelitian H.M. Lukman Nawawi berjudul peran kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan budaya sekolah unggul di SMKN 3 Lubuk

Linggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah maupun guru telah berperan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Semua telah berperan baik di bidang pengajaran maupun non pengajaran dalam rangka meningkatkan budaya sekolah unggul. Peran sekolah di bidang pengajaran terutama dilakukan dengan mengedepankan prestasi akademik sekolah dan mengembangkan potensi guru dalam bidang akademik. Di bidang non pengajaran dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta menjadikan perilakunya sebagai teladan bagi siswa. Dipihak lain guru memainkan perannya di bidang pengajaran dengan berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan pedagogik. Sedangkan peran dibidang non pengajaran dilaksanakan dengan jalan meningkatkan disiplin di berbagai kegiatan dalam menumbuhkan kepribadian yang ideal seorang guru agar menjadi teladan bagi murid.

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermanus dalam tulisannya yang berjudul “Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional di SMPN 1 Pagar Alam” menyimpulkan bahwa melalui program RSBI ada peningkatan terhadap prestasi siswa dan lulusan, namun dibidang fasilitas sarana dan prasarana, tenaga kependidikan perlu pengembangan agar dapat mewujudkan tujuan sekolah bertaraf Internasional.

Selain itu juga penelitian dilakukan oleh Yuyu Yuhanda dalam Tesis nya yang berjudul “Manajemen Pembelajaran Biologi di SMA Rintisan Bertaraf

Internasional di SMA 4 Curup.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen belum dapat berjalan dengan baik dan belum dapat dilaksanakan, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada, dan belum memenuhi syarat serta standar RSBI.

Dan penelitian Supawit dalam Tesis nya: “Manajemen Kurikulum Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan,” hasil penelitian menunjukkan bahwa visi, misi dan tujuan RSBI SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan telah memenuhi indikator RSBI, perencanaan kurikulum telah memenuhi standar perencanaan kurikulum RSBI.

Penelitian Enbesra Tesis berjudul “Manajemen Penerimaan Siswa Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Studi Kasus di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu,” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen penerimaan siswa baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Kemendiknas No.553/D.D2/MN/2011, yang di dalamnya memuat petunjuk penetapan panitia, penyusunan rencana, masa pendaftaran, seleksi administrasi, tes akademik, tes wawancara dalam bahasa Inggris, tes minat dan bakat, sehingga siswa yang masuk betul-betul siswa pilihan, hal tersebut telah dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

E. Kriteria Evaluasi

Penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan RSDBI SD 2 Centre Curup Kota, akan mengacu kepada kriteria sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Persatuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan RSDBI.
4. SK Dirjendikdasmen RSDBI DEPDIKNAS Nomor: 301/C2/D1/2009 Tentang Penetapan RSDBI.
5. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Untuk jelasnya model dan kriteria penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Model dan Kriteria Penelitian

No	Komponen yang Dievaluasi	Aspek yang Dievaluasi	Kriteria
1	Kebijakan pengembangan kelembagaan RSDBI	1.1. Implementasi kelembagaan (perubahan status)	1.1.1 Kesesuaian dengan perubahan kelembagaan dari regular menjadi RSDBI dengan menerapkan system manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000.

			<p>1.1.2 Kesesuaian struktur organisasi sekolah dengan RSDBI dan memenuhi klausul ISO 9001.</p> <p>1.1.3 Menerapkan system administrasi sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada 8 standar pendidikan.</p>
		1.1 kebutuhan masyarakat terhadap RSDBI	1.2. 1. Kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi kelmbagaan yang ada.
No.	Komponen yang Dievaluasi	Aspek yang Dievaluasi	Kriteria
2	Kebijakan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran RSDBI	2.1 Kurikulum yang digunakan/ yang dirumuskan	2.1.1. Kesesuaian Kurikulum yang digunakan dengan standar isi kurikulum.
		2.2 Dokumentasi persiapan pengajaran	<p>2.2.1 Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan.</p> <p>2.2.2 Memiliki daya saing komparatif yang tinggi dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan lokal ditingkat internasional.</p> <p>2.2.3 Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba ditingkat internasional.</p> <p>2.2.4 Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris.</p>
		2.3 Pelaksanaan Pembelajaran	2.3.1 Terlaksananya pembelajaran dengan langkah-langkah persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.
		2.4 Evaluasi pembelajaran	2.4.1 Adanya dokumen persiapan evaluasi

			pembelajaran yang meliputi kisi-kisi evaluasi, butir instrumen soal, hasil analisis butir soal, bank soal, program pengayaan dan bukti-bukti remedial.
3	Kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat oleh RSDBI	3.1 Pengembangan lingkungan sekolah	3.1.1. Terbentuknya lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas narkoba dan bebas kekerasan.
No.	Komponen yang Dievaluasi	Aspek yang Dievaluasi	Kriteria
		3.2 Kerja sama dengan berbagai pihak	3.2.1. Terbinanya hubungan kerjasama dan kemitraan terhadap berbagai pihak. 3.2.2 Adanya MoU dengan RSDBI Provinsi Bengkulu
4	Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	4. 1. Kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran	4.1.1. Terpenuhinya standar; <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana yang berbasis TIK, - Perpustakaan dengan sarana digital dan akses pembelajaran di seluruh dunia, - Memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung profesionalitas guru, - Memiliki sarana prasarana untuk pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik. - Adanya Lab Bahasa - Adanya Lab Komputer - Adanya Lab IPA
5	Kebijakan pengembangan pembiayaan RSDBI	5.1. APBN Masyarakat Pemda BOS	5.1.1. Memenuhi standar pembiayaan pendidikan 5.1.2. Terbinanya tata kelola keuangan yang transparan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.
2. Mengetahui implementasi kebijakan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.
3. Mengetahui implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat oleh RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.
4. Mengetahui implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.
5. Mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota Kecamatan Curup Kota, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Adapun waktu yang dipergunakan untuk penelitian adalah 8 (delapan) bulan yaitu dimulai awal bulan Mei sampai akhir Desember 2012.

C. Pendekatan, Metode dan Desain Model Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi secara mendalam tentang: (1) Kebijakan terhadap Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional di SD Negeri 2 Centre Curup Kota dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional; (2) Implementasi Kebijakan terhadap Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional di SD Negeri 2 Centre Curup Kota dalam menuju fase kemandirian sebagai Sekolah Dasar Bertaraf Internasional. (3) Ketercapaian implementasi Kebijakan terhadap Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional di SD Negeri 2 Centre Curup Kota.

Berkenaan dengan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dengan demikian informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap, mendalam, dan

dapat dipercaya.⁸⁰

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode evaluatif. Metode evaluatif berfungsi untuk meneliti satu atau dua aspek dari sesuatu hal yang dipetakan secara umum dan luas (*generalis*) menuju penelitian yang lebih khusus (*spesialis*). Penelitian evaluatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.⁸¹

Sedangkan sifat dari penelitian evaluatif adalah merupakan studi kasus yang mempunyai tujuan untuk mengetahui secara mendalam suatu obyek tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual, dengan mengambil obyek penelitian kasus pada institusi/organisasi yang melaksanakan kebijakan.

3. Model Penelitian

Penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota akan menggunakan model penelitian *Stake* atau model *Countenance*. Model tersebut digunakan dengan mempertimbangkan;

- 1) Substansi penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu konsep, *reasoning* dan *out*

⁸⁰ Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 6.

⁸¹ Irawan, Prasetya, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999), h. 60.

comes, 2) Penelitian ini membandingkan antara aspek yang di evaluasi dengan kriteria ukur, atau perbandingan dua matriks yaitu matriks deskripsi dan matriks pertimbangan, dan 3) penggunaan model ini dimaksudkan untuk melengkapi kerangka suatu program. Adapun model penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Model Penelitian

<i>INTENS</i>	<i>OBSEVATION</i>		STANDAR	<i>JUDGEMENT</i>
Mengevaluasi	Pengamatan Terhadap		Mengacu Kepada	Pertimbangan Terhadap
1. Kebijakan pengembangan kelembagaan terhadap RSDBI	1.1. Implementasi Perubahan kelembagaan	<i>ANTE CE DENTS</i>	1.1.2. Adanya perubahan status kelembagaan dari status regular menjadi RSDBI	1.1.4 Kesesuaian dengan perubahan kelembagaan dari regular menjadi RSDBI dengan menerapkan system manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000.
			1.1.3. Perubahan struktur organisasi sekolah	1.1.5 Kesesuaian struktur organisasi sekolah dengan RSDBI dan memenuhi klausul ISO 9001.
			1.1.3 Dilengkapinya sarana dan prasarana sesuai standar	1.1.6 Menerapkan system administrasi sekolah berbasis teknologi

Mengevaluasi	Pengamatan Terhadap		Mengacu Kepada	Pertimbangan Terhadap
			RSDBI	informasi dan komunikasi pada 8 standar pendidikan.
2. Harapan dan Keinginan Masyarakat untuk perubahan kelembagaan	2.1 Kebutuhan Masyarakat		1.2.1. Adanya harapan masyarakat untuk perubahan	1.2.1. Kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan realisasi kelembagaan yang ada.
	2.1. Kurikulum yang digunakan/ yang dirumuskan		2.1.1. Memenuhi standar isi kurikulum 2.1.2. Memenuhi standar kompetensi lulusan	2.1.1. Kesesuaian Kurikulum yang digunakan dengan standar isi kurikulum. 2.1.2.1. Kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. 2.1.2.2. Memiliki daya saing komparatif yang tinggi dibuktikan dengan kemampuan menampilkan keunggulan local ditingkat internasional 2.1.2.3. Kemampuan bersaing dalam berbagai lomba ditingkat internasional 2.1.2.4. Kemampuan berkomunikasi dalam

Mengevaluasi	Pengamatan Terhadap		Mengacu Kepada	Pertimbangan Terhadap
				bahasa Inggris.
	<p data-bbox="561 411 784 495">2.2. Dokumen Persiapan Pengajaran</p> <p data-bbox="561 1346 784 1398">2.3 Pelaksanaan Pembelajaran</p> <p data-bbox="561 1650 784 1703">2.4 Evaluasi pembelajaran</p>		<p data-bbox="930 411 1141 642">2.2 .1. Adanya dokumen Kurikulum dan kelengkapan administrasi persiapan pengajaran.</p>	<p data-bbox="1157 411 1385 642">2.2.1.1 Kesesuaian dengan program tahunan, program semester, silabus dan RPP.</p> <p data-bbox="1157 653 1385 852">2.2.1.2 Kesesuaian dokumen kurikulum dengan standar kompetensi lulusan.</p> <p data-bbox="1157 863 1385 1104">2.2.1.3 Kesesuaian dokumen kurikulum dengan media pembelajaran yang akan digunakan.</p> <p data-bbox="1157 1115 1385 1346">2.2.1.4 Kesesuaian dokumen kurikulum dengan sarana pendukung pembelajaran.</p> <p data-bbox="1157 1356 1401 1650">2.3.1 Terlaksananya pembelajaran dengan langkah-langkah persiapan pembelajaran Pelaksanaan pembelajaran dan Evaluasi pembelajaran</p> <p data-bbox="1157 1661 1385 1860">2.4.1 Adanya dokumen persiapan evaluasi pembelajaran yang meliputi kisi-kisi</p>

Mengevaluasi	Pengamatan Terhadap		Mengacu Kepada	Pertimbangan Terhadap
				evaluasi, butir intrumen soal, hasil analisis butir soal, bank soal, program pengayaan dan bukti-bukti remedial.
3. Kebijakan Pengembangan Lingkungan dan Penguatan Peran Serta Masyarakat oleh RSDBI	3.1 Proses Pengembangan Lingkungan Sekolah		3.1.1. Terbentuknya lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas narkoba dan bebas kekerasan	3.1.1. Terciptanya lingkungan sekolah yg bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan bebas kekerasan
	3.2 Kerja sama dengan Berbagai Pihak		3.2.1. Terbinanya hubungan kerjasama dan kemitraan terhadap berbagai pihak	3.2.1. Terjalinnnya hubungan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak. 3.2.2 Adanya MoU dengan RSDBI Provinsi Bengkulu
4. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan RSDBI	4.1 Kelengkapan Sarana dan prasarana Pembelajaran		4.1.1. -Adanya standar sarana dan prasarana yang berbasis TIK, - Perpustakaan dengan sarana digital dan akses pembelajaran di seluruh dunia,	4.1.1. Terpenuhinya standar - Sarana dan prasarana yang berbasis TIK. - Perpustakaan dengan sarana digital dan akses pembelajaran di seluruh dunia. - Memiliki ruang dan fasilitas untuk mendukung profesional

Mengevaluasi	Pengamatan Terhadap		Mengacu Kepada	Pertimbangan Terhadap
			-Memiliki ruang dan fasilitas	guru. - Memiliki sarana dan prasarana
			untuk mendukung profesionalitas guru dan - memiliki sarana prasarana untuk pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik	- untuk pengembangan potensi akademik dan non akademik peserta didik.
5. Implementasi Kebijakan Pembiayaan RSDBI	5.1. RAPBS RSDBI, penggunaan dana, sumber dana dan tata kelola		5.1.1. Adanya standar pembiayaan pendidikan 5.1.2. Adanya tata kelola keuangan yang transparan	5.1.1 Terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan 5.1.2. Terbinanya tata kelola keuangan yang transparan

Evaluasi pada kebijakan pengembangan kelembagaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota akan dilihat dari implementasi kebijakan Pemerintah Pusat dan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi pada kebijakan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota akan dievaluasi dengan kurikulum yang digunakan atau yang dirumuskan serta implementasi terhadap dokumentasi persiapan pengajaran.

Evaluasi pada kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat oleh RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota akan dievaluasi melalui implementasi pengembangan lingkungan sekolah dan

kerja sama dengan berbagai pihak.

Evaluasi pada kebijakan pengembangan sarana dan prasarana RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dengan mengevaluasi terhadap implementasi kelengkapan prasarana pembelajaran dan kelengkapan sarana pembelajaran.

Evaluasi pada kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota akan dievaluasi melalui Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah (RAPBS) penggunaan dana dan administrasi keuangan.

D. Instrumen Penelitian

1. Kisi-kisi Instrumen

Dalam upaya melakukan penelitian terhadap evaluasi implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, maka kisi-kisi dan instrumennya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kisi-Kisi dan Instrumen Penelitian

No.	Komponen yang dievaluasi	Aspek yang dievaluasi	Nomor Butir Soal	Jumlah Butir Soal
1.	Pengembangan kelembagaan RSDBI	1.1 Perubahan status kelembagaan 1.2 kebutuhan masyarakat terhadap RSDBI	1 2	1 1
2.	Pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran RSDBI	2.1 Standarisasi dan standar kompetensi lulusan RSDBI	3	1

No.	Komponen yang dievaluasi	Aspek yang dievaluasi	Nomor Butir Soal	Jumlah Butir Soal
		2.2 dokumen persiapan pengajaran	4	1
3.	Pengembangan lingkungan sekolah dan kerjasama dengan berbagai pihak	3.1 Penciptaan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas	5	1
		asap rokok dan bebas kekerasan 3.2 Hubungan dan kemitraan terhadap berbagai pihak	6	1
4.	Pengembangan sarana dan prasarana	4. Standar sarana dan prasarana yang berbasis TIK, perpustakaan dengan sarana digital dan akses pembelajaran di seluruh dunia, memiliki ruang dan fasilitas mendukung profesional guru dan pengembangan akademik dan non akademik peserta didik.	7 8 9	1 1 1
5.	Pengembangan pembiayaan RSDBI	5. Standar pembiayaan pendidikan, dan tata kelola keuangan	10 11	1 1

2. Validasi Instrumen

Validasi instrument dimaksudkan untuk memastikan alat ukur yang digunakan dan hasil/temuan data sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan penelitian. Validasi dilakukan dengan cara; 1) mengkonsultasikan

instrument yang akan digunakan kepada pakar tentang permasalahan yang diteliti. 2) memeriksa ulang (*Ree cek*) hasil penelitian yang telah diperoleh kepada responden yang telah diwawancara agar dapat melihat kekurangan, kesalahan terhadap apa yang disampaikan dan 3) menyusun instrument mengacu kepada permasalahan yang diteliti.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan mempedomani kisi-kisi penelitian dan lembar observasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Komponen, aspek yang dievaluasi, pertanyaan, sumber data dan instrument yang digunakan ditampilkan dalam tabel berikut:

Table 3.3

Komponen yang dievaluasi, Pertanyaan, Sumber Data, dan Instrumen yang digunakan

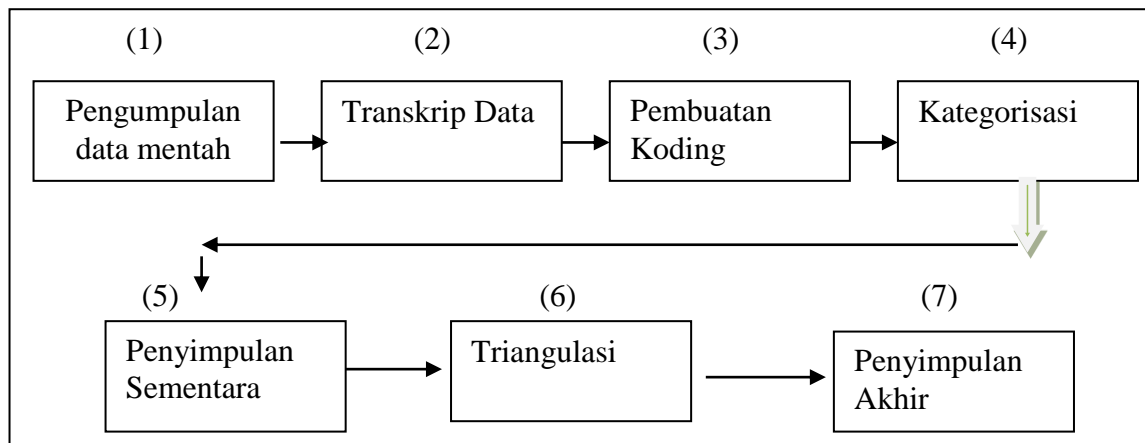
No.	Komponen yang dievaluasi	Aspek yang dievaluasi	Pertanyaan	Sumber Data	Instrument yang digunakan
1.	1.1 Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan RSDBI SD	1.1 Implementasi kelembagaan (perubahan Status)	1.1 Bagaimana kah gambaran perubahan status kelembagaan sekolah?	-Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah -Komite Sekola -Guru	Wawancara Dokumentasi Observasi
		1.2 Kebutuhan Masyarakat	1.2 Bagaimana kebutuhan	-Komite Sekola	Wawancara Dokumentasi

No.	Komponen yang dievaluasi	Aspek yang dievaluasi	Pertanyaan	Sumber Data	Instrument yang digunakan
		terhadap RSDBI	Masyarakat terhadap RSDBI?	-Tokoh masyarakat	
2.	2.1 Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum RSDBI	2.1 Kurikulum yang digunakan/dirumuskan 2.2 Dokumen persiapan pengajaran	2.1 Bagaimana kurikulum yang digunakan? 2.2 Bagaimana kah dokumen	-Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah -Kepala Sekolah	Wawancara Dokumentasi Wawancara Dokumentasi
			Pelaksanaan pembelajaran?	-Wakil Kepala Sekolah	
3.	3.1 Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat	3.1 Pengembangan lingkungan sekolah 3.2 Kerja sama dengan berbagai pihak	3.1 Bagaimana kah pengembangan lingkungan sekolah? 3.2 Bagaiman kah kerja sama yang dilakukan oleh pihak sekolah?	-Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah -Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah	Wawancara Dokumentasi Wawancara Dokumentasi
4.	4.1 Implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	4.1 Kelengkapan prasarana pembelajaran 4.2 Kelengkapan sarana pembelajaran	4.1 Bagaimana kah kelengkapan prasarana pembelajaran? 4.2 Bagaimana kah kelengkapan sarana pembelajaran?	Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah -Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah	Wawancara Dokumentasi Wawancara Dokumentasi
5.	5.1 Implementasi kebijakan pengembangan pembiayaan RSDBI	5.1 RAPBS RSDBI	5.1 Bagaimana kah substansi RAPBS RSDBI?	-Kepala Sekolah -Wakil Kepala Sekolah	Wawancara Dokumentasi
		5.2 Penggunaan dana	5.2 Bagaimana kah gambaran penggunaan dana?	-Kepala Sekolah	Dokumentasi

No.	Komponen yang dievaluasi	Aspek yang dievaluasi	Pertanyaan	Sumber Data	Instrument yang digunakan
		5.3 Administrasi keuangan	5.3 Bagaimanakah administrasi keuangan RSDBI?	-Kepala Sekolah	Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui beberapa langkah. Prasetya Irawan mengurutkan proses analisis data dalam penelitian kualitatif dengan diawali pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan penyimpulan akhir.⁸² Berikut ini disajikan skema untuk lebih mudah memahami proses analisis data:



Gambar 3.1 Proses Analisis Data⁸³

(1) Pengumpulan Data Mentah

⁸² Irawan, Prasetya, (2007). *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP UI. Jenkins, Colin.(1998). *Global Issues: A Necessary Component of a Balanced Curriculum. for the 21st. Century* (In) Hayden, M. C. and Thompson, J.J. Jenkins, W.I. (1978). *Policy Analysis*, Oxford: Martin Robertson.

⁸³ Prasetya Irawan, *Logika Prosedur Penelitian*, (Jakarta: STIA-LAN, 1999), hh. 73-74

Pada tahap pengumpulan data mentah dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan kajian pustaka. Pada tahap ini digunakan alat-alat yang diperlukan seperti *tape recorder* dan kamera. Data mentah adalah data apa adanya tanpa campuran komentar, pikiran, dan pendapat peneliti.

(2) Transkrip Data

Pada tahap ini adalah proses menyalin kembali catatan yang diperoleh pada tahap pengumpulan data mentah.

(3) Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca ulang dengan teliti seluruh data yang sudah ditranskrip. Hal-hal penting yang ditemukan diproses lebih lanjut dengan memperhatikan kata kunci dan memberikan kode-kode tertentu.

(4) Kategorisasi data

Tahap ini merupakan tahap proses penyederhanaan data dengan cara mengikat konsep-konsep tertentu dalam suatu kategori.

(5) Penyimpulan Sementara

Penyimpulan sementara dilakukan dengan berdasarkan pada data tanpa penafsiran dari peneliti. Penafsiran peneliti disampaikan di akhir kesimpulan sementara, yang biasa dikenal dengan istilah *observer's comments* (OC).

(6) Triangulasi

adalah proses *cek* dan *re-cek* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.

(7) Kesimpulan Akhir

Penyimpulan akhir dilakukan setelah peneliti yakin bahwa tidak ada data yang tertinggal. Selain itu, apabila ada penambahan data baru akan mengakibatkan ketumpang tindihan (*redundant*) data yang tidak memberikan arti apa-apa.

Analisis data dilakukan dengan mengkomparasikan antara temuan penelitian dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Evaluasi

Temuan penelitian dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan, pengembangan kurikulum, pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat/ Komite Sekolah, pengembangan sarana dan prasarana dan implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI di Sekolah Dasar Negeri 2 Centre Curup Kota, untuk jelasnya akan di uraikan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu syarat agar lembaga sekolah dapat menjalankan program RSDBI. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan kepala sekolah informasi yang di berikannya adalah:

Lembaga Sekolah yang dapat menyelenggarakan RSDBI, bila mana sekolah dapat mengembangkan status lembaga yang di sertai dengan konsekuensi segenap unsur dalam lingkup sekolah untuk mendukung pengembangan lembaga tersebut.⁸⁴

Kepala sekolah menyadari bahwa untuk dapat menyelenggarakan RSDBI, maka pengembangan status kelembagaan atau peningkatan status lembaga harus dilakukan. Komitmen itu bukan hanya dimaksudkan mendapat

⁸⁴ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 1 Oktober 2012.

pengakuan atau legalitas, akan tetapi disertai dengan upaya segenap pendukungnya baik berupa sarana, finansial, manajemen, sumber daya manusia di berdayakan untuk mendukung komitmen itu. Hal itu juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim pengembang Kelembagaan, yaitu:

Dalam upaya penyelenggaraan RSDBI ini bidang pengembangan kelembagaan menjadi aspek yang terpenting kita pikirkan. Peningkatan status tentu memberi dampak kepada aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini. Upaya pengembangan ini telah kita bawa dalam forum-forum rapat baik kepada Pemerintah Daerah, Komisi Pendidikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komite Sekolah, para guru dan praktisi pendidikan lainnya.⁸⁵

Pernyataan dari Tim pengembang kelembagaan status sekolah di atas mengatakan bahwa pengembangan kelembagaan berupa peningkatan status sekolah telah diperhatikan dengan seksama. Kebijakan ini telah mereka bicarakan kepada Pemerintah Daerah, Komite Sekolah, para guru dan dengan para praktisi pendidikan. Artinya, bahwa Tim pengembang telah merencanakan dengan baik terhadap upaya pengembangan kelembagaan tersebut.

Dalam kaitan ini kepala sekolah menegaskan:

Pada saat ini, lembaga sekolah ini memiliki akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan kategori "A". Artinya hampir semua aspek yang mendukung penyelenggaraan pendidikan ini dapat terpenuhi. Dengan pengembangan lembaga ini, maka statusnya menjadi Rutinitas Sekolah Dasar Berbasis Internasional.⁸⁶

⁸⁵ Wawancara dengan Ketua Tim Pengembangan Status Kelembagaan RSDBI tanggal 1 Oktober 2012.

⁸⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah Tanggal 2 Oktober 2012.

Penjelasan kepala sekolah di atas menjelaskan bahwa status Akreditasi Lembaga ini adalah terakreditasi dengan kategori “A”. Setelah ada pengembangan kelembagaan ini maka nama sekolah telah berubah menjadi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (RSDBI). Lebih lanjut kepala sekolah menerangkan:

- a. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b. Peraturan MENDIKNAS RI Nomor 78 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan SBI pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. SK DIRJEN DIKDASMEN DEPDIKNAS Nomor: 301/IC2/D.I/2009 Tentang Penetapan Sekolah Dasar sebagai RSDBI Tahun 2008.
- d. Tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui komite sekolah.⁸⁷

Informasi yang di peroleh dari kepala sekolah bahwa, kebijakan pengembangan lembaga sekolah ini mengacu kepada ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagai upaya memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat yang disampaikan melalui komitmen sekolah. Untuk lebih memperoleh informasi yang mendalam, penulis melakukan wawancara dengan komite sekolah. Informasi yang diperoleh adalah:

Sebagai pengurus komite sekolah tugas kita adalah memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam hal penunjang terlaksanakannya pembelajaran yang berkualitas. Disamping itu tugas kita adalah menghimpun, menerima keluhan dan harapan

⁸⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 2 Oktober 2012.

orang tua wali murid dan masyarakat pada umumnya. Salah satu harapan mereka itu adalah membuat Sekolah Dasar ini menjadi sebuah Sekolah Dasar dengan kriteria atau standar Internasional.⁸⁸

Menyimak penjelasan di atas, bahwa salah satu pertimbangan pihak Sekolah dalam menetapkan pengembangan kelembagaan sekolah ini adalah harapan dan tuntutan masyarakat. Lebih lanjut komite sekolah melanjutkan:

Harapan masyarakat terhadap RSDBI adalah agar anak-anaknya memiliki wawasan Internasional dan tidak mengagung-agungkan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Disamping itu orang tua mempersiapkan anaknya agar juga dapat melanjutkan pada sekolah tingkat pertama yang sudah bertaraf Internasional.⁸⁹

Dari informasi yang diperoleh, ternyata masyarakat berharap bahwa melalui peningkatan kelembagaan ini, anak-anak mereka di harapkan telah dipersiapkan sejak dari Sekolah Dasar dengan pendidikan bertaraf Internasional. Untuk memastikan apakah harapan masyarakat menjadi pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan, penulis melakukan pelacakan terhadap dokumentasi rapat komite sekolah.

Berdasarkan rapat komite sekolah yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2008, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Adanya berbagai keluhan masyarakat tentang upaya pembelajaran yang aktif terutama untuk mempersiapkan anak menghadapi ujian akhir khususnya kelas VI.
- b. Adanya tuntutan dan keinginan masyarakat terutama oleh orang tua wali murid agar segera melaksanakan Sekolah Bertaraf Internasional.

⁸⁸ Wawancara dengan Komite Sekolah pada tanggal 4 Oktober 2012.

⁸⁹ Wawancara dengan Komite Sekolah pada tanggal 4 Oktober 2012.

- c. Orang tua dan wali murid akan berusaha secara maksimal dalam membantu terlaksananya Sekolah Dasar bertaraf Internasional.
- d. Orang tua dan wali murid merekomendasikan untuk segera membentuk panitia dan Tim pengembang RSDBI.⁹⁰

Dalam penjelasan kepala sekolah, secara rinci kebijakan yang telah diimplementasikan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota adalah:

- a. Pengembangan kelembagaan dengan rincian:
 - 1) Verifikasi ISO (*Audit internal* dan *Audit Eksternal*).
 - 2) Kegiatan operasional implementasi MBS dengan *workshop* dalam kesiapan menghadapi SBI dan era globalisasi.
- b. Pengembangan Organisasi Sekolah, dengan rincian kegiatan:
 - 1) *Workshop* perumusan visi dan misi serta tujuan sekolah.
 - 2) Pemasangan jaringan internet ke seluruh ruang.
 - 3) Pemasangan salon/speaker ruang.⁹¹

Berdasarkan temuan data baik melalui wawancara maupun melalui dokumentasi dapat disampaikan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan baik dari pemerintah pusat dan kebutuhan/kota, serta masukan masyarakat, ini berarti evaluasi terhadap implementasi pengembangan kelembagaan telah sesuai dengan kriteria ukuran evaluasi yang telah ditetapkan.

2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi yang

⁹⁰ Hasil observasi terhadap dokumen rapat komite, observasi tanggal 5 Oktober 2012.

⁹¹ Wawancara dengan kepala sekolah tanggal 8 Oktober 2012.

telah di tetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut kepala sekolah:

Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum mencakup bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Adapun isi dari kurikulum terdiri dari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator. Sekolah telah menyusun perangkat KTSP dokumen I yaitu profil sekolah RSDBI, tujuan pendidikan, visi dan misi sekolah, struktur kurikulum, muatan KTSP dan kalender pendidikan.⁹²

Dalam penjelasan kepala sekola bahwa, pihak sekolah telah mengupayakan pengembangan kurikulum dengan cara menyusun dokumen kurikulum yang meliputi kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator, profil sekolah RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, tujuan sekolah, visi dan misi sekolah. Struktur kurikulum muatan KTSP dan kalender pendidikan.

Dalam bagian lain, kepala sekolah mengatakan:

Struktur pembelajaran RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup kota yang terdiri dari; bidang pengembangan Pembiasaan yang meliputi (1) Moral dan nilai-nilai agama, (2) Sosial, emosional, dan kemandirian. Kamampuan dasar yang meliputi: Bahasa, kognitif, fisik dan motorik, seni, yang diajarkan selama 40 jam per minggu.

Waktu belajar pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota menggunakan beban belajar satu tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan program pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota adalah perencanaan mingguan efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) dengan hitungan 34 minggu, jam belajar efektif adalah 7 jam (280 menit) perhari, hari senin s.d. kamis + sabtu = 5 hari x 7 jam = 35 jam (280 menit) x 5 hari = 1400 menit, hari jumat 6 jam x 40 menit = 240. Jumlah jam perminggu 41 jam (1.640 menit), jumlah jam pertahun 34 minggu x 41 jam = 1.394 jam (55.760 menit).

⁹² Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 8 Oktober 2012

Kalender pendidikan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.⁹³

Dari data yang diperoleh, penulis melihat ada beberapa dokumentasi yang tersedia terkait dengan implementasi kebijakan dalam bidang kurikulum. Dalam penjelasan wakil kepala sekolah implementasi kebijakan dalam bidang kurikulum dimaksudkan untuk:

Mencapai kompetensi dasar, standar kompetensi dan indikator yang telah di gariskan. Dokumen kurikulum merujuk kepada KTSP dari tuntutan yang ada pada Standar Nasional Pendidikan. Pada setiap awal tahun ajaran kami sudah menyusun kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, rapat wali murid, minggu efektif, kegiatan tengah semester, kegiatan ramadhan, pengisian dan pembagian raport, pelepasan anak ke SMP dan hari libur yang dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masing-masing Sekolah Dasar.

Pengembangan silabus pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota berisi uraian tentang perencanaan semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian.

Perencanaan tahunan, RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sudah menyusun perencanaan tahunan yang berisi tema/sub tema, kegiatan inti yang dikembangkan, alokasi waktu pelaksanaan semester I dan semester II.⁹⁴

Dari penjelasan wakil kepala sekolah di atas terungkap bahwa implementasi kebijakan bidang kurikulum di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota terdiri dari kompetensi dasar, standar kompetensi, indikator hasil belajar. Penyusunan kalender pendidikan, pengembangan silabus yang berisi tentang perencanaan tahunan, perencanaan semester, perencanaan

⁹³ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 8 Oktober 2012.

⁹⁴ Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah tanggal 10 Oktober 2012.

mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan tahunan sudah menyusun perencanaan tahun yang berisi tema/sub tema, kegiatan inti yang di kembangkan dan alokasi waktu pelaksanaan semester I dan semester II.

Pada bagian lain, kepala sekolah mengatakan implementasi kebijakan bidang kurikulum secara umum yang telah di lakukan adalah:

- a. *Workshop* penyusunan KTSP, silabus, dan RPP.
- b. *Workshop* pengembangan bahan ajar berkualitas Internasional.
- c. *Workshop* pengembangan bedah SKL, pengembangan pendidikan yang berorientasi PLH, pembelajaran PAKEM dan penyusunan perangkat soal, penilaian dengan multi media.
- d. *Workshop* pembuatan LKS berbahasa Inggris.
- e. *Workshop* pengembangan sistem penilaian.
- f. Peningkatan pengawasan dan memperlancar komunikasi dengan pemasangan, perbaikan air phone ke semua ruang.
- g. Pengembangan dan pelatihan bahasa inggris untuk guru-guru.
- h. Pengembangan wawasan guru dengan pengadaan buku bacaan guru.
- i. Penambahan sarana pembelajaran (penunjang laboratorium).⁹⁵

Implementasi dari kebijakan itu antara lain, terlihat dari:

Program semester, wawancara yang penulis lakukan terhadap guru kelas mengatakan bahwa setiap kelas harus mempunyai program semester yang disusun pada awal semester I dan II, studi dokumentasi juga menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki program semester yang berisi jaringan-jaringan tema/sub tema yang ditata secara urut dan sistimatis, alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema, kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator.

⁹⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 10 Oktober 2012.

Satuan Kegiatan Mingguan (SKM) berisi kegiatan-kegiatan dalam mencapai indikator yang telah direncanakan pada program semester. Hasil wawancara terhadap kepala sekolah dan guru mengatakan semua guru diwajibkan menyusun dan memiliki satuan kegiatan mingguan (SKM). Dari dokumentasi yang penulis lihat bahwa RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota memiliki satuan kegiatan mingguan yang berisi kegiatan-kegiatan dalam mencapai indikator yang telah direncanakan pada program semester.

Satuan kegiatan harian (SKH), adapun komponen yang terdapat dalam SKH adalah kelompok A/B, semester/minggu, tema/sub tema, hari/tanggal, indikator, kegiatan pembelajaran, alat/sumber belajar dan penilaian perkembangan anak yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat dan kegiatan akhir. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa setiap guru sudah menyusun SKH yang dipergunakan sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar, dokumentasi juga menunjukkan bahwa setiap SKH yang digunakan sudah ditanda tangani oleh guru kelompok dan diketahui kepala sekolah sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai.

Penilaian perkembangan anak, guru melakukan penilaian terhadap anak pada setiap kegiatan yang dilakukan seperti tertera dalam SKH, alat penilaian yang digunakan adalah pengamatan, pencatatan anekdot, untuk kerja, hasil karya siswa, penugasan dan portofolio. Hasil penilaian yang dilakukan dimasukkan ke dalam buku bantu penilaian untuk mempermudah guru membuat rangkuman penilaian pada setiap tema

dan membuat laporan kepada wali murid pada setiap semester berupa buku lapor.

Standar pengembangan kurikulum RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota ditetapkan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM) yaitu: (1) Kurikulum program disusun berdasarkan tahap perkembangan anak, (2) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik layanan anak, (3) Kurikulum dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan kepentingan dan kecerdasan anak, (4) Sesuai dengan prinsip pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan setiap anak, sosial budaya, kondisi dan kebutuhan masyarakat, (5) Standar kompetensi peserta didik yaitu memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur, memiliki sikap, perilaku dan kemampuan dasar yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Studi dokumentasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bidang kurikulum mengarah kepada standar penilaian atau kebijakan yang ada.

Bahasa yang digunakan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota semua guru menggunakan bahasa Indonesia dan sebagian guru menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, namun ada kalanya menggunakan

bahasa ibu untuk memperjelas maksud dan tujuan pembelajaran agar memudahkan anak memahaminya.

Pembelajaran yang dilakukan dengan mempedomani satuan kegiatan harian yang sudah disusun sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan sudah diketahui oleh kepala sekolah, dibuktikan dengan adanya tanda tangan kepala sekolah pada setiap SKH yang disusun guru. Sesuai dengan satuan kegiatan harian, pembelajaran dimulai dengan kegiatan awal dibuka dengan salam dan do'a serta kegiatan rutin dilanjutkan dengan pengenalan tema/sub tema dan penyampaian materi sesuai dengan indikator, kegiatan inti dengan kegiatan; guru menerangkan kegiatan yang akan dilakukan kemudian anak bekerja sesuai dengan instruksi guru yang sudah mempersiapkan pembelajaran seperti tertera didalam SKH, kegiatan istirahat; anak bermain di luar kelas dan dilanjutkan dengan menutup pelajaran dengan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini kemudian ditutup dengan do'a dan salam.

Pelaksanaan pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada guru untuk mengembangkannya, yang penting sesuai dengan sistem pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, seperti hasil wawancara penulis terhadap kepala sekolah sebagai berikut:

Proses pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada guru, yang terpenting diingat dan sering ditanamkan kepada guru adalah bagaimana guru bisa menyelenggarakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian para peserta didik sesuai dengan

program pembelajaran yang sudah di susun dan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai pengantar.⁹⁶

Dari observasi yang penulis lakukan proses pembelajaran berjalan dengan sangat menyenangkan, terlihat para siswa begitu bersemangat di dalam mengikuti setiap instruksi dari guru yang membimbing mereka, hal ini tentu tidak terlepas dari persiapan guru yang sudah matang sebelum pembelajaran di mulai, seperti satuan kegiatan harian dengan berbagai model pembelajaran beberapa alat peraga dan alat pembelajaran sudah dipersiapkan guru, begitu pula lembar penilaian perkembangan anak. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian kebijakan pengembangan bidang kurikulum dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Implementasi Kebijakan
dalam Bidang Pengembangan Kurikulum.

No	Aspek	Kondisi Nyata
1	Profil sekolah	Sudah menyusun profil memuat minimal identitas sekolah, visi dan misi, tujuan sekolah, keadaan siswa, kondisi orang tua siswa, data guru sarana dan prasarana sekolah.
2	Visi dan misi sekolah	Sudah ada visi dan misi sekolah sesuai dengan karakteristiknya.
3	Tujuan sekolah	Mempunyai tujuan sekolah secara umum dan khusus yang tertera dalam profil dan ditempel di dinding sekolah.

⁹⁶ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 11 Oktober 2012.

No	Aspek	Kondisi Nyata
4	Kurikulum RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota	Mempunyai kurikulum yang mencakup bidang pengembangan kemampuan dasar dan memuat standar kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator.
5	Struktur program pembelajaran	Mempunyai struktur pembelajaran terdiri dari bidang pengembangan pembiasaan; moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian. Bidang pengembangan kemampuan dasar; bahasa, kognitif, fisik/motorik dan seni.
6	Waktu belajar di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota	Sudah melaksanakan pembelajaran dengan waktu: minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu dengan jam belajar efektif adalah 7 jam (280 menit) perhari, hari senin s.d. kamis + sabtu = 5 hari x 7 jam = 35 jam (280 menit) x 5 hari = 1400 menit, hari jumat 6 jam x 40 menit = 240. Jumlah jam perminggu 41 jam (1.640 menit), jumlah jam pertahun 34 minggu x 41 jam = 1.394 jam (55.760 menit).
7	Kalender Pendidikan	Memiliki Kalender pembelajaran mencakup permulaan tahun ajaran, MOS, minggu efektif, kegiatan ramadhan, kegiatan tengah semester, waktu pembelajaran efektif, pengisian dan pembagian raport dan hari libur.
8	Menyusun dan memiliki silabus RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota	Menyusun dan memiliki silabus yang terdiri dari program tahunan, program semester, satuan kegiatan mingguan dan satuan kegiatan harian.
9	Perancangan tahunan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota	Memiliki perencanaan tahunan berisi tema/sub tema kegiatan inti yang dikembangkan, alokasi waktu pelaksanaan semester I dan II.
10	Perencanaan semester	Semua guru menyusun dan memiliki program semester yang berisi jaringan-jaringan tema/sub tema yang ditata secara urut dan sistematis, alokasi

No	Aspek	Kondisi Nyata
		waktu yang diperlukan untuk setiap jaringan tema, kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator.
11	Perencanaan mingguan/satuan kegiatan mingguan (SKM)	Semua guru menyusun dan memiliki satuan kegiatan mingguan (SKM). Berisi kegiatan-kegiatan dalam mencapai indikator yang telah direncanakan pada program semester dengan model pembelajaran kelompok dan berdasarkan minat dengan sistem area.
12	Perencanaan harian/satuan kegiatan harian	Semua guru sudah menyusun SKH sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan dibuktikan dengan sudah ditanda tangani oleh guru dan diketahui kepala sekolah yang menggambarkan kegiatan dalam satu hari berisi keterangan kelompok, semester/minggu, tema/sub tema berisi hari/tanggal, indikator, kegiatan pembelajaran, alat/sumber belajar dan penilaian perkembangan anak yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, istirahat dan kegiatan akhir.
13	Penilaian perkembangan anak	Semua guru melakukan penelitian perkembangan anak dengan alat observasi, hasil kerja, hasil karya penugasan dan portofolio, seperti yang tertera dalam SKH dan kumpulan hasil kerja.
14	Pengembangan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota	Sudah mengembangkan kurikulum berdasarkan tahap perkembangan anak, sesuai dengan prinsip pembelajaran bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain, memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan setiap anak, sosial budaya, kondisi dan kebutuhan masyarakat.
15	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum	Pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan menyenangkan mempedomani SKH yang disusun dan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan temuan data baik melalui wawancara maupun dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam hal pengembangan

kurikulum telah diusahakan dan memenuhi standar evaluasi yang telah ditetapkan.

3. Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat

Pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, bersih yang dapat mendukung proses pembelajaran secara baik dan lancar. Menurut kepala sekolah, kegiatan yang telah dilakukan adalah:

- a. Pengembangan Lingkungan dan Budaya Sekolah
 - 1) Menata lingkungan fisik.
 - 2) Menata lingkungan sekolah sehat program 7 K.
 - 3) Memelihara kebersihan secara terus.
- b. Penguatan Peran Masyarakat
 - 1) Pertemuan dengan komite sekolah dan Tim Pengembang.
 - 2) Penggandaan dokumen kerja sama dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait.⁹⁷

Pada bagian lain kepala sekolah mengatakan: untuk mewujudkan kebijakan pengembangan lingkungan dan peran serta masyarakat, kami telah melakukan:

- a. Mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, dan bebas budaya kekerasan.
- b. Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, dan keunggulan.
- c. Mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.

⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 12 Oktober 2012.

- d. SBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan dibidang bahasa inggris dan/atau bahasa asing lainnya dan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya.⁹⁸

Pada bagian lain, komite sekolah mengatakan bahwa:

Dalam upaya pengembangan lingkungan sehat dan membina daya dukung masyarakat sebagaimana di persyaratkan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, kegiatan nyata yang telah dibuat oleh sekolah atas kerja sama dengan komite sekolah adalah:

- a. Pembuatan taman.
- b. Pemasangan karpet pengaman lantai.
- c. Pembelian alat-alat kebersihan.
- d. Pengadaan stabilizer untuk kenyamanan belajar.
- e. Mengecat dinding, halaman/tembok sekolah dan kamar mandi atau WC siswa dan guru.
- f. Membuat tulisan (reklame) yang berkaitan dengan program sekolah sehat, yang ditempatkan pada beberapa bagian.
- g. Menempatkan petugas pengamanan sekolah.
- h. Menempatkan guru piket pada meja piket yang dapat segera terlihat ketika tamu datang kesekolah.
- i. Memberikan pengawasan yang terpadu.
- j. Semua guru dan petugas sekolah menggunakan identitas yang resmi.
- k. Menyediakan ruangan berobat/UKS yang memadai.
- l. Membina hubungan kerja sama dengan orang tua wali murid dan masyarakat lain yang menaruh perhatian dalam bidang pendidikan.⁹⁹

Berdasarkan temuan data di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan dalam bidang pengembangan lingkungan dan penguatan peran

⁹⁸ Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah tanggal 12 Oktober 2012.

⁹⁹ Wawancara dengan komite Sekolah tanggal 14 Oktober 2012.

serta masyarakat, pihak sekolah telah melakukan beberapa kegiatan seperti menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba dan bebas budaya kekerasan. Disamping itu telah membangun budaya yang mengarah kepada kemampuan di bidang Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Serta membina hubungan harmonis terhadap orang tua wali murid dan masyarakat pemerhati pendidikan.

Oleh sebab itu, implementasi dalam bidang pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat telah memenuhi standar yang di pertanyakan. Unsur yang belum terpenuhi adalah kerja sama dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi yang diakui di negerinya.

4. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota merupakan dampak dari berubahnya status sekolah menjadi sekolah dasar dengan status Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional. Dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan, penulis melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana.

Dalam penuturan kepala sekolah terungkap bahwa:

Kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana diupayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yang dapat kami usahakan. Pada bidang prasarana tidak begitu menjadi beban bagi kami karena prasarana cukup tersedia.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 13 Oktober 2012.

Dalam penuturan kepala sekolah di atas, bidang sarana dan prasarana akan diupayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yang ada pada mereka. Bidang prasarana tidak begitu menjadi perhatian karena prasarana telah tersedia, namun bidang sarana atau yang berhubungan langsung dengan pembelajaran menjadi fokus yang mereka perhatikan dan diusahakan. Lebih lanjut kepala sekolah mengatakan:

Bagian yang membedakan status kelembagaan sekolah adalah sarana pendukung pembelajaran. Baik barang yang bergerak maupun tidak, dan barang habis dipakai maupun tidak habis dipakai, diupayakan mengacu kepada standar yang dipersyaratkan. Misalnya ruang belajar, mebiler (meja, kursi, lemari dan papan tulis), alat peraga, alat bantu pembelajaran baik manual maupun berbasis Teknologi Informasi (TI), buku laporan hasil belajar (Buku Rapot), buku-buku penunjang pembelajaran baik pegangan guru maupun untuk siswa, buku Lembaran Kerja Siswa (LKS), laboratorium, ruang keterampilan dan sebagainya.¹⁰¹

Pihak sekolah melalui kepala sekolah sangat menyadari bahwa sarana yang perlu dipenuhi standar RSDBI adalah sangat banyak. Terutama berkaitan langsung dengan pembelajaran seperti mebiler, media pembelajaran, buku-buku pembelajaran, laboratorium dan sebagainya.

Dalam hal ini komite sekolah mengatakan:

Kebijakan yang kami berikan kepada pihak sekolah dalam upaya memenuhi standar sarana dan prasarana ini adalah dengan rapat komite sekolah dan bersama-sama mencari solusinya. Salah satunya adalah dengan bersedia membantu sesuai mufakat dari musyawarah komite. Hal ini dilakukan karena komite menyadari pihak sekolah belum mampu memenuhi ketentuan sarana dan prasarana yang diperlukan.¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 15 Oktober 2012.

¹⁰² Wawancara dengan Ketua Komite tanggal 16 Oktober 2012.

Melihat kondisi kemampuan keuangan sekolah yang kurang mampu memenuhi standar sarana dan prasarana yang ada, maka komite sekolah melakukan musyawarah dan mufakat untuk membantu sekolah yang dalam upaya memenuhi standar sarana dan prasarana yang ada. Dalam hal ini salah seorang orang tua murid mengatakan:

Kami tahu bahwa kalau sekolah bertaraf Internasional itu agak beda ruang belajar, tempat duduk dan meja belajarnya, pakaian sekolah dan buku-bukunya. Karena itu kami musyawarah bersama dengan orang tua murid lainnya.¹⁰³

Salah satu bentuk kebijakan yang diambil pihak sekolah dalam memenuhi standar sarana dan prasarana adalah bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk mencari solusi secara bersama-sama. Salah satu solusi yang disepakati oleh orang tua wali murid adalah membantu memenuhi kebutuhan yang ada sesuai dengan hasil mufakat dan kemampuan yang ada. Dalam hal ini kepala sekolah juga mengatakan:

Kebijakan lain dalam bidang sarana dan prasarana selain bantuan pemerintah adalah meminta bantuan kepada pihak-pihak yang memperhatikan pendidikan untuk menjadi donatur. Akan tetapi saat ini kegiatan ini belum memperlihatkan hasil yang memadai.¹⁰⁴

Kebijakan lain yang ditempuh oleh pihak sekolah dalam hal sarana dan prasarana adalah meminta pihak-pihak yang menaruh perhatian dalam dunia pendidikan menjadi donatur, namun hingga saat ini belum memberikan hasil

¹⁰³ Wawancara dengan Orang tua Murid tanggal 16 Oktober 2012.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 16 Oktober 2012.

yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana saat ini dalam penuturan kepala sekolah adalah:

Ruang belajar sudah kita bedakan dengan ruang belajar biasa, di mana lantai di atas karpet, tempat duduk dan meja tidak lagi berpasangan tetapi sudah sendiri-sendiri sehingga dapat di pindah-pindahkan sesuai kebutuhan kepentingan pembelajaran, tersedia galon air untuk dipergunakan siswa baik air dingin maupun hangat, rak tempat sepatu, ruang belajar sudah menggunakan pendingin ruangan (AC), loker untuk tempat menyimpan buku-buku atau bahan-bahan pelajaran siswa sudah tersedia. Ruang belajar yang telah ditata dan disiapkan hanya dari kelas I hingga kelas IV sedangkan kelas V dan VI masih seperti biasa. Kelas I hingga kelas IV memang telah dalam kategori RSDBI sementara kelas V dan VI masih berstatus sekolah biasa. Sarana yang belum terpenuhi saat ini adalah buku-buku pembelajaran baik untuk murid maupun guru, kemudian media pembelajaran terutama berbasis Teknologi Informasi (TI).¹⁰⁵

Informasi yang diperoleh dari kepala sekolah di atas, mengatakan bahwa sarana pendukung pembelajaran untuk RSDBI yaitu kelas I hingga kelas IV, dimana ruangan belajar sudah menggunakan pendingin ruangan/AC, meja kursi sendiri-sendiri yang dapat diangkat/dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan, tersedia galon air untuk membantu kebutuhan guru dan siswa, locker untuk menyimpan barang-barang keperluan belajar untuk masing-masing siswa. Tetapi untuk saat ini yang masih termasuk kurang adalah buku-buku pembelajaran terutama berbasis teknologi informasi.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 16 Oktober 2012.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang kebijakan pemerintah, pihak sekolah dan komite maka penulis melakukan observasi terhadap sarana dan sumbernya. Dalam hal ini diperoleh fakta bahwa:

Kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan dikucurkan dana bantuan; tahun pertama (2009/2010) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun kedua (2010/2011) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahun ketiga (2011/2012) tidak ada bantuan, dan tahun keempat (2012/2013) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi memberi bantuan berupa: Alat Tulis Kantor (ATK), Sampul Raport, Mebiler berupa meja kursi loker dan papan tulis, Insentif guru honor, laptop, AC, LCD dan Komputer. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong berupa; Pagar sekolah dan Gapura, meja kursi siswa, laptop dan printer serta auning depan kantor.¹⁰⁶

Disamping itu ditemukan pula, fakta bahwa:

Untuk menunjang pihak sekolah dalam memenuhi standar sarana dan prasarana, maka setiap siswa yang diterima masuk dikenakan biaya sumbangan orang tua murid; tahun pertama (2009/2010) sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per wali murid, tahun kedua (2010/2011) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perwali murid, tahun ketiga (2011/2012) Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) perwali murid, dan tahun keempat (2012/2013) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) perwali murid, dan uang komite (SPP) tahun pertama 2009/2010) sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) persiswa perbulan, tahun kedua (2010/2011) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa perbulan, tahun ketiga (2011/2012) sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) persiswa perbulan, dan tahun keempat (2012/2013) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa perbulan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Hasil observasi tanggal 17 Oktober 2012.

¹⁰⁷ Hasil observasi tanggal 17 Oktober 2012.

Pada bagian lain, kepala sekolah mengatakan:

Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan antara lain dengan kegiatan:

- a. Mengadakan peralatan pendidikan yang lengkap dengan tuntutan sekolah bertaraf Internasional.
- b. Mengadakan perangkat media pendidikan untuk keperluan pembelajaran dan administrasi sekolah.
- c. Mengadakan buku sekolah (buku teks pelajaran, buku referensi, dan buku bacaan) baik untuk siswa maupun guru.
- d. Membangun ruang/tempat pusat sumber belajar guru yang lengkap dengan fasilitas/isinya (komputer, jaringan internet, buku sumber, VCD, meja kursi kerja, rak buku).
- e. Membuat ciri khas SBI-SD Negeri 2 Centre Curup Kota yang bersifat monumental dan fasilitas tempat bermain, kreasi dan rekreasi di sekolah.
- f. Melaksanakan pembangunan/rehab ruang perpustakaan/ UKS/ ruang Pimpinan dan bangunan/ruang lain yang diperlukan.¹⁰⁸

Pada bagian lain kepala sekolah mengatakan:

- a. Rehabilitas Ruang Lab Bahasa, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pemasangan teralis pintu dan jendela ruang lab bahasa.
 - 2) Pengecatan ruang lab bahasa dan komputer.
 - 3) Instalasi listrik ruang lab bahasa dan komputer.
- b. Pengadaan Sarana Laboratorium Bahasa dan Laboratorium Komputer
 - 1) Laboratorium komputer dengan perangkat komputer sejumlah rombel.
 - 2) Pengadaan Printer.
 - 3) Pengadaan sound system.
 - 4) Pemasangan jaringan telpon dan internet.
- c. Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi Anak SD
 - 1) *Oxford Ensiklopedia Pelajar*.
 - 2) *Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
 - 3) *Science Experiments*.
 - 4) *Ilmu Pengetahuan Populer*.
 - 5) *Seri Mengenal Ilmu*.
 - 6) *Scholastic Children Dictionary*.
 - 7) *Grolier Student Encyclopedia*.
 - 8) *Disneys World*.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 17 Oktober 2012.

Pada Tahun 2012 dilakukan pula:

- a. Rehabilitasi Ruang Lab Komputer, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pemasangan teralis jendela.
 - 2) Pemasangan teralis pintu.
 - 3) Pemasangan Eternit/Plafon.
 - 4) Tambahan Daya Listrik.
- b. Pengadaan Sarana Lab Bahasa dan Lab Komputer
 - 1) Laboratorium Bahasa Multimedia.
 - 2) Mesin Fax.
 - 3) Printer.
- c. Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi Anak SD
 - 1) *Grolier Student Encyclopedia*.
 - 2) *Science Experiments*.
 - 3) *Disneys Wold & Audio CD*.
 - 4) *Scholastic Childer Dictionary*.
 - 5) *Oxford Ensiklopedia Pelajar*.
 - 6) Ilmu Pengetahuan Populer.
 - 7) Sesi mengenal ilmu.
 - 8) Ensiklopedia IPTEK.¹⁰⁹

Setelah melakukan wawancara dan observasi, secara umum kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Kondisi Sarana dan Prasarana
RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota**

No	Aspek	Kondisi Nyata
1	Standar lokasi	Lokasinya di kecamatan kota cukup aman, bersih, dekat pemukiman penduduk, muda transportasi dan terjaga kebersihannya.
2	Luas tanah, luas bangunan dan luas halaman	Tanah 5.000 m ² Bangunan 1.355 m ²

¹⁰⁹ Wawancara denga Kepala Sekolah tanggal 19 Oktober 2012.

No	Aspek	Kondisi Nyata
3	Ruang kelas	Cukup refresentasi dan sesuai Dengan kebutuhan
4	Ruang kantor/kepala	Cukup
5	Ruang dapur	Memiliki satu ruang dapur dengan perabotan seperti: kompor, rak piring, gelas, sendok, dll.
6	Ruang UKS	Memiliki satu ruang UKS dengan peralatannya seperti obat-obatan, kotak P3K, timbangan, alat ukur
		Tinggi badan, tempat tidur.
7	Ruang pustaka	Memiliki ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan Buku perpustakaan untuk guru dan untuk murid seperti buku-buku cerita bergambar, buku gambar seri dan lain-lain.
8	Ruang gudang	Memiliki gudang untuk menyimpan barang-barang yang jarang dipakai.
9	Kamar mandi/WC guru dan anak	Memiliki kamar mandi/WC guru kamar mandi/WC anak.
10	Tempat cuci tangan	Memiliki tempat cuci tangan yang airnya mengalir.
11	Fasilitas perabot ruangan	Belum memiliki fasilitas prabotan ruangan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan anak.
12	Alat peraga dan alat permainan di dalam kelas	Belum tersedia lengkap alat peraga dan alat permainan di dalam kelas sebagai pendukung pembelajaran.

Atas dasar temuan penelitian baik melalui wawancara maupun dokumentasi, kebijakan yang dilakukan dalam bidang sarana dan prasarana baik yang dilakukan pemerintah, pihak sekolah dan komite sekolah belum sesuai dengan kriteria penelitian. Hal ini disebabkan masih adanya

kekurangan sarana dalam belajar serta beberapa sarana masih di perhitungkan pengadaannya dari sumbangan wali murid.

5. Implementasi Kebijakan Pembiayaan

Implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dalam menuju Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dalam penuturan Kepala Sekolah adalah:

Dalam operasional RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota menerima bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tahun pertama, digunakan untuk pembuatan laboratorium computer, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahun kedua, digunakan untuk melengkapi peralatan laboratorium bahasa, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahun ketiga diperuntukkan membeli perlengkapan sonsystem dan karvet lantai dan Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tahun keempat digunakan untuk membeli laptop, printer dan infocus (LCD). Untuk mencukupi dana yang dibutuhkan, maka setiap calon siswa yang diterima memberi bantuan atau dikenakan uang pangkal sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tahun pertama, Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tahun kedua, Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tahun ketiga dan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tahun keempat. Kemudian untuk bantuan setiap bulanya di bebaskan kepada siswa/murid sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) tahun pertama, Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tahun kedua, Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) tahun letiga, dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tahun keempat, setiap bulan setiap anak.¹¹⁰

Dari hasil studi dokumentasi yang peneliti lakukan terhadap RAPBS (Rencana Anggaran Pembiayaan Sekolah) diketahui bahwa biaya program dirinci atau didistribusikan untuk pembiayaan pelaksanaan sesuai dengan

¹¹⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 19 Oktober 2012.

kebutuhan atau skala prioritas. Biaya program dirinci secara detail dan dipergunakan untuk biaya investasi seperti pengadaan sarana dan prasarana, perabot, alat peraga dan alat permainan dan peningkatan profesi kepala, guru dan pegawai, biaya operasi seperti ATK, pemeliharaan sarana prasarana, daya dan jasa, pengadaan dan mengikuti berbagai kegiatan, biaya personal seperti gaji/honor pegawai. Besarnya biaya untuk tiap kegiatan tidak sama sesuai beban kegiatan. Penentuan besarnya biaya tiap pos kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, kesepakatan dengan komite sekolah. Terdapat penanggung jawab tiap pos kegiatan, yang difungsikan secara maksimal atas persetujuan kepala sekolah.

RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota memiliki catatan tahunan berupa dokumen inventaris sarana dan prasarana secara menyeluruh selama tiga tahun terakhir. Studi dokumentasi menunjukkan bahwa RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota memiliki catatan tahunan berupa dokumen inventaris sarana dan prasarana secara menyeluruh dan dibukukan pada tiap tahun hal ini terlihat pada satu tahun terakhir dibuktikan dengan dokumentasi buku inventaris barang.

Biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi biaya pendidikan berkelanjutan. Pelatihan seminar dan lain-lain yang dibiayai oleh pemerintah. Hasil studi dokumentasi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sudah mengalokasikan dana untuk biaya pendidik dan tenaga

kependidikan meliputi biaya pendidikan berkelanjutan seperti kelompok kerja kepala sekolah (KKKS) dan kelompok kerja guru (KKG) dan supervisi pengawas, sedangkan untuk biaya penelitian/penataran dan seminar tidak ada dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBS) RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.

Biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota misalnya: pengadaan pensil, pena, penghapus, penggaris, kertas, buku tulis, buku gambar, buku administrasi, penggandaan/photo copy. Hasil studi dokumentasi di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sudah membelanjakan pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran misalnya: pengadaan pensil, pena, penghapus, penggaris, kertas, buku tulis, buku gambar, buku administrasi, penggandaan/photo copy yang dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RAPBS dan dokumen laporan keuangan.

Biaya pengadaan rapat selama satu tahun terakhir, biaya yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan rapat antara lain: rapat wali murid, guru dan komite pada awal dan akhir tahun pelajaran. Hasil studi dokumentasi di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota menunjukkan bahwa sekolah telah mengeluarkan biaya yang dibelanjakan untuk kegiatan rapat awal dan akhir tahun dengan dibuktikan adanya alokasi dana dalam RAPBS dan dokumen laporan keuangan biaya rapat.

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan pemberlajaran antara lain: pengadaan alat peraga, penyusunan program pembelajaran, buku teks/majalah. Sudah membelanjakan antara lain pengadaan alat praga, penyusunan program pembelajaran buku teks/majalah yang dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RAPBS dan dokumen laporan keuangan.

Biaya pengadaan barang inventaris. Membelanjakan pengadaan barang inventaris misalnya, perabotan ruangan dan media pembelajaran. Hasil studi dokumentasi tidak semua membelanjakan pengadaan barang inventaris seperti yang tertera di RAPBS, menurut seorang kepala sekolah menyebutkan apa yang sudah direncanakan dalam RAPBS dalam kenyataannya biaya tidak mencukupi untuk membeli/mengadakan barang inventaris seperti yang sudah direncanakan.

Biaya pembelanjaan daya dan jasa seperti: listrik, air bersih, telepon dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Hasil studi dokumentasi dan observasi di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota yang membelanjakan daya, air bersih, telepon, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibuktikan dengan adanya nota pembelian barang dan laporan keuangan.

Membayar gaji/honor tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Hasil studi dokumentasi di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota hanya mengeluarkan honor tenaga kependidikan bagi tenaga honorer. Seperti guru honor, petugas kebersihan, petugas keamanan.

Pembelajaan dana untuk kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan yang dibiayai oleh RSDBI adalah: Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), lomba pembelajaran dan lomba olahraga/proses pembelajaran dan ekstra kurikuler. Hasil dokumentasi memperlihatkan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sudah membelanjakan untuk kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sedangkan untuk biaya kegiatan lomba pembelajaran dan lomba olahraga dana yang dipersiapkan dalam RAPBS belum mencukupi untuk mengikuti semua kegiatan yang diadakan diberbagai tempat.

Biaya operasional RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota digunakan untuk: Kesejahteraan warga sekolah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kegiatan ketatausahaan. Hasil studi dokumentasi di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, pemanfaatan biaya operasional sekolah hanya untuk: sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk kesejahteraan warga sekolah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, kegiatan ketatausahaan belum dapat terpenuhi secara baik.

Pemungutan biaya pendidikan dari peserta didik RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota antara lain: pendaftaran siswa baru, uang alat pembelajaran, uang bangunan, SPP, uang buku/majalah, uang pakaian dan uang perpisahan, yang dibuktikan dengan adanya surat penetapan biaya.

Pengelolaan pembiayaan dan alokasi dana. Hasil wawancara dan studi dokumentasi RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota. Mekanisme pengelolaan dana dilakukan secara sistematis, transparan, efisien dan akuntabel. Dalam Pengelolaan Pembiayaan Jumlah dan alokasi dana RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dicatat dalam buku kas digunakan sesuai dengan program dan dipertanggungjawabkan setiap tahun anggaran/tahun pelajaran secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah, dan guru. Jenis sasaran yang dibiayai adalah kegiatan akademik dan non akademik, ini tergambar dalam dokumentasi yang peneliti peroleh dari kepala sekolah. Pada ratio pengeluaran dan pemasukan keuangan, adanya keseimbangan besarnya pengeluaran dan pemasukan keuangan. Sedangkan pada perangkat administrasi keuangan, ada buku pemasukan dan pengeluaran yang lengkap. Ada dokumentasi pengeluaran, seperti kwitansi, nota pembelian barang dan lain-lain. Ada perangkat pelaporan pengeluaran dana, sehingga ini menjadi pedoman dalam mengeluarkan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, adalah:

Pengelolaan keuangan dicatat dalam buku kas dan dipergunakan sesuai kebutuhan, dilakukan secara transparan antara kepala sekolah guru, dan komite sekolah, dipertanggungjawabkan setiap bulannya kepada pemerintah dan kepada komite sekolah setiap akhir tahun pelajaran.¹¹¹

¹¹¹ Wawancara dengan Kepala Sekolah tanggal 21 Oktober 2012.

Penyusunan RAPBS melibatkan stakeholders, yaitu: komite sekolah, kepala sekolah dan perwakilan guru. Studi dokumentasi dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Tanggung jawab dan sumber pembiayaan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dilakukan oleh pemerintah berbentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah/PNS, dan bantuan lain. Pembiayaan juga merupakan tanggung jawab Pemerintah, berupa gaji. Masyarakat juga memberikan bantuan kepada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, penentuan besarnya dana yang dapat dihimpun dari masyarakat untuk membantu penyelenggaraan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan komite.

Berdasarkan diskripsi hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat dirangkum hasil penelitian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Keterpenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pembiayaan

No	Aspek	Kondisi Nyata
1	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen inventaris sarana dan prasarana secara menyeluruh	Memiliki catatan tahunan berupa dokumen inventaris sarana dan prasarana secara menyeluruh selama satu tahun terakhir yang dibuktikan dengan dokumentasi buku inventaris barang.

No	Aspek	Kondisi Nyata
2	Biaya untuk pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan berdasarkan Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah	Sudah mengalokasikan dana untuk biaya pendidik dan tenaga kependidikan meliputi biaya pendidikan meliputi biaya pendidikan lanjut (KKKS, KKG) dan supervisi pengawas sedang untuk biaya pelatihan/penataran dan seminar tidak ada dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3	Biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran	Sudah membelanjakan untuk pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran. Misalnya: pengadaan pensil, pena, penghapus, penggaris, kertas, buku tulis, buku gambar, buku administrasi, penggandaan/ photo copy. Dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RAPBS nota pembelian barang dan dokumen laporan keuangan.
4	Biaya untuk menunjang kegiatan pembelajaran	Sudah membelanjakan antara lain pengadaan alat peraga, penyusunan program pembelajaran buku teks/majalah. Dapat dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RAPBS dan dokumen laporan keuangan.
5	Biaya penggandaan bahan rapat selama satu tahun terakhir.	Membelanjakan untuk kegiatan rapat yang dapat dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RAPBS dan dokumen laporan keuangan biaya rapat.
6	Biaya pengadaan barang inventaris	Dapat membelanjakan pengadaan barang inventaris seperti yang tertera di RAPBS, dibuktikan dengan adanya alokasi dana dalam RAPBS dan adanya nota pembelian barang.
7	Biaya Pembelanjaan daya dan jasa	Membelanjakan daya, air bersih, telepon, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

No	Aspek	Kondisi Nyata
8	Membayar gaji/honor tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji	Hanya mengeluarkan honor tenaga kependidikan bagi tenaga honorer.
9	Pembelanjaan dana untuk kegiatan kesiswaan	Sudah membelanjakan untuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sedangkan kegiatan lomba pembelajaran dan lomba olahraga dilakukan pungutan pada wali murid yang anaknya berminat mengikuti lomba.
10	Biaya operasional	Biaya oprasional Sekolah hanya untuk: Sarana prasarana Pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran Sedangkan untuk biaya Kesejahteraan warga sekolah, pengembangan guru dan tenaga kependidikan, kegiatan ketatausahaan tidak terdapat bukti pengeluaran dan kwitansi penggunaan dana
11	Pemungutan biaya pendidikan dari peserta didik	Memungut biaya pendaftaran siswa baru, uang alat pembelajaran, uang bangunan, SPP, uang buku/majalah, uang pakaian dan uang perpisahan. Dibuktikan dengan surat penetapan biaya dari komite sekolah.
12	Pengolahan pembiayaan dan alokasi dana	Mekanisme pengelolaan dana dilakukan secara sistematis, transparan, efisien dan akuntabel.
13	Penyusunan RAPBS melibatkan stakeholders	Sudah melibatkan stakeholders, komite sekolah, kepala sekolah dan perwakilan guru. Jawaban dibuktikan dengan adanya undangan rapat penyusunan RAPBS.
14	Tanggung jawab dan sumber pembiayaan	Tanggung jawab dan sumber pembiayaan di RSDBI dilakukan oleh pemerintah berbentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai pemerintah/PNS Pembiayaan juga merupakan tanggung jawab pemerintah berupa gaji tenaga

No	Aspek	Kondisi Nyata
		honorar, pembiayaan kegiatan guru dan siswa. Masyarakat juga memberikan bantuan kepada RSDBI berupa iuran.
15	Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan	Pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara transparan setiap bulan pada pemerintah dan setiap tahun kepada komite dan setiap memperoleh bantuan kepada pemerintah.

Berdasarkan temuan penelitian baik melalui wawancara maupun melalui dokumentasi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masalah pembiayaan sudah sesuai standar yang dipersyaratkan.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan

Kebijakan pengembangan kelembagaan pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota berlandaskan pada: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 61 Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang

menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf Internasional. (3) Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf Internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengembangkan SD Negeri, SMP, SMA, SMK yang bertaraf Internasional di seluruh Indonesia mencapai 1.305 sekolah.¹¹²

Program rintisan sekolah bertaraf Internasional masih menjadi sesuatu program yang belum dipahami oleh masyarakat. Padahal sukses pelaksanaan program ini sangat tergantung pada kerjasama antar semua pihak. Rintisan sekolah bertaraf Internasional sering diindikasikan sebagai sekolah mahal sehingga animo masyarakat terhadap sekolah ini mulai berkurang. Apalagi bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang menengah ke bawah. Pandangan masyarakatpun mulai memburuk ketika banyaknya pemberitaan di media massa yang menonjolkan sisi negative penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf Internasional. Keberadaan SBI merupakan amanat Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan: "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan

¹¹² KOMPAS, Rabu, 09 Januari 2013

menjadi sekolah yang bertaraf Internasional”. Selanjutnya dalam Pasal 61 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan “Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf Internasional”.

Lahirnya program sekolah bertaraf Internasional tidak lepas dari kondisi mutu pendidikan yang hingga kini masih memperhatikan. Melalui program sekolah bertaraf Internasional, Kementerian Pendidikan Nasional bertekad memperbaiki mutu pendidikan agar mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain di kanca Internasional. Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan Negara-negara lain, sehingga mutu lulusannya memiliki daya saing yang tinggi di tingkat Internasional. Meskipun secara yuridis keberadaan sekolah bertaraf Internasional sudah ditegaskan pada tahun 2003 melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN), namun pengembangan kelembagaan penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baru keluar empat tahun kemudian. Lewat buku pedoman pengembangan kelembagaan sekolah bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, bahwa “Sekolah Bertaraf Internasional merupakan sekolah/madrasah yang sudah memenuhi seluruh standar pendidikan salah satu Negara OECD (*Organization For Economic*

Cooperation and Depelopmen) dan/atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing di forum Internasional.

Standar nasional pendidikan terdiri dari delapan komponen, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Bagi RSBI, pemenuhan delapan SPN ini merupakan indikator kunci minimal. Indikator tambahan atau plus-nya adalah acuan standar pendidikan dari Negara-negara anggota OECD atau Negara-negara maju lainnya. Dalam proses pembelajaran, untuk mata pelajaran kelompok sains harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (*bilingual*). Kegiatan pembelajaran harus berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi). Oleh karena itu, setiap ruang kelas harus dilengkapi sarana pembelajaran berbasis TIK. Perpustakaan sekolah juga harus dilengkapi sarana digital yang memungkinkan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.

Program rintisan sekolah bertaraf Internasional membeikan jaminan kualitas layanan kepada seluruh stakeholders. Keberhasilan penyelenggaraan program rintisan sekolah bertaraf Internasional diimplementasikan secara luas tingkat nasional bahkan Internasional sehingga kualitas pendidikan nasional akan meningkat. Indikator mutu pendidikan secara system meliputi komponen *input*, proses dan *output*.

Komponen *input* meliputi kurikulum, alat bantu, tenaga pendidik dan kependidikan, siswa, bahan ajar, alat bantu pembelajaran, teknologi, kondisi lingkungan fisik maupun psikis, manajemen sekolah serta kendali mutu. Adapun komponen proses mencakup peningkatan efektifitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kriteria *output* pada standar kompetensi lulusan harus di atas standar nasional serta berkeunggulan dalam penggunaan bahasa Inggris dan TIK serta memiliki prestasi dalam kompetensi bertaraf Internasional, berkolaborasi serta melanjutkan pada perguruan tinggi bertaraf Internasional.

Kelembagaan setiap sekolah/Madrasah bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu prolehan sertifaikat akreditasi minimal “predikat A” dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah (BAN S). dengan memperoleh “predikat A” pada setiap priode akreditasi berarti bahwa sekolah bertaraf Internasional setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik dan sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan sekolah untuk menjamin mutu pendidikan secara optimal.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi yang baik adalah satu Negara anggota *Organization For Economic Cooperation and Depeloment*

(OECD) dan/atau Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan Proses Pembelajaran

Direktorat pembinaan pendidikan Taman Kanak-Kanak dan sekolah dasar menjelaskan: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan yaitu: TK, SD, SLTP, SLTA. Kurikulum disusun oleh setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah sekolah. Dalam mengembangkan kurikulum/program pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota perlu memperhatikan: Kurikulum/program disusun berdasarkan tahap perkembangan anak, kurikulum dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan serta kecerdasan anak, kurikulum dilaksanakan berdasarkan prinsip komprehensif dengan memperhatikan perbedaan bakat/minat dan sosial budaya serta kondisi kebutuhan masyarakat, kurikulum disusun dan dilaksanakan dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan gizi serta stimulasi psikososial.

Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota menggunakan prinsip sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan. *Kedua*, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan lima belajar yaitu: belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain dan belajar untuk membangun menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif dan menyenangkan. *Ketiga*, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke Tuhanan, individual, kesosialan dan moral. *Keempat*, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, inggarso sungtulodo* (bahasa jawa) yang berarti: dibelakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan

memberikan contoh dan teladan. *Kelima*, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multi media, sumber belajar, dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. *Keenam*, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. *Ketujuh*, kurikulum yang mencakup seluruh bidang pengembangan diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelompok di RSDBI.

Pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota menggunakan asas-asas sebagai berikut: (1) menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dengan mengadaptasi kurikulum sekolah di Negara lain, (2) mengajarkan bahasa asing, terutama penggunaan bahasa Inggris, secara terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya. Metode pengajaran dwi bahasa ini dapat dilaksanakan dengan 2 kategori yakni *Subtractive Bilingualism* dan *Additive Bilingualism*, yang menekankan pendekatan *Dual Language*; (3) pengajaran dengan pendekatan *Dual Language* menekankan perbedaan adanya Bahasa Akademis dan bahasa Sosial yang pengaturan bahasa pengantarnya dapat dialokasikan berdasarkan subjek maupun waktu, (4) menekankan keseimbangan aspek perkembangan anak meliputi aspek kognitif (intelektual) aspek sosial dan emosional dan aspek fisik, (5) mengintegrasikan kecerdasan majemuk

(*Multiple Inteligensi*) termasuk *Emotional Inteligensi* dan *Spiritual Inteligensi* ke dalam kurikulum, (6) mengembangkan kurikulum terpadu yang berorientasi pada materi, kompetensi, nilai dan sikap serta perilaku (kepribadian), (7) mengarahkan siswa untuk mampu berfikir kritis, kreatif dan analitis, memiliki kemampuan belajar (*learning how to learn*) serta mampu mengambil keputusan dalam belajar. Penyusunan kurikulum ini didasarkan prinsip "*Understanding by Design*" yang menekankan pemahaman jangka panjang ("*Enduring Understanding*"). (8) kurikulum tingkatan satuan pendidikan dapat menggunakan system paket dan kredit semester, (9) menekankan kemampuan pemanfaatan *information and communication Tecnology (ICT)* yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran.

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal; (a) menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (b) memenuhi Standar Isi, dan (c) memenuhi Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

3. Implementasi Kebijakan Pengembangan Lingkungan dan Penguatan Peran Serta Masyarakat

Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan RSDBI pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota pada tahun 2009 (tahun

pertama) dengan kebijakan yang mencakup kegiatan (1) pengembangan kelembagaan, (2) pengembangan kurikulum dan Proses Pembelajaran, (3) pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat, (4) pengembangan sarana pendidikan sudah berjalan efektif. Hal ini dilakukan dengan mempedomani arahan Direktorat Pembinaan TK dan SD selaku pembuat kebijakan dengan program kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk implementasi kebijakan RSDBI pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota pada tahun 2010 (tahun kedua/lanjutan) dengan kebijakan yang mencakup kegiatan: (1) Rehabilitasi Ruang Lab. Bahasa dan atau Lab. Komputer; (2) Pengadaan Sarana Lab. Bahasa dan atau Lab. Komputer; (3a) Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi Anak SD; (3b) Pengadaan/Modernisasi Sarana Ruang Kelas, Sarana Ruang Perpustakaan, Sarana UKS; dan (4) Studi Banding ke sekolah lain yang bertaraf Internasional, ketercapaian program yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota masih belum efektif.

Hal ini dapat dilihat dari analisis jenis kegiatan yang dikembangkan dengan kebijakan RSDBI tahun 2010, untuk kegiatan modernisasi sarana ruang kelas dan sarana ruang lainnya serta kegiatan studi banding ke sekolah lain yang bertaraf Internasional, tidak dapat dilaksanakan oleh

sekolah tersebut.

Hal ini dikarenakan tidak ada dukungan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendukung kedua jenis kegiatan tersebut. Sedangkan untuk implementasi kebijakan RSDBI pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota pada tahun 2011 (tahun ketiga/lanjutan) dengan kebijakan yang mencakup kegiatan: (1) Pengembangan pembelajaran berbasis ICT/TIK, dan modernisasi kelas; (2) Perencanaan dan Pelaporan; dan (3) Studi Banding, berdasarkan hasil penelitian masih belum efektif. Hal ini dikarenakan salah satu program kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD tidak dapat tercapai yakni di mana kegiatan studi banding tidak dapat dilaksanakan oleh RSDBI pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota. Seperti halnya pada kegiatan yang dikembangkan pada tahun 2010, kegiatan studi banding tahun 2012 ini juga seharusnya dilaksanakan dengan dukungan pemerintah daerah setempat. Dengan tidak ada dukungan maka kegiatan studi banding pun tidak dapat dilaksanakan oleh RSDBI pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota.

Kegiatan yang telah dilakukan juga dalam implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang,

aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, dan bebas budaya kekerasan.

- 2) Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik, lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, harapan tinggi, keunggulan, respek terhadap setiap individu dan komunitas sosial warga sekolah.
- 3) Mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.
- 4) Membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan di bidang bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan budaya lintas bangsa.

Berdasarkan temuan penelitian beberapa aspek dalam implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran masyarakat belum seluruhnya sesuai dengan kriteria ukur diantaranya kemampuan bahasa Inggris dan/atau bahasa asing para guru yang mengajar, belum membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui dinegaranya. Pada keindahan kenyamanan sekolah sudah cukup terpenuhi.

4. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,

bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, PP Nomor 19 tahun 2005.

Agar terpenuhi fungsinya sebagai RSDBI, perlu adanya prasarana yang memadai. Beberapa persyaratan yang menyangkut prasarana adalah: lokasi pendirian SD dengan memperhatikan persyaratan lingkungan yaitu faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman penduduk, kemudahan transportasi, luas tanah, bangunan gedung.

Sarana merupakan persyaratan penting dalam penyelenggaraan pendidikan SD, yang dimaksud dengan sarana di SD adalah meliputi perabot dan alat peraga/alat permainan. Perabot merupakan kelengkapan ruangan yang mendukung kegiatan belajar (KBM) di SD. Alat peraga/alat permainan merupakan alat yang digunakan oleh guru maupun anak dalam kegiatan belajar mengajar.

Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah :

- 1) Rehabilitasi Ruang Laboratorium

Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu rehabilitasi ruang laboratorium komputer dan laboratorium bahasa. Apabila salah satu sudah baik, maka hanya memperbaiki yang lainnya. Bila keduanya sudah baik, dana rehabilitasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki/merehab laboratorium yang lainnya (IPA atau matematika).

2) Pengadaan Sarana laboratorium

Pengadaan sarana laboratorium meliputi (1) sarana laboratorium komputer antara lain perangkat komputer sejumlah siswa/rombel (12 set), perangkat ICT (laptop, LCD, layer) disertai program/software; (2) sarana laboratorium bahasa meliputi perangkat peralatan untuk belajar bahasa secara individual, dan perangkat ICT (laptop, LCD, layer) disertai program pembelajarannya/software.

Selain itu, dapat dilakukan pengadaan perabot dan sarana penunjang lainnya untuk laboratorium bahasa dan atau laboratorium komputer antara lain papan tulis, lemari/rak, meja dan kursi (sesuai kebutuhan di laboratorium).

3) a. Pengadaan Buku Pengayaan dan Referensi

Pengadaan buku pengayaan dan buku referensi untuk anak SD sebagai koleksi perpustakaan, diutamakan buku-buku dalam bahasa Inggris seperti buku-buku sains untuk anak, beberapa ensiklopedi serta buku-buku teknologi dan komunikasi.

b. Pengadaan Sarana Ruangan

Pengadaan/modernisasi sarana ruangan diutamakan untuk ruang kelas, ruang perpustakaan dan ruang UKS. Semua ruang kelas perlu dilengkapi dengan sarana pelengkap seperti gambar presiden dan wakil, lemari atau kelengkapan lain yang harus ada. Pada perpustakaan perlu adanya peralatan yang

memudahkan untuk mengelola perpustakaan seperti perangkat komputer untuk administrasi, rak dan lemari buku, rak majalah, dsb. Pada ruang UKS perlu adanya tempat tidur pasien, timbangan badan dan pengukur tinggi badan, lemari obat-obatan, dsb.

4) Studi Banding

Studi banding ke sekolah-sekolah yang telah mempunyai reputasi Internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sangat diperlukan untuk menambah wawasan bagi para pengelola RSDBI dalam rangka mengembangkan sekolah. Hal yang perlu dicermati dalam studi banding antara lain sistem pengelolaan, kurikulum yang digunakan, sistem penilaian, buku-buku teks yang di pakai, peralatan pendidikan dan media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Dari hasil studi banding ini sekolah dapat mengadaptasi atau mengadopsi hal-hal yang diperlukan oleh sekolah.

Secara rinci masing-masing jenis kegiatan di atas dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengembangan Prasarana

Rehabilitasi Ruang Laboratorium, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melakukan rehabilitasi ruang laboratorium komputer dan atau

laboratorium bahasa. Bila keduanya ruang tersebut sudah ada maka dana ini dapat digunakan untuk menambah luas laboratorium yang ada. Sebagian dana pendamping digunakan untuk membangun identitas Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (Gapura).

b. Pengembangan Sarana

Pengembangan sarana laboratorium adalah untuk melengkapi sarana laboratorium komputer, bahasa, atau IPA.

c. Perencanaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Digunakan untuk penyusunan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sarana dan pembuatan laporan.

Dalam menuju kedewasaan setiap anak didik di SD memerlukan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan ditunjang berbagai fasilitas, sarana dan prasarana pendukung seperti alat praga/alat permainan, perabot kelas, ruang kelas/ruang bermain, guru, program-program pengembangan yang memadai serta suasana pendidikan yang menunjang.

Profil RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Beberapa persyaratan yang menyangkut prasarana adalah: (a) lokasi pendirian dengan memperhatikan persyaratan lingkungan yaitu faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman penduduk, kemudahan transportasi, (b) luas tanah, bangunan gedung.

Sarana pendidikan berupa peralatan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Pada bagian ini kebun dan taman sekolah tersedia secara baik.

Manajemen sarana dan prasarana merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara continue terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai dalam proses pembelajaran semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan

perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan pengpusan serta penataan.

Sarana dan prasarana di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota perlu ditingkatkan, seperti dalam temuan penelitian masih ada yang belum lengkap sarana dan prasarananya salah satu diantaranya adalah kecukupan LCD, kemudian tidak adanya tenaga khusus yang professional dalam menangani berbagai bentuk sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran proses pendidikan.

Dari komponen sarana dan prasarana di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dan dari data dokumentasi yang menunjukkan bahwa semua bentuk sarana pendukung belum tersedia sepenuhnya. Perpustakaan yang ada pun kurang menyediakan buku-buku pendukung bagi anak didik. Masih banyak judul buku yang harus dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran.

5. Implementasi Kebijakan Pembiayaan RSDBI

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 ayat 1 menyatakan “Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Pasal 54 ayat 1 menyatakan “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta secara perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.

Standar pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 62 ayat (1) pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. (2) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja lengkap. (3) biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat [1] meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, (4) biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat [1] meliputi: Gaji pendidikan dan kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pembiayaan dalam sebuah organisasi merupakan faktor yang juga sangat menentukan, administrasi keuangan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara continue terhadap keuangan/pembiayaan operasional sekolah sehingga kegiatan operasional kependidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Keuangan dan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang

efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, hal ini menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilaksanakan memerlukan biaya, baik disadari maupun tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, program pembiayan dirinci atau didistribusikan untuk pembiayaan pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan atau skala rioritas. program biaya dirinci secara detail dan dipergunakan untuk biaya investasi seperti pengadaan sarana dan prasarana, perabot, alat peraga dan peningkatan profesi kepala sekolah, guru dan pegawai, biaya operasi seperti ATK, pemeliharaan sarana prsarana, daya dan jasa,

mengadakan dan mengikuti berbagai kegiatan, biaya personal seperti gaji/honor pegawai. Besarnya biaya untuk tiap kegiatan tidak sama sesuai beban kegiatan. Penentu besarnya biaya tiap pos kegiatan berdasarkan kesepakatan antara kepala sekolah dan komite sekolah. Terdapat penanggung jawab tiap pos kegiatan dan sudah difungsikan secara maksimal atas petunjuk dan persetujuan kepala sekolah.

Jenis sasaran yang dibiayai di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota adalah kegiatan akademik dan non akademik, ini tergambar dalam dokumentasi yang peneliti peroleh dari kepala sekolah. Pada ratio pengeluaran dan pemasukan keuangan, adanya keseimbangan besarnya pengeluaran dan pemasukan keuangan. Sedangkan pada perangkat administrasi keuangan, ada buku pemasukan dan pengeluaran yang lengkap. Ada dokumentasi pengeluaran, seperti kwitansi, nota pembelian barang dan lain-lain. Ada perangkat pelaporan pengeluaran dana, sehingga ini menjadi pedoman dalam mengeluarkan dana.

Untuk RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sumber pembiayaan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta orang tua wali murid yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan komite sekolah. Dalam pengelolaan pembiayaan jumlah dan alokasi dana di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai dengan program dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait seperti komite sekolah, kepala sekolah,

tenaga tata usaha, penjaga sekolah, tenaga kependidikan, guru dan garis komando garis koordinasi yang berkepentingan, serta dipertanggung jawabkan setiap tahun anggaran/tahun pelajaran kepada masyarakat, komite sekolah dan pemerintah.

Dalam penyusunan (Rencana anggaran pendapatan pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota melibatkan stakeholders (komite sekolah, dan tokoh masyarakat yang berkepentingan terhadap sekolah), yayasan penyelenggaraan serta guru-guru yang berkompeten.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam manajemen pembiayaan di atas sesuai dengan pernyataan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut keuangan sekolah pada garis besarnya berkisar pada: uang sumbangan, uang kesejahteraan personil dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah seperti perbaikan sarana dan sebagainya. Yang belum sesuai adalah masih terbatasnya dana bantuan dari pemerintah sehingga pihak sekolah terpaksa membebani orang tua wali murid.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

D. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, kesimpulan yang diperoleh adalah :

6. Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan, pada tingkat prosedural berjalan baik dan efektif sebagaimana aturan, di mana pelaksanaan dan kemajuan RSDBI di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sesuai dengan panduan teknis dan pedoman pelaksanaan RSDBI. Hal ini dapat dilihat dengan terlaksananya seluruh pekerjaan kebijakan yang meliputi program-program RSDBI yang dikembangkan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota tersebut pada tahun kebijakan tersebut diberikan.

Implementasi kebijakan RSDBI secara substansial bagi kesiapan sekolah menuju fase mandiri sebagai sekolah dasar bertaraf Internasional cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dengan indikator berikut: (a) peningkatan SD yang makin berkualitas dan peserta didiknya mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) dan sebagian siswa/murid dapat berbahasa Inggris dalam mendukung proses pembelajaran; (b)

pengembangan program pembelajaran yang mengarah pada standar Internasional yakni pengembangan kurikulum yang meliputi standar kompetensi, tujuan, KTSP, silabus, RPP dan bahan ajar yang kualitasnya bertaraf Internasional.; (c) sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai berupa ruang Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, media pembelajaran yang berbasis ICT.

7. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kurikulum dan proses pembelajaran, kelengkapan kurikulum seperti dokumen yang memuat: profil sekolah, tujuan pendidikan, visi dan misi sekolah, struktur kurikulum dan muatan KTSP serta kalender pendidikan, semua guru menyusun silabus yang terdiri dari: program tahunan, program semester, satuan kegiatan mingguan, satuan kegiatan harian dan penilaian perkembangan anak. Standar pengembangan kurikulum RSDBI juga mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM). Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengacu pada kurikulum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan. Proses pembelajaran berjalan sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan.
8. Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat oleh RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, beberapa bagian sudah sesuai dengan standar, seperti pada aspek

kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, keamanan. Adapun yang belum sesuai adalah kemampuan berbahasa Inggris dan/atau bahasa asing para guru yang mengajar, kemudian belum terjalin/terbangun kerjasama dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi,

9. Implementasi kebijakan pengembangan sarana prasarana, belum tersedia atau terpenuhi sebagaimana mestinya, seperti perpustakaan, jumlah dan judul buku, serta media teknologi masih banyak yang kurang.
10. Implementasi kebijakan pembiayaan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota, belum sesuai dengan standar yang ditetapkan karena masih mengharapkan bantuan pemerintah dan membebani orang tua wali murid.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat menyampaikan rekomendasi, RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota dapat dilanjutkan dan diteruskan dengan syarat :

1. Kegiatan, keunggulan dan prestasi RSDBI tetap dipertahankan dan dikembangkan.
2. Dalam mengelola lembaga harus memenuhi standar pengelolaan di Negara anggota OECD, menerapkan mutu manajemen ISO 9001 dan menerapkan system administrasi sekolah berbasis teknologi informasi

dan komunikasi pada delapan standar nasional pendidikan.

3. Penggunaan kurikulum yang diimplementasikan dalam standar kompetensi lulusan dan standar isi harus dibuat kriteria ukur sehingga lebih mudah dalam proses evaluasi.
4. Peningkatan kemampuan tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan staf administrasi.
5. Memenuhi sarana dan prasarana dan mampu mengelolanya dengan teknologi komunikasi dan informasi.
6. Pencarian dana lain sehingga tidak ada ketergantungan dengan pemerintah serta tidak membebani orang tua wali murid.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003*.
- Balitbang, Depdiknas. *Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, 2007.
- Blandford, S. Shaw M. *The Nature of International School Leadership*. In: S. Blandford and M. Shaw (Eds.), *Managing International Schools*. (pp. 9-28). London: Routledge Falmer, 2001.
- Carl V. Patton, dan Sawicki, David S. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 2000.
- Daniel Stufflebeam, *Evaluation Model View Points on Educational and Human Services The Evaluation*, (New York: Publisper, 2002).
- Danim, Sudarwan. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- David, Easton, *A Framework for Political Analysis*, John Wiley and Sons Inc, New York, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional, Tahun 2008*.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Buku Panduan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional, Tahun 2008*.
- Donalds, Meter, Van, dan Carl E. Horn, Van, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" dalam *Administration dan Society*, Vol. 8, 2001.
- Drucker, P.F. *Managing for Result*, New York: Harper & Row, 2000.
- Edwar Sallis, *Manajemen System Analysis and Application*. New York: Holt Saunders Internasional Edition, 2008.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*

Kebijakan tau Program. (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis). Surakarta. Pustaka Cakra, 2009.

Faisal, Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Findlay, R. *International Schools Handbook*. London: Kogan Page, 2000.

Gellar, C. *International Education: Some Thoughts on What It is and What It might be*, *International School Journal*, 1 pp, 21-6, 2003.

Geller, C.A. *How International Are We?* *International Schools Journal* 26, (p.5-7), 1993.

George C. Edwards, III, dan Ira, Sharkansky, *The Policy Predicament*. W.H. Freeman. San Fransisco, 2000.

Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Harold, Laswell, dan Kaplan, Abraham, *Power And Society*, New Heaven: Yale University Press, 2001.

Hayden, M.C. and Thompson, J.J. *International Education: The Crossing of Frontiers*. *International Schools Journal*, 2002.

Hayden, M.C. and Thompson, J.J. *Perceptions of International Education: A reliminary Study*. *International Review of Education*, 2000.

Hayden, M.C. and Thompson, J.J. *Potential Difference: the driving force for international education*. *International Schools Journal*, Vol. 16, No 1, 2001.

Hayden, M.C., *Fundamentals of Educational Planning. International Schools: Growth and Influence*. Paris 2002. UNESCO: International Institute For Educational Planning, 2002.

Hayden, M.C., *International Education: Principles and Practice*. London: Kogan Page, 2000.

Heinz, Eulau, and K. Prewitt. *Labyrinths of Democracy*, Indianapolis: Bobbs- Merrill, 1999.

Hellen, Connell, *Education for International Life-A Neglected Area* (in Skilbeck, M ed. *Readings in School-based Curriculum*

- Development*. London: Paul Chapman Publishing Ltd., 2001.
- Hill, I. *Students Types, School Types and Their Combined Influence on The Development of Intercultural Understanding*, 2006.
- Husen, T. and Postlethwaite, T.N. *The International Encyclopaedia of Education*. Oxford: Pergamon Press, 2003.
- Iskandar, Ketua Dewan Pendidikan Rejang Lebong, *Seminar Pendidikan dengan Tema Meningkatkan Mutu Pendidikan di Rejang Lebong*, Tanggal 24 Mei 2012.
- James E. Anderson, *Public Policy Making*, Boston: Houghton Mifflin, 2000.
- Joel, Spring, *Education and the Rise of Global Economy*. Mahawah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999.
- Jonietz, P.L. and Harris, N.D.C. eds. *World Yearbook of Education 1991: International Schools and International Education*. London: Kogan Page, 2000.
- Journal of Research in International Education, 5 (1), 5-33.
- Kamus, The New Grolier Webster International Dictionary of The English Language, 1999.
- Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: M. 291 Tahun 1011 tentang Penetapan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) RSBI Pendidikan Dasar Provinsi Bengkulu.
- KOMPAS, Rabu, 09 Januari 2013.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mathews M. *The Ethos of International Schools*. University of Oxford, M. SC. Thesis, 2000.
- McCaig, N. "Birth of A Notion". In: *The Global Nomad Quarterly*, I (1), 1-2. 2001.
- McKenzie, M. *Going, going, Gone- Global!* (In) Hayden, M.C. and

- Thompson, J. J., 2000.
- Media Indonesia, “*Perlu Diperbanyak Sekolah Berstandar Internasional*”, 16 Oktober 2004.
- Miftah, Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Kencana, Cet. Ke-1, 2008.
- Musa, (Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kab. RL), *Loka Karya Pendidikan di Kabupaten RL, dengan Tema ‘Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan’*, Curup: Kemendiknas RL, tanggal 12 Mei 2012.
- Nurudin, Tesis: *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Banyuwangi*. Program Pasca Ilmu Administrasi. Program Studi Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik. Departemen Ilmu Administrasi. FISIP Universitas Indonesia, 2007.
- Ohmae, K. *The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies*. New York: The Free Press, 2003.
- Parker, R.S. *Policy and Administration, dalam Public Policy and Administration in Australia: A Reader*. (ed. R.N. Spann dan G.R. Cunon). John Wiley and Sons Australia Pty.LTD. Sydney, 1975.
- Peter, Beyer, *Religion and Globalization*, Sage Publication, New Delhi, 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Gubernur Nomor: 30 Tahun 2009 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Bengkulu.
- Pollock, D.C.; Van Reken, R.E. *The Third Culture Kid Experience: Growing Up Among Worlds*. Yarmouth, Maine: Intercultural Press Inc., 1999.
- Porter, M., “*Creating Tomorrow’s Advantages*” in Rowan Gibson (Ed.). *Rethinking the Future*. London: Nicholas Brealey Publishing Limited, 2001.

- Prasetya, Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-LAN Press, 2001.
- Prasetya, Irawan, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. DIA FISIP UI. Jenkins, Colin.(1998). *Global Issues: A Necessary Component of a Balanced Curriculum. for the 21st. Century* (In) Hayden, M. C. and Thompson, J.J. Jenkins, W.I.(1978). *Policy Analysis*, Oxford: Martin Robertson, 2007.
- Randall, B. Repley, dan Franklin, Grace A. *Bureaucracy and Policy mplementation*. The Dorsey Press. Chicago, 2001.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)*.
- Riant, Nugroho D. *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Safewi, (Kadiknas RL), *Seminar Pendidikan tentang RSBI*, Curup, 20 Juni 2012.
- Saifuddin, D. Fahmi. "Garapan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Memasuki Abad ke-21". *Dalam Visi dan Tatanan Berfikir di Alam Pendidikan Memasuki Abad ke-21*. Ed. Washington P.Napitupulu, 2001.
- Samudra, Wibawa, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Intermedia. Jakarta, 2004.
- Satria Dharma, *Seminar Nasional SBI dengan Tema "Revitalisasi SBI dalam rangka Meningkatkan Mutu dan Daya Saing Bangsa"*, Grand Zuri Cikarang Bekasi: Balitbang Kemdiknas tanggal 29-31 Oktober 2010.
- Schaetti, B. "The Global Nomad Profile" In: *The Global Nomad: The Benefits and Challenges of Internationally Mobile Childhood*. Regen College Conference. London, 23 April 2000.
- Slamet, (Dosen UNY), *Simposium SBI*, Jakarta: Hotel Atlit Century, tanggal 9 Maret 2011.

- Smith, A.W., *Management System Analyses and Applications*. New York: Holt Saunders International Editions, 2003.
- Solichin Abdul, Wahab, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cet. Ke 6, 2008.
- Spencer, Milton H. & Amos, Jr. Orley M. *Contemporary Economics*, Worth Publishers, New York, Vol. 8, 2000.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, 2005.
- Suharmisimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Suparmoko, M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, BPFE, Edisi ke – 5, 2003.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Suriamihardja, Basyuni. “Misi dan Visi Pendidikan Menghadapi Abad ke-21” dalam *Visi dan Tatanan Berfikir di Alam Pendidikan Memasuki Abad ke-21*. Dalam Ed. Washington P. Napitupulu. Jakarta, Balai Pustaka, hal. 77-80, 2005.
- Tarmizi, (Tokoh Masyarakat Rejang Lebong), *Ceramah Umum tentang Pendidikan*, Bengkulu tanggal 12 Juli 2012.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice-Hall, 1995.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Weda Sukardi, Tesis: *Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah untuk Mutu Layanan Pendidikan Dasar 9 tahun*. Program Pascasarjana. FISIP UI, 2006.
- Widodo, Joko, *Good Governance, Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Penerbit Insan Cendikia, 2001.
- Wilkinson, David, *International Education: A Question of Access*. (In)

Hayden, M. C. and Thompson, J. J., 2002.

William, N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall Inc., New York, 1998.

Winarno, Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2002.

LAMPIRAN 1

PEDOMAN OBSERVASI

Hari/Tanggal :

Tempat :

Lokasi/Unit :

Yang di Observasi :

No.	Aspek yang di Observasi	Indikator	Temuan

Curup,2012

Pengelola/Penanggungjawab

Observer,

.....

.....

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah gambaran perubahan status kelembagaan sekolah?
2. Bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap RSDBI?
3. Bagaimana kurikulum yang digunakan?
4. Bagaimanakah dokumen persiapan pembelajaran?
5. Bagaimanakah pengembangan lingkungan sekolah?
6. Bagaimanakah kerja sama yang dilakukan oleh pihak sekolah?
7. Bagaimanakah kelengkapan prasarana pembelajaran?
8. Bagaimanakah kelengkapan sarana pembelajaran?
9. Bagaimanakah substansi RAPBS RSDBI?
10. Bagaimanakah gambaran penggunaan dana?
11. Bagaimanakah administrasi keuangan RSDBI?

Lampiran 3

PETIKAN HASIL WAWANCARA

NO	Aspek yang di Wawancara	Informan	Hasil Wawancara
1	Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan	Kepala sekolah	1. Lembaga Sekolah yang dapat menyelenggarakan RSDBI, bila mana sekolah

		<p>dapat mengembangkan status lembaga yang di sertai dengan konsekuensi segenap unsur dalam lingkup sekolah untuk mendukung pengembangan lembaga tersebut (1 Oktober 2012).</p> <p>3. Pada saat ini, lembaga sekolah ini memiliki akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dengan kategori "A". Artinya hampir semua aspek yang mendukung penyelenggaraan pendidikan ini dapat terpenuhi. Dengan pengembangan lembaga ini, maka statusnya menjadi Rutinitas Sekolah Dasar Berbasis Internasional (2 Oktober 2012).</p> <p>4.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>f. Peraturan MENDIKNAS RI Nomor 78 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan SBI pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.</p> <p>g. SK DIRJEN MAPEN DASMEN DEPDIKNAS</p>
--	--	---

			<p>Nomor: 301/IC2/D.I/2009 Tentang Penetapan Sekolah Dasar sebagai RSDBI Tahun 2008. Tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui komite sekolah (2 Oktober 2012).</p> <p>8</p> <p>c. Pengembangan kelembagaan dengan rincian:</p> <p>3) Verifikasi ISO (<i>Audit internal</i> dan <i>Audit Eksternal</i>)</p> <p>4) Kegiatan operasional implementasi MBS dengan <i>workshop</i> dalam kesiapan menghadapi SBI dan era globalisasi.</p> <p>d. Pengembangan Organisasi Sekolah, dengan rincian kegiatan:</p> <p>4) <i>Workshop</i> perumusan visi dan misi serta tujuan sekolah.</p> <p>5) Pemasangan jaringan internet ke seluruh ruang, pemasangan salon/speker ruang (8 Oktober 2012).</p>
2	Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum	Kepala sekolah	9. Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum mencakup bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Adapun isi dari kurikulum

		<p>terdiri dari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator. Sekolah telah menyusun perangkat KTSP dokumen I yaitu profil sekolah RSDBI, tujuan pendidikan, visi dan misi sekolah, struktur kurikulum, muatan KTSP dan kalender pendidikan (8 Oktober 2012)</p> <p>10. Struktur pembelajaran RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup yang terdiri dari; bidang pengembangan Pembiasaan yang meliputi (1) Moral dan nilai-nilai agama, (2) Sosial, emosional, dan kemandirian. Kemampuan dasar yang meliputi: Bahasa, kognitif, fisik dan motorik, seni, yang diajarkan selama 40 jam per minggu.</p> <p>Waktu belajar pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota menggunakan beban belajar satu tahun dalam bentuk perencanaan semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan program pembelajaran di RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota adalah perencanaan mingguan efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester)</p>
--	--	--

		<p>adalah 34 minggu, dengan jam belajar efektif adalah 7 jam (280 menit) perhari, hari senin s.d. kamis + sabtu = 5 hari x 7 jam = 35 jam (280 menit) x 5 hari = 1400 menit, hari jumat 6 jam x 40 menit = 240. Jumlah jam perminggu 41 jam (1.640 menit), jumlah jam pertahun 34 minggu x 41 jam = 1.394 jam (55.760 menit). (8 Oktober 2012)</p> <p>Kalender pendidikan RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif dan hari libur</p> <p>12</p> <p>j. <i>Workshop</i> penyusunan KTSP, silabus, dan RPP.</p> <p>k. <i>Workshop</i> pengembangan bahan ajar berkualitas internasional.</p> <p>l. <i>Workshop</i> pengembangan bedak SKL, pengembangan pendidikan yang berorientasi PLH, pembelajaran PAKEM dan penyusunan perangkat soal, penilaian dengan multi media.</p> <p>m. <i>Workshop</i> pembuatan</p>
--	--	---

		<p>LKS berbahasa Inggris.</p> <p>n. <i>Workshop</i> pengembangan sistem penilaian.</p> <p>o. Peningkatan pengawasan dan memperlancar komunikasi dengan pemasangan, perbaikan air phone ke semua ruang.</p> <p>p. Pengembangan dan pelatihan bahasa Inggris untuk guru-guru.</p> <p>q. Pengembangan wawasan guru dengan pengadaan buku bacaan guru.</p> <p>Penambahan sarana pembelajaran (penunjang laboratorium), (10 Oktober 2012).</p> <p>13. Proses pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada guru yang terpenting diingat dan sering ditanamkan kepada guru adalah bagaimana guru bisa menyelenggarakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreativitas serta kemandirian para peserta didik sesuai dengan program pembelajaran yang sudah di susun dan</p>
--	--	--

			menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebagai pengantar, (11 Oktober 2012).
3	Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat	Kepala sekolah	<p>14.</p> <p>c. Pengembangan Lingkungan dan Budaya Sekolah</p> <p>4) Menata lingkungan fisik.</p> <p>5) Menata lingkungan sekolah sehat program 7 K.</p> <p>6) Memelihara kebersihan secara terus.</p> <p>d. Penguatan Peran Masyarakat</p> <p>3) Pertemuan dengan komite sekolah.</p> <p>Penggandaan dokumen kerja sama dengan masyarakat dan pihak lain yang terkait, (12 Oktober 2012).</p>
4	Implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	Kepala sekolah	<p>17. Kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana diupayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yang dapat kami usahakan. Pada bidang prasarana tidak begitu menjadi beban bagi kami karena prasarana cukup tersedia, (13 Oktober 2012).</p> <p>18. Bagian yang membedakan status kelembagaan sekolah adalah sarana pendukung pembelajaran. Baik barang yang bergerak</p>

			<p>maupun tidak dan barang habis dipakai maupun tidak habis di pakai, diupayakan mengacu kepada standar yang dipersyaratkan. Misalnya ruang belajar, mubelar (meja, kursi, lemari dan papan tulis), alat peraga, alat bantu pembelajaran baik manual maupun berbasis Teknologi Informasi (TI), buku laporan hasil belajar (Buku Rapot), buku-buku penunjang pembelajaran baik pegangan guru maupun untuk siswa, buku Lembaran Kerja Siswa (LKS), laboratorium, ruang keterampilan dan sebagainya, (15 Oktober 2012).</p> <p>21. Kebijakan lain dalam bidang sarana dan prasarana selain bantuan pemerintah adalah meminta bantuan kepada pihak-pihak yang memperhatikan pendidikan untuk menjadi donatur. Akan tetapi saat ini kegiatan ini belum memperlihatkan hasil yang memadai, (16 Oktober 2012).</p> <p>22. Ruang belajar sudah kita bedakan dengan ruang belajar biasa, di mana lantai di atas karpet, tempat duduk dan meja tidak lagi berpasangan</p>
--	--	--	---

		<p>tetapi sudah sendiri-sendiri sehingga dapat di pindah-pindahkan sesuai kebutuhan kepentingan pembelajaran, tersedia galon air untuk dipergunakan siswa baik air dingin maupun hangat, rak tempat sepatu, ruang belajar sudah menggunakan pendingin ruangan (AC). Ruang belajar yang telah ditata dan disiapkan hanya dari kelas I hingga kelas IV dan kelas V dan VI masih seperti biasa. Kelas I hingga kelas IV memang telah dalam katagori RSDBI sedangkan kelas V dan VI masih berstatus sekolah biasa. Sarana yang belum terpenuhi saat ini adalah buku-buku pembelajaran baik untuk murid maupun guru, media pembelajaran terutama berbasis Teknologi Informasi (TI) dan locker untuk tempat menyimpan buku-buku atau bahan-bahan pelajaran siswa, (16 Oktober 2012).</p> <p>25. Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan antara lain dengan kegiatan: Mengadakan peralatan pendidikan yang lengkap dengan tuntutan sekolah bertaraf internasional.</p>
--	--	--

			<p>Mengadakan perangkat media pendidikan untuk keperluan pembelajaran dan administrasi sekolah.</p> <p>Mengadakan buku sekolah (buku teks pelajaran, buku referensi, dan buku bacaan) yang cukup baik untuk siswa maupun guru.</p> <p>Membangun ruang/tempat pusat sumber belajar guru yang lengkap dengan fasilitas/isinya (komputer, jaringan internet, buku sumber, VCD, meja kursi kerja, rak buku).</p> <p>Membuat ciri khas SBI-SD Negeri 2 Centre Curup Kota yang bersifat monumental dan fasilitas tempat bermain, kreasi dan rekreasi di sekolah.</p> <p>Melaksanakan pembangunan/rehab ruang perpustakaan/ UKS/ ruang Pimpinan dan bangunan/ruang lain yang diperlukan, (17 Oktober 2012).</p>
5	Implementasi kebijakan pembiayaan	Kepala sekolah	<p>27. Kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembiayaan dikucurkan dana bantuan; tahun pertama (2009/2010) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tahun kedua (2010/2011) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tahun ketiga (2011/2012)</p>

			<p>tidak ada bantuan, dan tahun keempat (2012/2013) sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi memberi bantuan berupa: Alat Tulis Kantor (ATK), Sampul Raport, Mebiler berupa meja kursi loker dan papan tulis, Insentif guru honor, laptop, AC, LCD dan Komputer.</p> <p>Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong berupa; Pagar sekolah dan Gapura, meja kursi siswa, laptop dan printer serta auning depan (19 Oktober 2012).</p> <p>28. Pengelolaan keuangan dicatat dalam buku kas dan dipergunakan sesuai kebutuhan, dilakukan secara transparan antara kepala sekolah guru, dan komite sekolah, dipertanggungjawabkan setiap bulannya kepada pemerintah dan kepada komite sekolah setiap akhir tahun pelajaran, (21 Oktober 2012).</p>
--	--	--	--

No	Aspek Yang Di Wawancara	Informan	Hasil Wawancara
1	Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan	Observasi	7. e. Adanya berbagai keluhan masyarakat

			<p>tentang upaya pembelajaran yang aktif terutama untuk mempersiapkan anak menghadapi ujian akhir khususnya kelas VI.</p> <p>f. Adanya tuntutan dan keinginan masyarakat terutama oleh orang tua wali murid agar segera melaksanakan Sekolah Bertaraf internasional.</p> <p>g. Orang tua dan wali murid akan berusaha secara maksimal dalam membantu terlaksananya Sekolah Dasar bertaraf internasional. Orang tua dan wali murid merekomendasikan untuk segera membentuk panitia dan Tim pengembang RSDBI, (5 Oktober 2012).</p>
2	Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum	-	
3	Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat	-	
4	Implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	Observasi	23. Kebijakan pemerintah dalam hal sarana adalah memberi bantuan berupa komputer 40 unit, LCD sebanyak 10 buah, laptop sebanyak 10 buah, locker

		<p>sebanyak 8 set dan dana penunjang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya, (17 Oktober 2012)</p> <p>24. Untuk menunjang pihak sekolah dalam memenuhi standar sarana dan prasarana, maka setiap siswa yang diterima masuk dikenakan biaya sumbangan orang tua murid; tahun pertama (2009/2010) sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per wali murid, tahun kedua (2010/2011) sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per wali murid, tahun ketiga (2011/2012) Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per wali murid, dan tahun keempat (2012/2013) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per wali murid, dan uang komite (SPP) tahun pertama 2009/2010) sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) persiswa perbulan, tahun kedua (2010/2011) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa perbulan, tahun ketiga (2011/2012)</p>
--	--	--

			sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) persiswa perbulan, dan tahun keempat (2012/2013) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persiswa (17 Oktober 2012).
5	Implementasi kebijakan pembiayaan	-	

No	Aspek Yang di Wawancara	Informan	Hasil Wawancara
1	Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan	Komite sekolah	<p>5. Sebagai pengurus komite sekolah tugas kita adalah memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam hal penunjang terlaksanakannya pembelajaran yang berkualitas. Disamping itu tugas kita adalah menghimpun, menerima keluhan dan harapan orang tua wali murid dan masyarakat pada umumnya. Salah satu harapan mereka itu adalah membuat Sekolah Dasar ini menjadi sebuah Sekolah Dasar dengan kriteria atau standar internasional, (4 Oktober 2012).</p> <p>6. Harapan masyarakat terhadap RSDBI adalah agar anak-anaknya memiliki wawasan internasional dan tidak</p>

			mengagung-agungkan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Disamping itu orang tua mempersiapkan anaknya agar juga dapat melanjutkan pada sekolah tingkat pertama yang sudah bertaraf internasional, (4 Oktober 2012).
2	Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum	-	
3	Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat	Komite sekolah	<p>16.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Pembuatan taman. . Penambahan besi pengaman lantai. . Pembelian alat-alat kebersihan. . Pengadaan stabilizer untuk kenyamanan belajar. . Mengecat dinding, halaman/tembok sekolah dan kamar mandi atau WC siswa dan guru. . Membuat tulisan (reklame) yang berkaitan dengan program sekolah sehat, yang ditempatkan pada beberapa bagian. . Menempatkan petugas pengamanan sekolah. . Menempatkan guru piket pada meja piket yang dapat segera dilihat ketika tamu datang

			<p>kesekolah.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Memberikan pengawasan yang terpadu. . Semua guru dan petugas sekolah menggunakan identitas yang resmi. v. Menyediakan ruangan berobat/UKS yang memadai. <p>Membina hubungan kerja sama dengan orang tua wali murid dan masyarakat lain yang menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, (14 Oktober 2012).</p>
4	Implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	Komite sekolah	<p>19. Kebijakan yang kami berikan kepada pihak sekolah dalam upaya memenuhi standar sarana dan prasarana ini adalah dengan rapat komite sekolah dan bersama-sama mencari solusinya. Salah satunya adalah dengan bersedia membantu sesuai mufakat dari musyawarah komite. Hal ini dilakukan karena komite menyadari pihak sekolah belum mampu memenuhi ketentuan sarana dan prasarana yang diperlukan, (16 Oktober 2012).</p> <p>20. Kami tahu bahwa kalau sekolah bertaraf</p>

			internasional itu agak beda ruang belajar, tempat duduk dan meja belajarnya, pakaian sekolah dan buku-bukunya. Karena itu kami musyawarah bersama dengan orang tua murid lainnya, (16 Oktober 2012).
5	Implementasi kebijakan pembiayaan	-	
No	Aspek Yang di Wawancara	Informan	Hasil Wawancara
1	Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan	Ketua pengembangan	2. Dalam upaya penyelenggaraan RSDBI ini bidang pengembangan kelembagaan menjadi aspek yang terpenting kita pikirkan. Peningkatan status tentu memberi dampak kepada aspek-aspek lain dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini. Upaya pengembangan ini telah kita bawa dalam forum-forum rapat baik kepada Pemerintah Daerah, Komisi Pendidikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komite Sekolah, para guru dan praktisi pendidikan lainnya, (1 Oktober 2012).
2	Implementasi kebijakan pengembangan	-	

	kurikulum		
3	Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat	-	
4	Implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	-	
5	Implementasi kebijakan pembiayaan	-	

No	Aspek Yang di Wawancara	Informan	Hasil Wawancara
1	Implementasi kebijakan pengembangan kelembagaan	-	
2	Implementasi kebijakan pengembangan kurikulum	Wakil Kepala Sekolah	11. Pengembangan silabus pada RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota berisi uraian tentang perencanaan semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Perencanaan tahunan, RSDBI SD Negeri 2 Centre Curup Kota sudah menyusun perencanaan tahunan yang berisi tema/sub tema, kegiatan inti yang dikembangkan, alokasi waktu pelaksanaan semester I dan semester II
3	Implementasi kebijakan pengembangan lingkungan dan penguatan peran serta masyarakat	Wakil Kepala Sekolah	15. f. Mengembangkan lingkungan sekolah yang bersih, tertib, indah, rindang, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba,

			<p>dan bebas kekerasan.</p> <p>g. Proses pendidikan berpusat pada pengembangan peserta didik lingkungan belajar yang kondusif, penekanan pada pembelajaran, profesionalisme, dan keunggulan.</p> <p>h. Mengembangkan budaya kompetitif dan kolaboratif serta jiwa kewirausahaan yang dilandasi oleh moral dan etika yang tinggi.</p> <p>i. SBI membangun kultur yang mengarah pada peningkatan kemampuan dibidang bahasa inggris dan/atau bahasa asing lainnya dan teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Menjalin kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan satuan pendidikan setara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya</p>
4	Implementasi kebijakan pengembangan sarana dan prasarana	-	
5	Implementasi kebijakan pembiayaan	-	

RIWAYAT HIDUP

H. Lukman A. lahir tanggal 29 September 1959 di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, putra kelima (bungsu) dari pasangan **H. Abuseman** (alm) dan **Hj. Hadiyati** (alm), menikah dengan **Hj. Lailati, S.Pd., MM.**, putri ketiga pasangan **H. Mustofa** dan **Hj. Baria** (alm), mempunyai tiga orang putra; Mufti Alam Adha, S.EI, M. Ilham Adepio, dan Iif Cahyo Tunte, Alamat rumah Jl. D.I. Panjaitan No. 166 RT3/RW4 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.



Pendidikan formal: MIN Bandung Marga 1975, PGAN 4 Tahun Curup 1979, PGAN Curup 1981, Sarjana Muda Ushuluddin IAIN Palembang 1985, Sarjana Ushuluddin IAIN Palembang 1988, S2 Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Palembang 2005. Terhitung 11 Maret 2010 menempuh program doktor pada Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Mengawali karir sebagai guru SD Negeri 5 Curup tahun 1981-1983, Guru M.Ts. Nurul Kamal Sambirejo Curup tahun 1983-1985, Wakil Kepala MTs. Nurul Kamal tahun 1984-1986, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Kamal Sambirejo Curup tahun 1986-1988, Guru SMA Negeri 3 Curup tahun 1988-1990, Guru SMA Negeri 4 Curup tahun 1990-1991, Pengelola Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Palembang di Curup tahun 1991-1993, Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Curup tahun 1993-1997, Kariri di STAIN Curup; Protokuler dan Humas 1997-1999, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan 1999-2004, Kepala Bagian Administrasi 2004-2009, Kepala Pusat Informasi dan Kerjasama 2009-2012, Ketua Jurusan Tarbiyah 2012 hingga sekarang.

Ketua Forum Kabag STAIN se Indonesia tahun 2006-2008, Penggagas dan pendiri FKA-ESQ Provinsi Bengkulu 2006, Wakil Ketua Koordinator FKA-ESQ Provinsi Bengkulu 2007-2009, Koordinator FKA-ESQ Rejang Lebong 2009 hingga sekarang. Ketua Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Rejang Lebong 2005-2009, Ketua Bidang Pembinaan Kader Resimen Mahasiswa Provinsi Bengkulu 2009-2012.

Penelitian yang pernah dilakukan; Keberhasilan Kuliah Subuh di Majid Muhammadiyah Curup 1995, Keberhasilan Program Keluarga Berencana Pemeluk Agama Budhdha dan Islam di Kabupaten Rejang Lebong 1999, Hubungan Pembinaan Guru dengan Peningkatan Kinerja Guru dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Rejang Lebong 2005. Buku yang ditulis adalah: Pendidikan Kepramukaan 2012, selain itu puluhan artikel ilmiah dibidang Dakwah, Pendidikan, Politik dan Sosial.